



**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PRODAMAS)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister**

**NATALIA NIKEN EKAWATI
NIM. 146030101111002**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2016



IDENTITAS PENGUJI

**Judul Tesis : PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PRODAMAS)**

Nama Mahasiswa : Natalia Niken Ekawati

NIM : 146030101111002

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan Daerah

KOMISI PEMBIMBING

Ketua : Prof.Dr.Abdul Hakim, M.Si

Anggota : Dr.Irwan Noor, MA

TIM PENGUJI

Penguji I : Prof.Dr.Soesilo Zauhar, MS

Penguji II : Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA

Tanggal Ujian : 19 April 2016



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 19 April 2016

Mahasiswa,



Nama : Natalia Niken Ekawati
NIM : 146030101111002
PS : Magister Ilmu Administrasi Publik
PPSUB



LEMBAR PERUNTUKAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan secara khusus kepada :

Bapak Dr. Mochammad Saleh Soeaidy, MA (Alm.), selaku dosen pembimbing skripsi (S1), dan sekaligus sosok yang tidak pernah menyerah untuk membuat penulis bersedia melanjutkan program studi magister dan menyelesaikannya tepat waktu. Terima kasih atas semua nasehat dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Meskipun beliau telah tiada, tetapi semangat-nya selalu menginspirasi penulis, khususnya dalam menyelesaikan tesis ini.

Ibu Dra. Maria Goretti Wi Endang NP., M.Si, terima kasih atas dukungan, bantuan, dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Berkat ibu, penulis dapat menyelesaikan program studi magister tepat waktu.

Kedua orang tuaku, beserta seluruh keluarga, terima kasih atas semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Dhany, terima kasih atas kesetiaan, pengorbanan, dan dukungan tang telah diberikan selama ini kepada penulis.



RIWAYAT HIDUP

Natalia Niken Ekawati, lahir di Kota Malang, pada tanggal 9 Juli 1992, anak tunggal dari Bapak Budijanto dan Ibu Irene Ninik Trianingsih, mulai TK hingga SMA di Kota Malang, lulus SMA pada tahun 2010, kemudian melanjutkan studi S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus S-1, langsung melanjutkan Program Magister dengan program studi yang sama di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada tahun 2014 sampai 2016.

Malang, April 2016

Penulis



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof.Dr.Bambang Supriyono,MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Dr.Irwan Noor, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, dan Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Prof.Dr.Abdul Hakim, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Prof.Dr.Soesilo Zauhar, MS, dan Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA, yang telah bersedia menjadi tim penguji dan memberikan saran perbaikan bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh Staf Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, yang telah membantu segala urusan penelitian dan selama penyusunan tesis.
6. Ir.Un Achmad Nurdin, MM, selaku Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri, yang telah memberikan ijin penelitian bagi penulis dan menjadi nara sumber dalam penyusunan tesis ini.
7. Paulus Luhur Budi P. S.Sos, selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat – Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri, yang telah bersedia meluangkan waktu dan menjadi nara sumber dalam penyusunan tesis ini.
8. Seluruh Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri, yang telah membantu proses perijinan penelitian secara administratif.
9. Drs.Zustiono Fatoni, selaku Lurah Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
10. Mbak Dina, selaku pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis selama proses pengambilan data.
11. Seluruh Warga Kelurahan Tosaren, khususnya di wilayah RT-01, RT 02, dan RT 03 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi responden penelitian.
12. Orang Tua, Keluarga, dan Mas Dhany yang selalu sabar dan pengertian terhadap kesibukan penulis dalam penyusunan tesis ini.
13. Teman-teman Magister Ilmu Administrasi Publik angkatan 2014 atas dukungan dan kerja samanya selama ini.

Malang, April 2016

Penulis

RINGKASAN

Natalia Niken Ekawati, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Minat Perencanaan Pembangunan Daerah, Universitas Brawijaya Malang, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat”, Komisi Pembimbing Ketua Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si, Anggota Dr. Irwan Noor, MA.

Pemerintah dapat menyelenggarakan pembangunan daerah dengan pendekatan *bottom-up* melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan menjadi media masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu bentuk perkembangan musyawarah perencanaan pembangunan. Kediri adalah salah satu kota yang menyelenggarakan pembangunan melalui suatu program pemberdayaan berbasis masyarakat. Program Pemberdayaan Masyarakat ingin membangun lingkungan dari level pemerintahan paling bawah (Rukun Tetangga).

Tujuan penelitian adalah terdeskripsikannya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, terdeskripsikannya gambaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, terdeskripsikannya gambaran faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, terujinya pengaruh derajat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, dan terujinya pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Penelitian menggunakan metode kuantitatif untuk menguji hubungan antar beberapa variabel. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ialah kuesioner. Kuesioner sebagai salah satu alat pengumpulan data.

Hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa derajat partisipasi masyarakat dan faktor internal tidak berkontribusi terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tosaren, Kota Kediri. Adanya dominasi kaum pria, latar belakang pendidikan, unsur keterpaksaan, pekerjaan, dan kurangnya sosialisasi program menyebabkan derajat partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Intensitas keterlibatan, pengetahuan, dan motivasi yang kurang dimiliki oleh masyarakat Tosaren juga mengakibatkan faktor internal tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Variabel bebas yang berkontribusi terhadap pelaksanaan program ialah faktor eksternal. Gaya kepemimpinan dan pola komunikasi menjadi pengaruh bagi masyarakat Tosaren terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Masyarakat Tosaren berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat karena adanya peran Ketua RT sebagai pemimpin dan terciptanya pola komunikasi yang mudah diterima oleh warga setempat.

Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan Daerah, Partisipasi Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat.



SUMMARY

Natalia Niken Ekawati, Master Program in Public Administration, Majoring in Regional Development Planning, Brawijaya University in Malang, "Influence of People Participation in the Implementation of Community Empowerment Program", Supervisor Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si, Co.Supervisor Dr. Irwan Noor, MA.

Government can organize regional development with the bottom-up approach by discussion (Musrenbang). Musrenbang as media people to express their aspirations to the government. Community Empowerment Program as one form of development musrenbang. Kediri is one of the cities which organizes development through a community-based empowerment program. Community Empowerment Program wants to build an environment from very bottom levels of government (RT).

The purpose of this study was describe people participation in the implementation of Community Empowerment Program, describe implementation of Community Development Program, describe internal and external factors affecting implementation of Community Empowerment Program, test the effect of the degree of people participation in the implementation of Community Empowerment Program, and test the effect of internal and external factors in the implementation of Community Empowerment Program.

The study uses quantitative methods to examine relationship between several variables. The main instruments used in the study was a questionnaire. The questionnaire as one means of data collection.

Results of research based on partial hypothesis test showed that the degree of people participation and internal factors don't contribute to the implementation of Community Empowerment Program in Tosaren subdistrict, Pesantren, Kediri City. Their male domination, educational background, the element of compulsion, employment, and lack of socialization program causes the degree of people participation didn't contribute to implementation of Community Empowerment Program. The intensity of involvement, knowledge, and motivation that are not owned by the people in Tosaren also lead to internal factors don't affect the implementation of Community Empowerment Program. Independent variables that contribute to the implementation of program is an external factors. Leadership style and communication patterns become effect to Tosaren communities in implementation of Community Empowerment Program. Community participate in the program because of their role of RT as a leader and create communication patterns whicheadily accepted by local residents.

Key Words : Regional Development Planning, People Participation, Community Empowerment Program



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)”.

Tesis ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik, pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca. Semoga tesis ini bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran.

Malang, April 2016

Penulis

**DAFTAR ISI****HALAMAN JUDUL**Hal.
i**HALAMAN PENGESAHAN**

ii

IDENTITAS PENGUJI

iii

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

iv

LEMBAR PERUNTUKAN

v

RIWAYAT HIDUP

vi

UCAPAN TERIMA KASIH

vii

RINGKASAN

viii

SUMMARY

ix

KATA PENGANTAR

x

DAFTAR ISI

xi

DAFTAR TABEL

xiv

DAFTAR GAMBAR

xv

DAFTAR LAMPIRAN

xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Perumusan Masalah

16

1.3 Tujuan Penelitian

16

1.4 Manfaat Penelitian

17

BAB II KERANGKA TEORI

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

18



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Indikator Pemberdayaan	34
4.1	Konsep, Variabel, dan Indikator Penelitian	64
4.2	Interpretasi Nilai r	73
4.3	Hasil Uji Validitas Item Penelitian	73
4.4	Reliability Statistics	74
4.5	Hasil Uji Linearitas	75
4.6	Hasil Uji Multikolinearitas	76
4.7	Hasil Uji Autokorelasi	77
4.8	Hasil Uji Heteroskedastisitas	78
4.9	Tingkat Hubungan Korelasi	81
4.10	Nilai Koefisien	82
5.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	86
5.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian Pokok	86
5.3	Frekuensi Responden Sesuai Jenis Kelamin	87



5.4	Frekuensi Responden Sesuai Umur	87
5.5	Frekuensi Responden Sesuai Pendidikan Terakhir	88
5.6	Frekuensi Responden Sesuai Mata Pencarian	88
5.7	Interpretasi Skor Item Penelitian	90
5.8	Analisis Deskriptif Variabel Derajat Partisipasi Masyarakat	90
5.9	Analisis Deskriptif Variabel Pelaksanaan PRODAMAS	92
5.10	Analisis Deskriptif Variabel Faktor Internal	93
5.11	Analisis Deskriptif Variabel Faktor Eksternal	95
5.12	Hasil Korelasi	98
5.13	Koefisien Determinasi	100
5.14	Uji Hipotesis Secara Bersama-sama	101
5.15	Uji Hipotesis Variabel Derajat Partisipasi Masyarakat	103
5.16	Uji Hipotesis Variabel Faktor Internal	104
5.17	Uji Hipotesis Variabel Faktor Eksternal	106

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Tangga Partisipasi <i>(ladder of Participation)</i>	43
3.1	Kerangka Konsep	59
3.2	Model Hipotesis	61
4.1	Diagram Jalur	81
5.1	Diagram Analisa Jalur	98
5.2	Model Hipotesis Pertama	101
5.3	Model Hipotesis Kedua	103
5.4	Model Hipotesis	104
5.5	Model Hipotesis	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan kajian terhadap kondisi demografis dan geografis pada wilayah masing-masing. Setiap wilayah mempunyai bentuk dan karakteristik yang berbeda. Perbedaan inilah yang patut menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur dan mengelola daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban agar daerahnya mengalami perubahan dan perkembangan. Daerah yang berubah dan berkembang tidak terlepas dari adanya pembangunan. “Pembangunan adalah usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya” (Siagian, 2003:5).

Pembangunan daerah menjadi suatu kewajiban dasar yang dijalankan oleh pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Tujuan dari pembangunan daerah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di pelbagai aspek kehidupan. Pembangunan daerah dapat dimengerti sebagai adanya perbaikan dan proses perkembangan.

Menurut Kartasasmita yang telah dikutip oleh Riyadi dan Bratakusumah (2003:4), perbaikan dalam pembangunan dapat dimengerti sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.



Sedangkan makna perkembangan dianggap “proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan” (Riyadi dan Bratakusumah, 2003:5).

Pembangunan daerah yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari munculnya sistem pemerintahan secara desentralisasi. Sistem desentralisasi dipahami sebagai “*decentralization* dimana unit-unit lokal ditetapkan dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu. Mereka dapat menjalankan penilaian, inisiatif dan pemerintahannya sendiri” (Muluk, 2009:11). Desentralisasi terbentuk sebagai akibat dari reformasi sistem administrasi pemerintahan Indonesia pada tahun 1998. Reformasi terjadi karena sistem sentralisasi yang diterapkan pada masa orde baru, ternyata mengakibatkan pelbagai fenomena keragaman budaya dan geografi yang terabaikan di Indonesia. Sebagian besar pemerintah daerah tidak dapat mengeksplorasi wilayahnya sendiri. Kondisi ini menyebabkan daerah-daerah di Indonesia menjadi sulit berkembang.

Pemerintah pusat telah menyusun dan menerapkan sistem otonomi daerah pasca reformasi. Pemerintah daerah berwenang untuk mengelola daerahnya sendiri melalui sistem otonomi daerah. “Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, maka di Indonesia telah terjadi perubahan keseimbangan tanggung jawab antara berbagai tingkatan (level) pada sistem pemerintahan di Indonesia” (Rustiadi, dkk, 2011:372).



Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri melalui penetapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kini telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan menganut prinsip otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Penerapan prinsip otonomi terdapat dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, maka pemerintahan negara sebagai pemegang kedaulatan dalam negara kesatuan berhak membuat suatu peraturan. Peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga harmonisasi dan keselarasan antara pembangunan nasional dan daerah, maupun pembangunan-pembangunan antara setiap daerah. Latar belakang tersebut menyebabkan terbentuk Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ruang lingkup sistem perencanaan pembangunan nasional adalah tata cara perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam periode jangka panjang, menengah, dan tahunan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



Pembangunan Nasional, Pasal 2, ayat (4), tujuan dari sistem perencanaan pembangunan meliputi :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Beberapa tujuan di atas menyebabkan pemerintah daerah selalu memperhatikan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai landasan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan adalah “menetapkan suatu tujuan dan memiliki langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut” (Tarigan, 2005:1).

Perencanaan menjadi panduan pemerintah agar pembangunan lebih terarah dan selaras dengan visi-misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan

jangka menengah dan panjang. Tjokroamidjojo (1989:49) berpendapat bahwa

“tidak semua perencanaan adalah suatu perencanaan pembangunan. Adanya usaha mencapai tujuan-tujuan pembangunan tertentu ini merupakan ciri-ciri dari suatu

perencanaan pembangunan”. Tujuan perencanaan pembangunan secara umum

adalah menjaga kondisi ekonomi-sosial masyarakat supaya tetap stabil.

Karakteristik dari perencanaan terdiri atas tiga hal, “*First, it must involve the future.*

Second, it must involve action. Third, there is an element of personal or

organizational identification or causation” (Henning dan Le Breton, 1961:7).

Proses perencanaan di Indonesia berdasarkan aspek normatif telah menganut lima pendekatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 6, yaitu: teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom up*. Perencanaan dengan pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah bagian dari proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye dalam rencana pembangunan jangka menengah. Sedangkan pendekatan *top-down* dan *bottom up* dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses *top-down* dan *bottom up* diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Pendekatan *bottom up* dapat diterapkan oleh pemerintah dengan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan atau disingkat Musrenbang merupakan sarana memperoleh informasi tentang aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan situasi dan perkembangan terkini. Musrenbang identik dengan diskusi





masyarakat di tingkat kelurahan sebagai level pemerintahan paling bawah.

Musrenbang selalu menjadi wadah bertemunya masyarakat untuk membahas permasalahan yang dihadapi dan membuat alternatif pilihan atas problem tersebut.

Usulan-usulan masyarakat dalam musrenbang akan ditindaklanjuti oleh level pemerintahan yang lebih tinggi. Pemerintah akan melakukan verifikasi dan mengkategorikan usulan-usulan masyarakat sesuai urusan dan alokasi anggaran.

Bentuk proses perencanaan dengan pendekatan *bottom up* dapat menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada pemerintah. Proses musrenbang terjadi pada setiap jenjang pemerintahan, mulai dari level kelurahan, kecamatan dan kota, maupun provinsi dan nasional. Suara masyarakat dapat memengaruhi rencana anggaran dan proyek-proyek pembangunan daerah. Keterlibatan masyarakat sangat diharapkan dalam musrenbang. Keterlibatan masyarakat dapat menjadi kesempatan bersama untuk menentukan masa depan dan memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Musrenbang dalam perkembangannya sudah tidak berjalan sesuai dengan arahan dan tujuan awal diselenggarakannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2008), ternyata belum ada keterlibatan masyarakat dalam musrenbang desa sampai musrenbang kecamatan untuk memutuskan prioritas kegiatan. Purnamasari menemukan adanya kecenderungan bahwa usulan yang diajukan merupakan hasil rumusan elite desa/kelurahan. Sehingga makna partisipasi masyarakat sendiri, masih jauh dari pengertian yang sesungguhnya. Menurut Isbandi yang dikutip oleh Friady (2013), “partisipasi masyarakat adalah



keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi”

Salah satu bentuk pengembangan dari musyawarah perencanaan pembangunan ialah Program Pemberdayaan Masyarakat. Kediri adalah salah satu kota yang menyelenggarakan musrenbang dalam bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat. Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan konsep pembangunan daerah dengan pendekatan *bottom up*. Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri terbentuk dari sebuah keinginan untuk membangun lingkungan dari level pemerintahan paling bawah yaitu wilayah Rukun Tetangga (RT) secara bersamaan.

Pemerintah Kota Kediri ingin merealisasikan usulan-usulan dari warga untuk membangun wilayah RT-nya yang sebelumnya tidak dapat direalisasikan melalui program-program pembangunan lainnya.

Program Pemberdayaan Masyarakat dijelaskan pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat dijelaskan bahwa

Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Prodamas adalah suatu program dari Pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.

Program pemberdayaan masyarakat telah berlangsung mulai bulan Maret 2015. Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan dana yang bersumber dari APBD mencapai

Rp 74 Milyar untuk membiayai pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Anggaran dana PRODAMAS dialokasikan bagi setiap RT se-Kota Kediri. Setiap

RT memperoleh dana sebesar Rp 50 Juta / per tahun. Tetapi ada tanggapan dimana

dana PRODAMAS “dinilai berpotensi terjadinya overlapping dengan kinerja

program SKPD Kota Kediri. Pasalnya, program primadona Walikota Kediri ini

mendapat anggaran tersendiri diluar anggaran SKPD” (adakitanews, 2014).

Program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan oleh Pemerintah

Kota Kediri memiliki niat dan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di tingkat RT. Sasaran pelaksanaan PRODAMAS yaitu mendukung

kegiatan masyarakat yang sudah berjalan secara rutin. Contoh kegiatan warga yang

dapat dimasukkan dalam rangka PRODAMAS antara lain: pengadaan peralatan

pelatihan untuk Kader PKK (misal pelatihan menjahit), pengadaan alat pendukung

kegiatan kepemudaan (misal pembelian peralatan bengkel untuk pelatihan anggota

Karang Taruna), dan pengadaan peralatan untuk kelompok keagamaan seperti

pembelian *soundsystem* untuk jamaah yasinan.

Masyarakat Kota Kediri memperoleh kesempatan luas dan sama dengan

warga lainnya untuk berperan aktif demi pembangunan daerahnya melalui Program

Pemberdayaan Masyarakat. Masyarakat Kota Kediri turut dilibatkan mulai alur

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan rebug warga sebagai tahapan

pengambilan keputusan tertinggi dalam PRODAMAS. Pemerintah Kota Kediri

sebenarnya sudah menerapkan musrenbang, tetapi masyarakat beranggapan bahwa

musrenbang seringkali tidak mampu menampung aspirasi dan usulan dari warga





serta menghabiskan waktu yang terlalu lama. Sedangkan masyarakat membutuhkan rencana pembangunan yang jelas dan cepat untuk direalisasikan.

Program Pemberdayaan Masyarakat memiliki beberapa aspek. “Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif” (Suhendra, 2006:75). *Moczydlowska* (2015:18) mengatakan bahwa “*empowerment is certainly a challenge to modern organizations*”. Tujuan dari pemberdayaan secara umum ialah “membangun individu yang mandiri dan kelompok yang solid, serasi dengan pendekatan dan penguatan kelompok, dan tidak terlepas dari *social setting* masyarakat yang akan diberdayakan” (Chalid, 2005:82).

Aktor utama yang bertanggung jawab atas Program Pemberdayaan Masyarakat adalah Pemerintah Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri wajib untuk “memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah disepakati bersama” (Suharto, 2009:98).

Aspek pokok yang perlu dipahami dan terkandung dalam program pemberdayaan masyarakat, yakni “masyarakat sasaran dan birokrasi pemerintahan terkait” (Agan, 2014:2). Banyak pembahasan dan kritikan yang dilontarkan tentang pemerintahan di Indonesia. Kritikan yang sering dilontarkan berkaitan dengan pola pikir birokrasi yang bertindak sebagai penguasa atas kesejahteraan rakyat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berada diposisi ‘bawah’. Padahal masyarakat adalah mitra pemerintah dan wajib dilayani. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat memunculkan sinergi antara masyarakat dan birokrasi.



Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan adalah masyarakat sasaran. Masyarakat Kota Kediri meragukan program tersebut dapat terwujud pada awal pelaksanaan PRODAMAS. Keraguan masyarakat disebabkan oleh pandangan terkait aspek anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat yang dialokasikan pada setiap RT yang ada di Kota Kediri. Sementara masyarakat sasaran adalah pihak yang paling dekat dengan hasil pembangunan. Bentuk pembangunan apapun yang disusun oleh pemerintah, pada akhirnya juga ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat menjadi esensi dasar pembangunan. Pemerintah memerlukan adanya partisipasi masyarakat supaya pembangunan dapat tercapai. Adanya partisipasi sebagai bentuk antusias dan tanggapan masyarakat secara kelompok maupun individu terhadap program yang diciptakan pemerintah.

Partisipasi mengandung berbagai makna. Menurut Widjaja (2012:36-37) partisipasi adalah “penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa”.

Pemerintah Kota Kediri telah menghadirkan PRODAMAS sebagai bahan stimulus masyarakat. Pemerintah ingin masyarakat turut berpartisipasi dalam rangka pembangunan Kota Kediri. Pemerintah berharap Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai program tunggal yang tercantum dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 dapat tercapai dan sekaligus bisa menjadi panutan bagi daerah sekitarnya.

Pemerintah Kota Kediri tampak belum mampu menstimulus masyarakat melalui PRODAMAS. Pemerintah Kota Kediri juga belum optimal untuk



menumbuhkan kesadaran berpartisipasi masyarakat antar wilayah secara seimbang.

Situasi ini diindikasikan dengan adanya kesenjangan informasi dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat antar wilayah RT di Kota Kediri. Padahal “Konsekuensi logis akhir dari sebuah proses pemberdayaan adalah masyarakat ‘berdaya’ dan dapat berperan serta dalam seluruh tahapan pembangunan” (Usman, 2004:53). “Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan suatu negara” (Suhendra, 2006:73). Partisipasi Warga Kota Kediri adalah kunci keberhasilan dari Program Pemberdayaan Masyarakat.

Keterlibatan manusia dianggap sebagai subjek pembangunan. Artinya “masyarakat harus kuat, maju dan mandiri sehingga memiliki kemauan, kemampuan, kesediaan, kesadaran, motivasi, kerjasama, prakarsa, wawasan yang kuat melekat pada diri anggota masyarakat terhadap pembangunan masa depan” (Adisasmita, 2006:36). “Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka” (Moeljarto, 1996:133).

Masyarakat tampak belum peka terhadap situasi dan masalah yang terjadi. Masyarakat hanya sekedar berpartisipasi secara fisik, bukan berupa sumbangan ide dan gagasan. Sementara kemampuan masyarakat berguna mewujudkan dan memengaruhi arah pelaksanaan PRODAMAS dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan penguasaan atas sumber-sumber hidup. Menurut *Percy-Okunlola* yang dikutip oleh Moeljarto (1996:134), bahwa



pemahaman tentang pemberdayaan dan partisipasi dapat dihubungkan seperti berikut :

What gives real meaning to (popular) participations is the collective effort by the people concerned to pool their efforts and whatever other resources they decide to pool together, to attain objectives they set for themselves. In this regard participation is viewed as an active process in which the participants take initiatives and action that is stimulated by their own thinking and deliberation and over which only involves the people in actions that have been thought out or designed by others and are controlled by others is unacceptable.

Pemerintah perlu memandang keterlibatan masyarakat bukan sebagai suatu pendekatan, tetapi suatu tujuan pembangunan. Apabila pemerintah melihat keterlibatan masyarakat sebagai pendekatan, maka partisipasi masyarakat hanya dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan apabila keterlibatan masyarakat yang dilihat sebagai tujuan, maka pemerintah dapat menganalisis partisipasi masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat yang dipahami sebagai tujuan pembangunan tidak menjamin keberhasilan suatu program. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah “indikator dan pengukuran yang digunakan dalam telaah partisipasi masyarakat tidak mampu menunjukkan sosok partisipasi itu sendiri. Keadaan ini menyebabkan partisipasi masyarakat diterjemahkan hanya sebagai kontribusi tenaga dan finansial masyarakat dalam program pembangunan” (Rendy, 2011). Soetrisno (2004:233) juga menambahkan bahwa “belum adanya makna baru yang diberikan pada konsep partisipasi rakyat dalam pembangunan. Makna yang ada adalah makna yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu kemauan rakyat untuk mendukung pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah, baik dari segi dana maupun semangat”.



Pemerintah memerlukan indikator sebagai alat ukur derajat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mencakup “proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan manfaat pembangunan” (Muluk, 2007:51). Beberapa item yang menjadi tolok ukur kesadaran berpartisipasi yang dipaparkan oleh Muluk (2007:194) yaitu :

1. Derajat keinginan masyarakat untuk terlibat dalam memengaruhi pembuatan keputusan;
2. Kebutuhan masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan kontrol atas pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Kesadaran masyarakat untuk berkorban menyediakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi yang memadai untuk memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kota Kediri dapat memakai tolok ukur tersebut untuk menganalisa derajat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan PRODAMAS. Derajat partisipasi masyarakat pada level tertinggi dapat menjadi suatu patokan keberhasilan pemerintah dalam rencana pembangunan melalui program yang diusung.

Mayoritas derajat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berada pada anak tangga kelima, yaitu penentraman atau *placation*, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tagu (2012), Hakim (2014), dan Suroso (2014). Masyarakat turut menghadiri musyawarah / rembug warga dan diperkenankan menyampaikan usulan sesuai kebutuhan warga. Kehadiran warga seringkali hanya dijadikan formalitas agar pemerintah dinilai telah menerapkan proses perencanaan dengan pendekatan *bottom up*. Usulan-usulan masyarakat yang telah disampaikan, ternyata masih didiskusikan ulang oleh musrenbang pada level pemerintahan yang lebih tinggi. Masyarakat tidak memperoleh jaminan kepastian

terkait keputusan atas usulan-usulan tersebut. Pemerintah Kota Kediri sangatlah penting untuk mengetahui letak derajat partisipasi masyarakat Kota Kediri dalam pelaksanaan PRODAMAS. Proses pembangunan daerah secara partisipatif adalah “proses pembangunan yang didasarkan pada pertemuan antara dua falsafah pembangunan, *top-down* dan *bottom up*” (Soetrisno, 2004:225).

Partisipasi masyarakat juga dapat muncul karena pelbagai pengaruh internal dan eksternal. Proses pemberdayaan memerlukan tindakan aktif subjek untuk mengakui daya yang dimiliki objek dengan memberi kesempatan untuk mengembangkan diri sebelumnya. Objek akan beralih-fungsi menjadi subjek yang baru. “Karena proses tersebut didukung oleh faktor atau stimulus dari luar, maka subjek disebut sebagai faktor eksternal. Selain itu, faktor internal yang mementingkan tindakan aktif objek atau masyarakat miskin sendiri juga merupakan prasyarat penting yang dapat mendukung proses pemberdayaan yang efektif” (Moeljarto, 1996:137).

Partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor internal meliputi: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan mata pencaharian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suroso (2014) dan Hakim (2014).

Sementara Hardhinawati (2012), Adnan (2013), Ariyani (2014), dan Sukertha (2015) menghasilkan temuan bahwa komunikasi sebagai salah satu unsur pengaruh eksternal yang turut menjadi faktor pendukung partisipasi masyarakat. Komunikasi yang baik dapat menciptakan jaringan kerja antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain. Sehingga pelaksanaan suatu program dapat tercapai.





Komunikasi dapat menjadi kendala program pemberdayaan masyarakat.

“Kehidupan masyarakat yang terasing serta kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi. Kondisi ini tentunya akan menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain yang mungkin akan memperkaya kehidupan sosial budayanya sendiri” (Nasirin, 2010:111-112).

Kelompok masyarakat membutuhkan figur seorang pemimpin demi pencapaian keberhasilan suatu program. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solekan

(2011) dan Kuddy (2012), gaya kepemimpinan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Pemimpin yang lebih dikenal sebagai para tokoh masyarakat, sering dijadikan panutan hidup bermasyarakat dan penyelesaian

konflik. Muro dan Namusonge (2015:109) juga menambahkan “*involvement of community in public development projects has been observed to be dependent on*

and motivated by leadership style which observes principles of good governance in the study areas”. Sementara Khwaja (2004) menemukan hasil lain bahwa secara

teori dan empiris, partisipasi masyarakat belum tentu hal yang baik dalam proyek pembangunan.

Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam upaya perencanaan

pembangunan Kota Kediri. Masyarakat Kota Kediri menjadi sorotan utama sebagai pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat. PRODAMAS merupakan program andalan yang mampu membawa Kota Kediri lebih sejahtera dan berkeadilan.

Pemerintah Kota Kediri tidak dapat memahami makna partisipasi masyarakat hanya sebagai bentuk sumbangan tenaga dan finansial, serta syarat terpenuhinya daftar kehadiran warga dalam kegiatan rembung warga. Pemerintah Kota Kediri

mempertanyakan apakah masyarakat membutuhkan analisa yang tepat untuk menelaah partisipasi masyarakat setempat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).**

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah derajat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) ?
3. Bagaimanakah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) ?
4. Sejauh manakah pengaruh derajat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) ?
5. Sejauh manakah pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Terdeskripsikannya derajat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).
2. Terdeskripsikannya pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).





3. Terdeskripsikannya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).
4. Terujinya pengaruh derajat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).
5. Terujinya pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu administrasi publik dan minat perencanaan pembangunan daerah secara khusus, tentang perencanaan pembangunan berorientasi masyarakat melalui program pemberdayaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi Pemerintah Kota Kediri sebagai bahan pertimbangan dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam menyambut dan melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), khususnya bagi Perangkat Desa/Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri beserta tim PPTK dan Pendamping.



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah salah satu aspek teori yang penting bagi peneliti. Supaya peneliti memperoleh informasi tentang partisipasi masyarakat dalam mengelola dan merencanakan pembangunan tiap daerah berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada. Pertama, tesis yang disusun oleh Hakim (2014) berjudul *Partisipasi Masyarakat Dalam Formulasi Perencanaan Program Peningkatan Populasi dan Performance Sapi Madura Melalui Inseminasi Buatan*. Menurut Hakim, tahap proses perencanaan program inseminasi buatan terhadap sapi Madura adalah hasil musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Aktor yang terlibat dalam program inseminasi buatan yaitu : pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator pelaksanaan program; masyarakat berperan saat formulasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga pemerintah mengetahui kebutuhan yang diinginkan masyarakat, dan swasta sebagai investor yang mampu memberi bantuan finansial dalam program inseminasi buatan.

Dalam program inseminasi buatan, aktor yang paling terlibat adalah Masyarakat Madura. Mereka mengikuti proses perencanaan mulai musrenbang desa/kelurahan sampai tingkat kecamatan. Tetapi pada level berikutnya, masyarakat tidak terlalu dilibatkan. Sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui,



apsirasinya dijamin terwujud. Karena pemerintah lebih menyesuaikan pada skala prioritas program dan kegiatan.

Hakim juga menyebutkan faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program inseminasi buatan pada sapi Madura. Berdasarkan faktor pendukung, maka yang lebih berpartisipasi adalah Masyarakat Madura dengan jenis kelamin (pria), usia (36-55 tahun), tingkat pendidikan (SMA atau sarjana), tingkat penghasilan masyarakat yang rendah, mata pencaharian sebagai peternak, jabatan dalam kelompok ternak, status sosial masyarakat, dan stakeholders. Sedangkan faktor penghambat yang memengaruhi partisipasi Masyarakat Madura adalah tingkat pendidikan rendah (SMP ke bawah), tingkat penghasilan masyarakat yang tinggi, sebagian masyarakat menganggap beternak sapi sebagai pekerjaan sampingan, sebagian masyarakat belum bisa menerima kegiatan inseminasi buatan, dan pola pikir masyarakat sebagai pedagang, yang lebih mementingkan cara cepat mencari keuntungan dengan memelihara sapi.

Kedua, hasil disertasi Sopanah (2013) berjudul *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penganggaran Daerah Berbasis Kearifan Lokal*. Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat Suku Tengger, Bromo, Jawa Timur. Hasilnya adalah Pemda Kabupaten Probolinggo sudah melakukan tahapan-tahapan perencanaan sesuai peraturan undang-undang. Masyarakat juga turut berpartisipasi dalam proses penganggaran daerah, kecuali pada tahap pengesahan. Selain ada musrenbangdes secara formal, masyarakat juga mengadakan Rembug Desa Tengger di Desa Ngadisari sebagai bentuk partisipasi informal.

Berdasarkan temuan Sopanah, ternyata pelaksanaan Rembug Desa Tengger dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi penuh menurut teori partisipasi Arnstein (1971) dan Moynihan (2003). Sehingga temuan tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Mekanisme musrenbangdes di Desa Ngadisari juga memiliki perbedaan lain. Seperti melakukan Rembug Warga di bulan Desember dengan menentukan tanggal baik dahulu. Rembug Warga Desa sama halnya dengan musrenbang yang biasanya dilakukan pada bulan Januari. Tetapi rembug warga mempunyai mekanisme yang bukan hanya formalitas. Semua warga desa diundang dan terlibat dalam musyawarah tersebut dengan menganut nilai kearifan lokal Suku Tengger, antara lain: sikap ramah tamah, kepatuhan, guyub rukun, tolong menolong, gotong royong, dan kejujuran.

Ketiga, hasil tesis Tagu (2012) berjudul *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa* di Desa Bentengtawa, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada, NTT. Hasilnya adalah masyarakat sudah terlibat dalam kegiatan penggalian gagasan dan identifikasi masalah. Sehingga planner lebih mudah memahami masalah dan kebutuhan masyarakat, yang selanjutnya diserahkan pada forum perencanaan pembangunan di tingkat desa. Tetapi masyarakat belum dilibatkan pada tahap pembahasan dan penentuan skala prioritas. Akibatnya muncul pandangan berbeda dari masyarakat, karena lebih didominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan derajat partisipasi masyarakat, maka keterlibatan warga sudah dikategorikan pada anak tangga tokenism (tanda partisipasi). Artinya, warga berhak



menyampaikan pendapat meskipun tidak terlibat langsung saat pengambilan keputusan. Tagu juga memaparkan faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam menyusun RPJM Desa, yaitu: adanya dukungan dari pemerintah kecamatan; adanya keterbukaan dan komitmen pemerintah tingkat desa; dan faktor kepemimpinan (kepala desa) yang selalu mengedepankan pendekatan persuasif terhadap semua komponen. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu: tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah; tingkat ekonomi masyarakat yang rendah; rendahnya koordinasi antar birokrat di bidang perencanaan pada tingkat kabupaten; dan kurangnya partisipasi perempuan dalam menyusun rencana yang khususnya ditujukan pada kegiatan kaum perempuan.

Keempat, hasil tesis Suroso (2014) berjudul *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan* di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Derajat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Banjaran berada pada derajat pertanda partisipasi. Artinya, masyarakat tetap didengar dan diperkenankan berpendapat. Tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa usulannya akan dipertimbangkan oleh pemerintah. Tingkat keaktifan partisipasi masyarakat juga relatif rendah. Karena masyarakat kurang memberikan informasi, usulan, dan pasif terhadap peserta musrenbang yang memberikan masukan. Berdasarkan hasil uji chi-square terhadap faktor internal dan eksternal, maka usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, komunikasi, dan kepemimpinan memiliki hubungan dengan keaktifan berpartisipasi masyarakat dalam musrenbangdes di Desa Banjaran.





Kelima, hasil penelitian Solekan (2011) berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa* yang dilakukan di Desa Gunungrejo, Kec.Singosari, Kab.Malang menunjukkan bahwa berdasarkan *ladder of participation* partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaan ADD masih terletak pada anak tangga ke-4 yaitu konsultasi. Hal ini dibuktikan dengan perencanaan pengelolaan ADD yang tidak mencerminkan prinsip partisipatif, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Terbatasnya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pengelolaan ADD. Karena banyak alokasi dana desa dipakai untuk biaya operasional perangkat desa, dan organisasi masyarakat. Daripada untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi. Kemudian lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan ADD. Karena adanya asumsi bahwa partisipasi tersebut diwakili oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Padahal BPD bukan perwakilan masyarakat karena keanggotaannya tidak dipilih oleh masyarakat, menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Selain itu, adanya faktor-faktor tertentu turut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD. Solekan membagi menjadi dua faktor yakni faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD ternyata dipengaruhi budaya gotong royong dan adanya peran tokoh masyarakat atau pemimpin masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam mengelola ADD meliputi : rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (80% masyarakat Desa Gunungrejo berpendidikan sekolah dasar), terbatasnya anggaran penyelenggaraan Musrenbangdes, peraturan dan kebijakan pemerintah Kab.Malang



dalam pengelolaan ADD kurang mengakomodir partisipasi masyarakat, serta kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD.

Keenam, hasil penelitian Kuddy (2012) berjudul *Gaya Kepemimpinan, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Melalui hasil penelitian tersebut,

maka ada dua hasil temuan yang dipakai peneliti dalam penelitian nantinya, yakni gaya kepemimpinan dan partisipasi masyarakat. Ternyata semakin tinggi penerapan gaya kepemimpinan, maka semakin meningkat kinerja anggota. Hal ini mengindikasikan bahwa gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan hubungan antar manusia memberi efek positif terhadap peningkatan kinerja anggota. Kemudian, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBD, maka semakin meningkat fungsi pengawasan yang dilakukan APBD.

Ketujuh, hasil penelitian Sukertha (2015) berjudul *Pola Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat Desa Adat dalam Implementasi Tri Hita Karana Pada Pelestarian Budaya Lokal di Daerah Kawasan Wisata*. Ternyata pola komunikasi yang tercipta didominasi secara bottom up dan top down. Pada umumnya informasi diperoleh dari para pemuka masyarakat (top down), tetapi warga biasa juga diperbolehkan menyampaikan informasi (bottom up). Komunikasi yang terjadi secara bottom up menunjukkan adanya peran masyarakat desa secara partisipatif.



Kedelapan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardhinawati (2012), dan Ariyani (2014) masing-masing memberikan temuan yang sama, bahwa variabel komunikasi berpengaruh secara bersama-sama dan parsial terhadap pelaksanaan suatu program. Supaya pelaksanaan program dapat terlaksana dengan baik, maka komunikasi perlu disampaikan secara tepat, jelas, akurat, dan konsisten. Namun penelitian lain yang dilakukan Adnan (2013) menemukan bahwa komunikasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap pelaksanaan suatu program. Hal ini dipengaruhi oleh keterlambatan penyampaian informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada masing-masing unit kerja. Kemudian pengaruh jarak dan letak antar wilayah unit kerja yang kurang terjangkau. Meskipun teknologi informasi sudah semakin canggih, tetapi kenyataannya masih banyak anomali yang ditemui di lokasi penelitian tersebut.

Kesembilan, hasil penelitian dari Muro dan Namusonge (2015) berjudul *governance Factors Affecting Community Participation In Public Development Projects In Meru District In Arusha In Tanzania*. Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi pemerintahan sebagai variabel bebas dan partisipasi masyarakat sebagai variabel terikat. Sebuah organisasi pemerintahan dapat disebut *good governance*, apabila mereka dapat bersikap akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Sehingga muncul beberapa hasil temuan yakni :

- 1) Partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan dipengaruhi dengan bagaimana mereka diatur dan dipimpin. Peneliti mengindikasikan 85% pemimpin dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Temuan ini dinilai mampu memobilisasi masyarakat untuk turut serta dalam proyek



pembangunan. Sehingga peneliti menyadari proses yang terlibat dalam pemilihan kepemimpinan memiliki hubungan langsung dengan partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan.

2) 86,6% menunjukkan masyarakat sering berpartisipasi. Hal ini dipengaruhi oleh uang saku yang diberikan sebagai bentuk kontribusi mereka. Mengingat bahwa masyarakat mempunyai keterbatasan waktu dan hambatan pekerjaan. Proses partisipasi masyarakat yang terjadi di sana, diwujudkan melalui pertemuan dari dusun ke tingkat desa.

3) Keterlibatan masyarakat bergantung dan dimotivasi oleh gaya pemimpin yang mematuhi asas *good governance*. Terbukti dengan 85% responden yang dipengaruhi untuk berpartisipasi disebabkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan kerjasama. Oleh karena itu, peneliti menilai efektivitas pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap hubungan partisipasi dan kontribusi dalam proyek pembangunan masyarakat.

Peneliti juga menemukan adanya tantangan yang memengaruhi pelaksanaan proyek pembangunan di Kab.Meru, yaitu: beberapa pemimpin tidak transparan pada masyarakat terkait pemerasan jumlah pendapatan dari pemerintahan atau kontribusi masyarakat. Mayoritas responden menilai adanya tindakan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya. Selain itu responden menilai bahwa adanya kelemahan administratif dan keterampilan manajemen proyek yang berdampak buruk terhadap partisipasi masyarakat dan keberlanjutan proyek. Sehingga



pemimpin perlu mengusulkan syarat pelatihan sebelum memulai proyek pembangunan apapun.

Terakhir, hasil penelitian dari Khwaja (2004) berjudul *Is Increasing Community Participation Always A Good Thing?*, yang memberi pandangan lain tentang partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan. Penelitian ini membahas dampak partisipasi masyarakat terhadap hasil proyek pembangunan yang terjadi di Pakistan Utara. Peneliti membuat dua kelompok yang terlibat dalam proyek pembangunan, yaitu: partisipasi dan pihak eksternal. Peneliti memakai data empiris untuk mengilustrasikan efek partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proyek. Data diperoleh melalui sebuah rangkaian masyarakat, individu, dan tahap proyek yang dilakukan peneliti pada tahun 1999. Hasil temuan yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa *“community participation in decisions that require community investment should improve outcomes, but worsen them for community participation in decisions that require greater investment by the external agency”* (Khwaja, 2004:433-434).

2.2 Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan terdiri dari dua unsur pengertian. Pertama, Administrasi diartikan sebagai “keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Siagian, 2001:4). Kemudian administrasi dipahami sebagai “keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan



yang telah ditentukan sebelumnya” (Siagian, 2003:2). Secara filosofis Hodgkinson (1978:3) menyebutkan esensi dari administrasi ialah “*the process of correct thinking and the process of valuing: rationality, or logic, and values*”. Sementara Thompson yang dikutip oleh Hodgkinson (1978:3) menyusun administrasi “*as rationality applied to social relations and simultaneously as an artificial system and therefore always contentious*”.

Unsur kedua yaitu pembangunan yang diartikan “rangkaiannya usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*)” (Siagian, 2001:4). Hal sama disampaikan Tjokrowinoto yang dikutip oleh Suryono (2004:21) bahwa pembangunan memiliki beberapa makna antara lain :

1. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
3. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
4. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep *transendental*, sebagai *metadisciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmentalism*.
5. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.
6. Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific* dan *time specific*.

2.3 Perencanaan Pembangunan



2.3.1 Gambaran Umum Perencanaan Pembangunan

Dalam setiap pembangunan daerah dibutuhkan suatu perencanaan. Perencanaan mempunyai berbagai macam pengertian. Menurut Rode dan De Smit yang dikutip oleh Syafrudin (1993:3), perencanaan diartikan sebagai berikut :

- Perencanaan adalah suatu proses integral dalam mempersiapkan dan merumuskan pengambilan keputusan-keputusan di kemudian hari.
- Perencanaan adalah merancang suatu hari depan yang diinginkan, serta merancang cara-cara yang efektif, yang melalui hal-hal tersebut bisa dicapai hari depan tersebut di atas.
- Perencanaan mencakup perumusan tujuan-tujuan tertentu serta mencakup langkah-langkah yang harus diambil berdasarkan musyawarah dengan pihak pimpinan yang bersangkutan.

Secara luas, perencanaan merupakan “suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu” (Tjokroamidjojo, 1987:12). Hal senada diungkapkan George R. Terry yang dikutip oleh Riyadi dan Bratakusumah (2003:2), “*planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result*”.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan dianggap sebagai “suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif” (Tjokroamidjojo, 1987:12). Namun terdapat dua situasi yang patut diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yaitu :

1. Tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya;



2. Kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda, misalkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya sedangkan daerah lain mengalami penurunan. Inilah yang menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah (Kuncoro, 2004:47).

Selain itu hasil dari perencanaan pembangunan dapat dipahami secara berbeda sesuai asal sumber daya. Menurut Soekartawi (1990:21-22) sumber daya tersebut digolongkan menjadi “pemanfaatan sumber daya yang tanpa adanya campur tangan pemerintah atau dikenal dengan istilah *laissez-faire* dan pemanfaatan sumber daya dengan adanya campur tangan pemerintah yang dikenal dengan istilah *intervention*”.

2.3.2 Proses Perencanaan Pembangunan

Sebagai bagian dari pembangunan, perencanaan adalah “proses menetapkan secara garis besar apa yang perlu dilakukan dan metode yang digunakan untuk melakukannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi organisasi” menurut Gulick yang dikutip oleh Keban (2008:44). Kegiatan perencanaan bukan hanya sekedar menyusun suatu rencana. Tetapi proses perencanaan mempunyai alur atau tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tjokroamidjojo (1987:57-60) menjelaskan tahap-tahap proses perencanaan sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana ini terdiri dari unsur-unsur:
 - i. Tinjauan keadaan.
 - ii. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana.
 - iii. Penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut.
 - iv. Identifikasi kebijaksanaan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana.
 - v. Tahap persetujuan rencana.
- b) Penyusunan program rencana



- c) Pelaksanaan rencana
- d) Pengawasan atas pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk:
 - i. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya.
 - ii. Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya.
 - iii. Dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.
- e) Evaluasi.

Syafrudin (1993:49-50) juga memaparkan urutan proses perencanaan pembangunan daerah secara rinci antara lain :

1. Memperoleh data dan informasi mengenai daerah dan penduduk.
2. Analisa terhadap kondisi, kebutuhan dan potensi pembangunan yang ada di daerah.
3. Menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.
4. Merumuskan pola dasar pembangunan daerah untuk memenuhi tujuan jangka panjang.
5. Merumuskan beberapa pilihan strategis rencana pembangunan daerah untuk jangka menengah.
6. Mengikuti pilihan-pilihan strategis dan memilih/menetapkan strategi yang optimum.
7. Merumuskan rencana dan anggaran tahunan.
8. Memperoleh persetujuan dan pengesahan atas rencana dan anggaran tahunan.
9. Melaksanakan rencana/program tahunan.
10. Melakukan pemantauan (monitoring).
11. Melakukan evaluasi.
12. Memeroleh dan menyediakan umpan balik.

2.3.3 Tujuan dan Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan

Setiap negara pasti mempunyai tujuan untuk mengembangkan negaranya.

Bagi negara-negara berkembang diperlukan perencanaan pembangunan agar negara dapat melaksanakan rencana sesuai fokus dari tujuan pembangunan.

Negara yang memiliki usaha mencapai tujuan pembangunan tertentu, dianggap sebagai ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo (1987:49-52) beberapa ciri dari perencanaan pembangunan antara lain:



- a) Menunjukkan usaha yang mencerminkan rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady social economic growth*).
- b) Menunjukkan usaha yang mencerminkan rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
- c) Mengadakan perubahan struktur ekonomi.
- d) Memberikan perluasan kesempatan kerja.
- e) Melakukan usaha dalam rangka pemerataan pembangunan.
- f) Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
- g) Melakukan pembangunan secara bertahap berdasarkan kemampuan nasional.
- h) Menjaga stabilitas ekonomi.
- i) Menyantumkan tujuan pembangunan dengan hal-hal yang ideal atau fundamental dan bersifat jangka panjang.

2.3.4 Unsur-unsur dalam Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan terdapat berbagai unsur-unsur pokok. Secara umum Tjokroamidjojo (1987:62-65) menjelaskan unsur-unsur pokok yang terdapat dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering disebut sebagai tujuan, arah, dan prioritas-prioritas pembangunan.
- b) Adanya kerangka rencana yang sering disebut sebagai kerangka makro rencana.
- c) Perkiraan sumber-sumber pembangunan.
- d) Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten.
- e) Program investasi yang dilakukan secara sektoral.
- f) Administrasi pembangunan.

2.4 Pemberdayaan

2.4.1 Konsep dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah “upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat



melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan” (Zubaedi, 2007:41-42). Papilaya (2001:1) menilai pemberdayaan merupakan “upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”.

“Pemberdayaan merupakan upaya untuk menguatkan diri dari dalam terhadap segala bentuk penindasan” (Widiastuti, 2015:13). Istilah pemberdayaan sering dipakai dalam bahasa sehari-hari dan selalu menjadi kunci pembangunan Indonesia.

Mardikanto dan Soebiato (2013:26) mengutip pendapat Robbins, Chatterjee, & Canda bahwa “*empowerment – process by which individuals and groups gain power, access to resources and control over their own lives*”. Nasirin (2010:98)

menilai “pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pembangunan eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Sementara Jamasy (2004:99) mengartikan pemberdayaan sebagai “proses kerja sama antara pihak yang memberdayakan dan pihak yang diberdayakan”.

Pihak-pihak yang umumnya terlibat dalam pemberdayaan masyarakat antara lain pemerintah, swasta, dan masyarakat. Menurut pemerintah, pemberdayaan merupakan “usaha mendorong masyarakat untuk bisa hidup mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan ukuran-ukuran fisik dan non fisik dalam kehidupan masyarakat” (Sa’adah, 2015:38). Bagi swasta, pemberdayaan dimaknai sebagai “usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ingin sejahtera dengan ukuran mutlak dan relatif, sehingga terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan” (Sa’adah, 2015:39). Namun



masyarakat sebagai LSM melihat “pemberdayaan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan riilnya, dengan usaha dan kemampuan masyarakat sendiri, melalui indikator ekonomi, sosial dan budaya” (Sa’adah, 2015:39).

Konsep pemberdayaan masyarakat menjadi pilihan alternatif pembangunan. Pemberdayaan masyarakat “adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat” (Suhendra, 2006:75). Sehingga pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk “memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka” (Sa’adah, 2015:39). Selain itu bentuk dari “demokratisasi, kesetaraan masyarakat, kebebasan berbicara, kebebasan berkeaktifitas, hak untuk merencanakan, hak untuk mengelola asset lokal, hak untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan, dan hak untuk menikmati jerih payah hasil pembangunan” (Suhendra, 2006:85), turut menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pemberdayaan masyarakat.

Konsep pemberdayaan dalam dunia pembangunan masyarakat dapat dipahami dari berbagai makna, seperti pendapat Chamsyah yang dikutip oleh Nasirin (2010:98-99) yaitu :

1. Adanya partisipasi seluruh sasaran pelayanan dan komunitas sekitarnya serta masyarakat umumnya;
2. Adanya pendelegasian wewenang kepada daerah dalam menyusun rencana, melaksanakan, dan mengendalikan program pembangunan kesejahteraan sosial;
3. Adanya peningkatan kemampuan sasaran pelayanan;

4. Aktualisasi peran-peran kelembagaan sosial masyarakat dan swasta dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial bersama-sama pemerintah.

Sehingga diperoleh kesimpulan atas tujuan akhir dari pemberdayaan ialah “memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan” (Nasirin, 2010:105). Menurut Nixon yang dikutip oleh Erstad (1997:326), ada lima strategi pemberdayaan yang dapat dipakai seseorang untuk mencapai tujuan, yaitu:

- 1) *Establishing a vision;*
- 2) *Prioritizing and acting only where most impact is possible;*
- 3) *Developing strong relationships with colleagues;*
- 4) *Expanding networks;*
- 5) *Using internal and external support groups.*

Untuk memudahkan pencapaian tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui indikator-indikator pemberdayaannya terlebih dulu yaitu :

Tabel 2.1 Indikator Pemberdayaan

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
Kekuasaan di dalam meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya - Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara - Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan diri dan kebahagiaan - Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara - Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain - Keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Assertiveness dan otonomi - Keinginan untuk menghadapi subordinasi jender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengecualian politik - Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya,



	dan masyarakat		hukum, dan politik
<p>Kekuasaan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kemampuan individu untuk berubah • Meningkatnya kesempatan untuk memperoleh akses 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses terhadap pelayanan keuangan makro - Akses terhadap pendapatan - Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga - Akses terhadap pasar - Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan, termasuk kemelekan huruf - Status kesehatan dan gizi - Kesadaran mengenal dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi - Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah - Pengetahuan mengenai proses hukum, politik, dan kebudayaan - Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan
<p>Kekuasaan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro • Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya - Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya - Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga - Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana - Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat - Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik

	<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan individu menghadapi diskriminasi akses terhadap sumber dan pasar 		
<p>Kekuasaan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro 	<ul style="list-style-type: none"> - Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern - Mampu memberi gaji terhadap orang lain - Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi jender pada konteks ekonomi makro 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga - Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis - Tindakan bersama untuk membela orang lain - menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat - Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi jender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro

Sumber: Suharto (2006)

2.4.2 Unsur-unsur dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat mempunyai unsur utama yaitu “pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat” (Soetomo, 2011:88). Dua





unsur tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Karena masyarakat yang mendapat wewenang atas suatu tugas tetapi belum memiliki kapasitas, maka mereka tidak dapat memberi hasil yang optimal. Agar masyarakat dapat mencakup dua unsur tersebut. Maka masyarakat perlu diarahkan melalui proses pemberdayaan.

Masyarakat yang berdaya cenderung mampu untuk turut serta dan mengawasi jalannya pembangunan. Suhendra (2006:86-87) memaparkan beberapa unsur-unsur pemberdayaan masyarakat, antara lain :

1. Kemauan politik yang mendukung.
2. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh.
3. Motivasi.
4. Potensi masyarakat.
5. Peluang yang tersedia.
6. Kerelaan mengalihkan wewenang.
7. Perlindungan.
8. Awariness (kesadaran).

Supaya pemberdayaan masyarakat dapat berjalan, maka dibutuhkan suatu bentuk modal sosial. Modal sosial “merupakan hubungan-hubungan antara manusia, orang melakukan apa yang dilakukan terhadap sesamanya karena adanya kewajiban sosial dan timbal balik, solidaritas sosial, dan komunitas” (Sofia, 2015:92). Dengan kata lain, modal sosial sebagai perekat antar elemen masyarakat. Oleh karena itu, suatu pemberdayaan akan berhasil jika dapat memperkuat masyarakat madani, yaitu “struktur-struktur formal maupun semi-formal yang dibentuk masyarakat secara sukarela, dengan inisiatif mereka sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari program atau arahan tertentu dari pemerintah” (Ife dan Tesoriero, 2008:35).



Dimensi pemberdayaan terdiri atas tiga hal yakni kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Menurut Suharto (2006:63), tiga dimensi tersebut merujuk pada,

- (a) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar;
- (b) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna, dan mampu mengendalikan diri dan orang lain;
- (c) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Usman juga menambahkan bahwa ada tiga aspek lain yang dikenal dalam proses pemberdayaan yaitu asistensi, fasilitasi, dan promosi. “Apabila sejumlah kemampuan sudah dimiliki oleh kelompok yang dibina, maka bentuk yang lazim dilakukan adalah dengan *assistance* dan *facilitation*. Apabila masyarakat binaan masih dikategorikan ke dalam bentuk masyarakat yang berkemampuan rendah, maka alternatif yang perlu dikembangkan adalah *promotion*” (Usman, 2001:21-22).

Dalam karangan Usman yang lainnya, juga turut disertakan unsur-unsur terkait pemberdayaan sebagai upaya yang diprioritaskan dalam pembangunan. Tiga unsur tersebut mencakup:

1. Bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan dasar;
2. Aspirasi masyarakat daerah sendiri, terutama yang terefleksi pada prioritas program-program pembangunan daerah;
3. Keterkaitan antar daerah dalam tata perekonomian dan politik (Usman, 2004:12).

2.4.3 Hubungan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan



“Many community development practitioners are already utilizing empowerment approaches. However, it is important to be clear on the distinction between connecting with empowerment theory and the frequent useages of the term that are more colloquial” (Christens, 2012:541). Pada dasarnya pemberdayaan

“merupakan serangkaian aktivitas untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan daya dari suatu kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang kurang berdaya” (Soleh, 2014:6). Senada dengan Ife (1995:56) *“however one looks at empowerment it is inevitably about power; giving power to individuals or groups, allowing them to take power into their own hands, redistributing power from the ‘haves’ to the ‘have nots’, and so on”* Dalam berbagai hal pendekatan ini dapat dilihat sebagai

operasionalisasi dari perspektif atau paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Soetomo (2011:69) mengartikannya sebagai “sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya”.

“Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai kemampuannya” (Sumodiningrat, 1997:4). Ada sebuah keharusan untuk memulai pembangunan dengan melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut juga merupakan “upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki” (Sumodiningrat, 1997:4). Oleh karena itu, sulit memisahkan konsep pemberdayaan masyarakat dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada



rakyat. Pemikiran ini akhirnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan pelaku utama pembangunan.

Tjokrowinoto yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato (2013:18) telah mengungkapkan ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat antara lain :

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber-sumber yang ada di sekitar mereka.
3. Toleransi terhadap variasi lokal.
4. Menerapkan proses *social learning* antara birokrasi dan komunitas, mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi.
5. Membentuk jaringan kerja antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, serta satuan organisasi lain untuk menjaga keseimbangan struktural secara vertikal dan horisontal.

Dasar interpretasinya adalah manusia sebagai sasaran pokok dan sumber strategis.

Sehingga pembangunan juga terdiri atas usaha meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang menimbulkan dampak pada akhirnya. Menurut Zubaedi (2007:71) “pembangunan masyarakat harus selalu mencoba memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan agar setiap orang dalam masyarakat bisa terlibat aktif dalam proses dan kegiatan masyarakat”. Meskipun dengan cara berbeda-beda karena masyarakat memiliki keahlian dan keinginan masing-masing. Tetapi pada intinya semua dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga “semua bentuk partisipasi perlu didorong dan dilihat sebagai sesuatu yang berharga” (Zubaedi, 2007:72).

2.5 Partisipasi Masyarakat

2.5.1 Definisi Partisipasi

Kata partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; atau peran serta. Adisasmita (2006:34) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai “keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan”. Partisipasi menurut Tjokroamidjojo (1987:207) “adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan secara berkeadilan”. Sedangkan FAO (1989b) yang dikutip oleh Mikkelsen (2003:64) membagi partisipasi menjadi enam pengertian yaitu :

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
5. Partisipasi adalah pementapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Secara normatif, berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah “adanya keikutsertaan masyarakat untuk mengkomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan”. Sisk (2002:189) menilai “partisipasi masyarakat penting bagi sebuah pemerintahan yang baik dalam upayanya





meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberi suara bagi pihak-pihak yang terimbas oleh adanya kebijakan publik yang diterapkan”. Senada dengan uraian tersebut, Conyers (1994:154) juga mengungkapkan tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat.

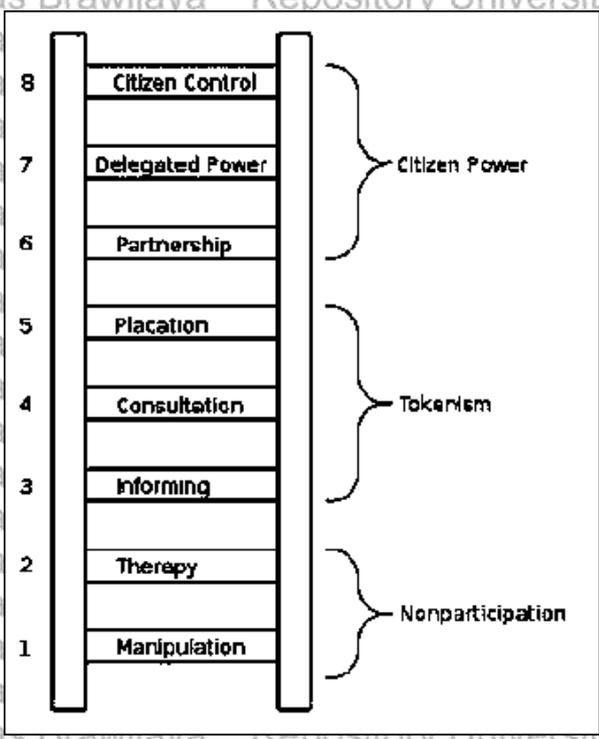
- Pertama, partisipasi masyarakat dapat menjadi alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai terhadap proyek atau pembangunan yang sedang dilakukan jika mereka merasa dilibatkan baik dalam proses persiapan dan perencanaannya sehingga akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Karena pada dasarnya partisipasi masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan.

2.5.2 Derajat Partisipasi Masyarakat

Pada hakekatnya partisipasi sering diartikan “keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari perintah” (Sumarto, 2004:188). Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:87), “adanya kesukarelaan (anggota) masyarakat untuk terlibat dan atau melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan” menjadi kunci pemahaman dari partisipasi masyarakat”. Meskipun setiap pemerintahan daerah sudah menerapkan sifat partisipatif dalam penyelenggaraannya. Tetapi setiap pemerintah daerah mempunyai tingkatan partisipasi berbeda. Perbedaan tingkat partisipasi dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti “adanya kepentingan, solidaritas, tujuan yang sama, dan ingin melakukan langkah bersama walaupun tujuannya berbeda” (Sumarto, 2004:188). Oleh karena itu perlu suatu teori

partisipasi publik untuk menganalisa kadar partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Arnstein yang telah dikutip oleh Muluk (2007:57), terdapat teori yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi publik pada suatu daerah. Teori ini disebut *ladder of participation* (tangga partisipasi). "Teori ini mengategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam memengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan" (Muluk, 2007:58). Teori ini tersusun atas tiga derajat partisipasi dan terbagi menjadi delapan anak tangga partisipasi yang dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Tangga Partisipasi (*Ladder of Participation*)

Sumber: Bebas Banjir (2015)

Berikut ini adalah penjelasan anak tangga partisipasi :

1. *Manipulation* (manipulasi):





Level ini secara relatif dipahami sebagai bentuk tidak adanya komunikasi dan esensinya hanya sekedar mendidik partisipan, tanpa melibatkan mereka secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Dengan kata lain, masyarakat sebagai partisipan diundang dalam forum tetapi tidak memahami tujuan tersebut.

2. *Therapy* (terapi) :

Level ini mengindikasikan sudah terjadi komunikasi, walaupun sifatnya terbatas. Sehingga inisiatif berasal dari pemerintah dan terjadi satu arah komunikasi.

3. *Informing* (pemberian informasi) :

Level ini warga telah dilibatkan dalam setiap dialog dan memiliki hak untuk didengar pendapatnya, meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan (Muluk, 2007:58).

4. *Consultation* (konsultasi) :

Level ini menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat (Muluk, 2007:59).

5. *Placation* (penentraman) :

Level ini menunjukkan keterlibatan aktivitas warga yang lebih mendalam dengan melibatkan mereka dalam pembuatan keputusan, meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih dalam pengambilan keputusan (Muluk, 2007:59).

6. *Partnership* (kemitraan) :



Level ini menunjukkan hubungan kerja yang sejajar antara pemerintah dan masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk bernegosiasi dan membuat kesepakatan (pengambilan keputusan).

7. *Delegated power* (kuasa yang didelegasi) :

Level ini menunjukkan adanya kepercayaan penuh dari pemerintah kepada masyarakat untuk mengurus kepentingannya, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan program.

8. *Citizen control* (kendali warga) :

Level ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri yang disepakati bersama, dan tanpa ada campur tangan pemerintah.

2.5.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat

Pada subbab sebelumnya telah disinggung bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah kunci memahami suatu partisipasi. Jika dilihat secara mekanisme pembangunan di Indonesia, maka proses perencanaan seharusnya dilakukan mulai dari bawah ke atas (*bottom up*). Menurut Wasistiono yang dikutip oleh Haris (2007:57), “partisipasi warga negara dilakukan tidak hanya pada tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya”. Menurutnya, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebagai bentuk partisipasi



dalam lingkup kepentingan negara dan pemerintahan yaitu : “ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan); ada keterlibatan secara emosional; dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya” (Haris, 2007:57). Eko (2003:18) menambahkan tiga hal substantif dalam partisipasi antara lain :

1. Voice (suara) yakni setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Pemerintah sebaliknya mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan.
2. Akses yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik.
3. Kontrol yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.

Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat dapat terwujud apabila ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sahidu yang dikutip dalam Kajian Perencanaan Partisipatif Bappeda Kota Depok (2007:47) menjelaskan “faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, kebutuhan (*needs*), imbalan (*rewards*), dan penguasaan informasi”.

Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana. Sementara faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal, dan pengalaman yang dimiliki.

Kuncoro (2010:5) menjelaskan bahwa “variabel yang mempengaruhi kondisi dan perilaku manusia selalu terbagi ke dalam dua jenis yaitu faktor-faktor internal (dalam diri individu) dan eksternal (faktor lingkungan)”. Faktor-faktor internal meliputi motivasi, intensi, sikap, minat, tingkat pendidikan, kecerdasan,



pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan sebagainya. Sedangkan faktor-faktor eksternal masih terbagi menjadi tiga sistem yaitu: mikro, ekso, dan makro.

Jadi yang termasuk sistem makro dari lingkungan individu adalah lingkungan terdekat dari individu itu sendiri seperti keluarga, lingkungan keagamaan atau adat, teman sebaya, teman sekelas, dsb. Yang termasuk sistem ekso adalah masyarakat, media massa, sekolah, petugas kesehatan dan sebagainya, yang tidak terkait langsung tetapi masih ada hubungan dengan individu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang termasuk sistem makro adalah sistem politik, perekonomian, kebudayaan, masyarakat luas, dan kebangsaan. Individu tidak bisa lepas dari pengaruh sistem makro ini, walaupun individu yang bersangkutan tidak merasakannya (Sarwono, 2010:68).

Suroso (2014) juga memaparkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan penduduk, dan lamanya tinggal. Sedangkan faktor eksternal meliputi komunikasi dan kepemimpinan. Yulianti (2012) mengungkap hal yang sama bahwa faktor internal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, dan besarnya keterlibatan dalam kegiatan pembangunan. Sementara faktor eksternal berasal dari pihak-pihak yang mempunyai pengaruh signifikan dan posisi penting dalam kesuksesan program.

Selanjutnya Pinatik (2014) mengatakan "faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah faktor intern yang meliputi kesadaran, pendidikan, dan penghasilan/pendapatan. Sedangkan faktor ekstern meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan/fasilitas". Menurut Plummer yang dikutip oleh Yulianti (2012:10) beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi antara lain :



1. Pengetahuan dan/atau keahlian
Dasar pengetahuan yang dimiliki akan memengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.
2. Pekerjaan masyarakat
Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikit pun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.
3. Tingkat pendidikan dan/atau buta huruf
Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
4. Jenis kelamin
Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.
5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu
Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Menurut Tjokroamidjojo yang dikutip oleh Suroso (2014) mengungkapkan faktor-faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam partisipasi masyarakat adalah :

- a. Faktor kepemimpinan, dalam menggerakkan partisipasi sangat diperlukan adanya pimpinan dan kualitas, dan
- b. Faktor komunikasi, gagasan, ide, kebijaksanaan, dan rencana baru akan mendapat dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat.

Kaloh (2009:11) berpendapat bahwa pemimpin yang dapat memberdayakan anggota organisasi adalah “pemimpin yang memahami secara utuh keberadaan staf, mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikemukakan dan diinginkan bawahan, bersedia menjelaskan secara rinci tujuan yang ingin dicapai, memberi kesempatan kepada staf untuk berkembang dan bersedia melatih staf untuk berpikir



kritis”. Kuddy (2012:26) berpendapat “kepemimpinan merupakan proses interaksi antara pemimpin, anggota, dan situasi. Kepemimpinan adalah proses memberi inspirasi kepada semua anggota agar bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang diharapkan, serta mengajak anggota agar bertindak benar, mencapai komitmen, dan memotivasi mereka dalam mencapai tujuan bersama”. Kepemimpinan juga turut dapat menciptakan antusiasme masyarakat. Beberapa langkah untuk menciptakan antusiasme antara lain:

1. Pemimpin harus memberi kebebasan kepada anggota yang dipimpinnya untuk ikut menentukan jenis program dan tujuannya;
2. Pemimpin harus memberi kebebasan pada setiap anggotanya untuk bekerja secara kreatif dalam mencapai tujuan dari program yang telah mereka sepakati bersama;
3. Pemimpin harus mampu dan mau menciptakan suatu lingkungan kerja yang bersifat dialogis;
4. Pemimpin harus mau menghargai anggotanya yang mampu menciptakan ide terbaik dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi atau menciptakan program baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Antusiasme anggota dapat digalakkan apabila pemimpin selalu mempertanggung jawabkan segala kebijaksanaan mereka, khususnya dalam hal keuangan, secara terbuka kepada anggotanya (Soetrisno, 2004:234).

Menurut Keating (1993:9) “tugas kepemimpinan meliputi dua bidang utama: pekerjaan yang harus diselesaikan (*task function*) dan kekompakan orang-orang yang dipimpinnya (*relationship function*)”. Keating (1993:9-10) telah menyusun beberapa indikator kepemimpinan dibidang *task function* antara lain:

1. Memulai (*initiating*): usaha agar kelompok mulai kegiatan atau gerakan tertentu.
2. Mengatur (*regulating*): tindakan untuk mengatur arah dan langkah kegiatan kelompok.
3. Memberitahu (*informing*): kegiatan memberi dan meminta informasi, data, fakta, pendapat kepada para anggota.
4. Mendukung (*supporting*): usaha untuk menerima gagasan, pendapat, usul dari bawah dan menyempurnakannya dengan menambah atau



mengurangnya untuk digunakan dalam rangka penyelesaian tugas bersama.

5. Menilai (*evaluating*): tindakan untuk mengkaji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensi-konsekuensinya dan untung-ruginya.
6. Menyimpulkan (*summarizing*): kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapat dan usul yang muncul, menyingkat lalu menyimpulkannya sebagai landasan untuk pemikiran lebih lanjut.

Sementara indikator kepemimpinan yang berorientasi *relationship function* meliputi :

1. Mendorong (*encouraging*): bersikap hangat, bersahabat, menerima orang-orang.
2. Mengungkapkan perasaan (*expressing feeling*): tindakan menyatakan perasaan terhadap kerja dan kekompakan kelompok.
3. Mendamaikan (*harmonizing*): tindakan mempertemukan dan mendamaikan pendapat-pendapat yang berbeda dan merukunkan orang-orang yang bersitegang satu sama lain.
4. Mengalah (*compromizing*): kemauan untuk mengubah dan menyesuaikan pendapat dan perasaan sendiri dengan pendapat dan perasaan orang-orang yang dipimpinya.
5. Memperlancar (*gatekeeping*): kesediaan membantu mempermudah keikutsertaan para anggota dalam kelompok, sehingga semua rela menyumbangkan dan mengungkapkan gagasan-gagasan.
6. Memasang aturan permainan (*setting standards*): tindakan menyampaikan aturan dan tata tertib yang membantu kehidupan kelompok (Keating, 1993:10-11).

Holil yang dikutip oleh Firmansyah (2009:1) juga menyebutkan ada empat poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat berasal dari luar yaitu :

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya.
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial.
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang



memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

Berdasarkan pemahaman dari faktor-faktor di atas, maka upaya mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan. Dalam pemberdayaan juga turut dibutuhkan kegiatan komunikasi pembangunan. Mardikanto dan Soebiato (2013:96) menjelaskan “tujuan komunikasi pembangunan bukanlah sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian pesan-pesan pembangunan saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk menumbuhkan, menggerakkan dan memelihara partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan”. Artinya komunikasi pembangunan sebagai alternatif utama dalam menimbulkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat. Menurut Hardhinawati (2012:72) “indikator yang dipakai untuk menjelaskan variabel komunikasi adalah transmisi yang baik, memberikan informasi yang akurat, jelas dan konsisten”.

2.6 Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)

Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai “pemicu kreativitas warga masyarakat sendiri. Bukannya pembunuh kreativitas karena semua kebutuhan pelaksanaan program kegiatannya benar-benar tumbuh dari bawah. Sedang Pemerintah Kota hanya mendanai dan memfasilitasi saja” (Tabloid Kota Kita, 2015:7). PRODAMAS merupakan “suatu program dari Pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur,

peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan” (Perwalikota Kediri No.40/2014). Program tersebut menjadi salah satu dari sembilan rencana aksi yang diusung Walikota Kediri untuk merealisasikan visi-misi Kota Kediri periode 2014 – 2019. Visi yang diangkat yaitu “menata Kota Kediri lebih sejahtera, berkeadilan, berdaya saing, berakhlak, dan tanpa korupsi”. Tujuan dari dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a) Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
- b) Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c) Meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
- d) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- e) Meningkatkan kesejateraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial; dan
- f) Meningkatkan peran serta dan mendorong kebudayaan masyarakat dalam pembangunan (Perwalikota Kediri No.40 /2014, Pasal 2).

Pemerintah Kota Kediri tentu berharap “PRODAMAS akan mempercepat terwujudnya pembangunan dari sisi waktu karena pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara serentak” (Barometer, 2015:4). Beberapa arahan kegiatan program yang dapat menjadi indikator dari terwujudnya percepatan pembangunan di Kota Kediri meliputi :

- 1. Bidang infrastruktur : lingkungan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum.
- 2. Bidang ekonomi : untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi usaha kelompok masyarakat.
- 3. Bidang sosial : untuk penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat dan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial (Tabloid Kota Kita, 2015:5).

2.6.1 Hubungan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Perencanaan Pembangunan



Perencanaan adalah “suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia” (Undang-undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Tujuan dari perencanaan pembangunan untuk “mengarahkan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya” (Tjokroamidjojo, 1987:12). Penggunaan sumber pembangunan di Indonesia dapat digolongkan sebagai penggunaan secara *laissez-faire*. Masyarakat diberikan kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Proses perencanaan pembangunan mempunyai alur, yang terdiri dari: penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan, dan evaluasi.

Berdasarkan sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menjelaskan perencanaan pembangunan dalam sebuah dokumen. Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Masing-masing dokumen memiliki kesinambungan satu sama lain. Supaya tercipta keselarasan tujuan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Selama ini perubahan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia mengikuti visi-misi kepala daerah terpilih dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang. Pemerintah Kota Kediri telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah selama periode tahun 2014-2019. Proyeksi perencanaan pembangunan Kota Kediri selama lima tahun ke depan dapat dilihat melalui visi-misi yang dibuat. Pemerintah Kota Kediri membutuhkan strategi untuk





menjalankan misi demi tercapainya visi. Salah satu strategi yang dibuat yaitu pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan alur penyusunan rencana pada tahapan perencanaan yang dipaparkan oleh Tjokroamidjojo. Terbentuknya PRODAMAS karena Pemkot

Kediri menilai banyak usulan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara serempak dan cepat. Setiap usulan yang disampaikan pada pemerintah, akan dilakukan verifikasi dan ditentukan skala prioritasnya. Kondisi ini menimbulkan proses perencanaan pembangunan yang lambat di Kota Kediri.

Sementara itu, Pemerintah Kota Kediri membuat alternatif pilihan untuk upaya mencapai perkembangan sosial ekonomi sebagai ciri perencanaan pembangunan yang diungkapkan oleh Tjokroamidjojo. Banyak perencanaan pembangunan yang berorientasi pada keterlibatan masyarakat. Hal ini dapat memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan dapat menikmati manfaat atau hasil dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dinilai penting untuk menjadi pelaku utama pembangunan. Situasi ini juga mengindikasikan bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.

membangun daerahnya supaya lebih baik dan bisa menyejahterakan warganya.

Dalam membangun daerahnya, pemerintah memerlukan sebuah perencanaan.

Karena perencanaan menjadi pedoman yang mampu mengarahkan pemerintah untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang bersifat terbatas, demi mewujudkan tujuan kehidupan sosial-ekonomi secara efisien dan efektif.

Pemerintah patut merencanakan pembangunan daerah sesuai tahapan yang berlaku, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Saat ini perencanaan pembangunan sering dikaitkan dengan konsep pemberdayaan. Pemberdayaan dipahami sebagai konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi sesuai nilai-nilai masyarakat. Tujuan pemberdayaan adalah membuat masyarakat yang berdaya melalui kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki untuk mengubah kualitas hidup mereka. Sehingga ada suatu keharusan bagi pemerintah dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk memulai pembangunan daerah. Artinya masyarakat sudah dijadikan pusat perhatian dan objek pembangunan.

Supaya masyarakat mau terlibat dalam pembangunan, maka pemerintah perlu memberi dorongan dan kesempatan kepada masyarakat. Cara yang dapat dipakai pemerintah yakni melalui suatu program pembangunan yang menerapkan prinsip partisipasi. Karena partisipasi dapat menjadi alat untuk menggali informasi, mendapat kepercayaan dari masyarakat dan sebagai hak demokrasi apabila melibatkan mereka dalam proyek pembangunan.

Dengan kata lain, partisipasi adalah cara pemerintah untuk memberdayakan masyarakat demi mewujudkan perencanaan pembangunan daerah. Syarat





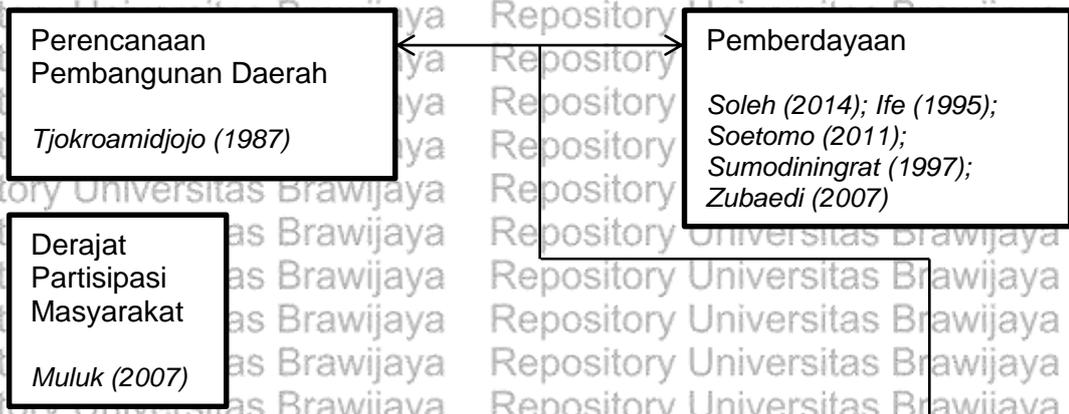
terbentuknya partisipasi yakni adanya kemauan, sukarela, keterlibatan secara emosional, dan ikut merasakan manfaat yang diperoleh. Meskipun pada akhirnya setiap pemerintahan daerah menghasilkan tingkat partisipasi yang berbeda-beda. Hal ini wajar saja terjadi, karena masyarakat mempunyai ciri khas, cara pandang, keterampilan, dan harapan masing-masing pada proses perencanaan pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu peneliti perlu untuk menganalisa derajat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) yang digagas oleh Pemerintah Kota Kediri.

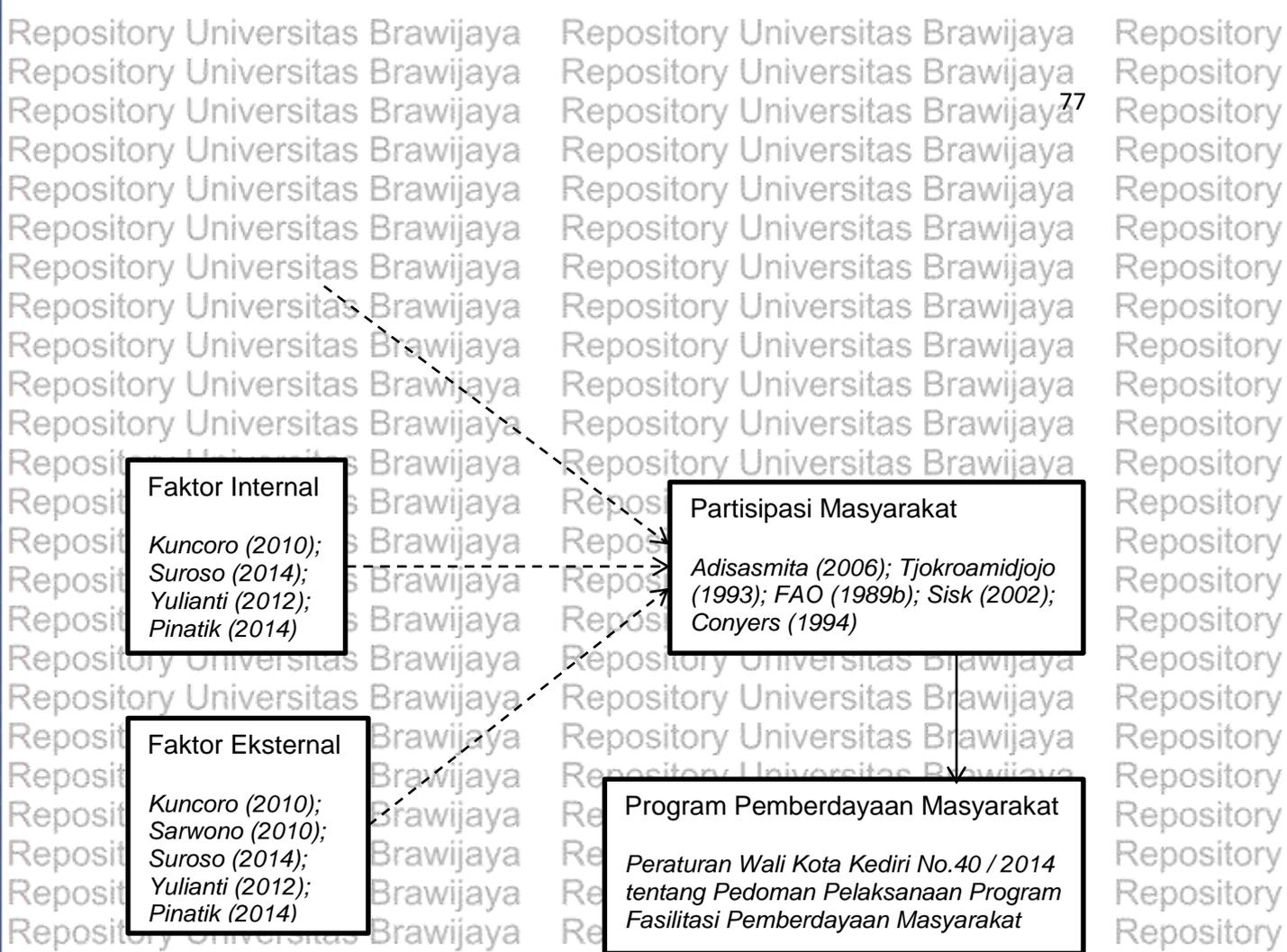
Dalam mengukur derajat partisipasi masyarakat Kota Kediri, peneliti menggunakan tangga partisipasi menurut Arnstein yang telah dikutip oleh Muluk (2007). Berdasarkan teori tersebut, terdapat tiga derajat partisipasi warga dan delapan anak tangga partisipasi. Peneliti ingin menganalisa letak derajat partisipasi masyarakat sesuai tangga partisipasi. Karena sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Tagu (2012), Hakim (2014), dan Suroso (2014) terdapat temuan bahwa derajat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih sampai pada anak tangga konsultasi dan penentrangan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah masih mendominasi suatu perencanaan pembangunan. Padahal proses perencanaan di Indonesia seharusnya menganut lima pendekatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 6, yaitu: teknokratis, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up.

PRODAMAS selalu menerapkan prinsip partisipatif dan transparansi sejak awal diberlakukan pada bulan Maret 2015. Pemerintah Kota Kediri berharap masyarakat dapat terlibat secara aktif mulai tahap perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi, hingga manfaat dari hasil program tersebut. Setiap masyarakat yang bersedia terlibat dalam berbagai kegiatan PRODAMAS diduga memiliki motif dan alasan tertentu. Peneliti menduga adanya faktor-faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PRODAMAS.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka ada temuan bahwa faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi program. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2010); Suroso (2014); Yulianti (2012); Pinatik (2014) terdapat faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat secara internal meliputi: pengetahuan, pekerjaan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, kepercayaan terhadap budaya tertentu, usia, pendapatan / gaji, lama menetap, dan intensitas keterlibatan dalam kegiatan masyarakat. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Kuncoro (2010); Sarwono (2010); Suroso (2014); Yulianti (2012); Pinatik (2014) telah menemukan bahwa faktor eksternal yang dapat memengaruhi partisipasi adalah kepemimpinan dan komunikasi. Karena pemimpin sebagai inspirator bagi masyarakat dan komunikasi dapat menumbuhkan, menggerakkan serta memelihara partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu peneliti membuat gambar kerangka konseptual yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.





Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.2 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diungkapkan oleh peneliti sebagai berikut :

H_1 = Derajat partisipasi masyarakat, faktor internal, dan faktor eksternal berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

H_2 = Derajat partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

H_3 = Faktor internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap

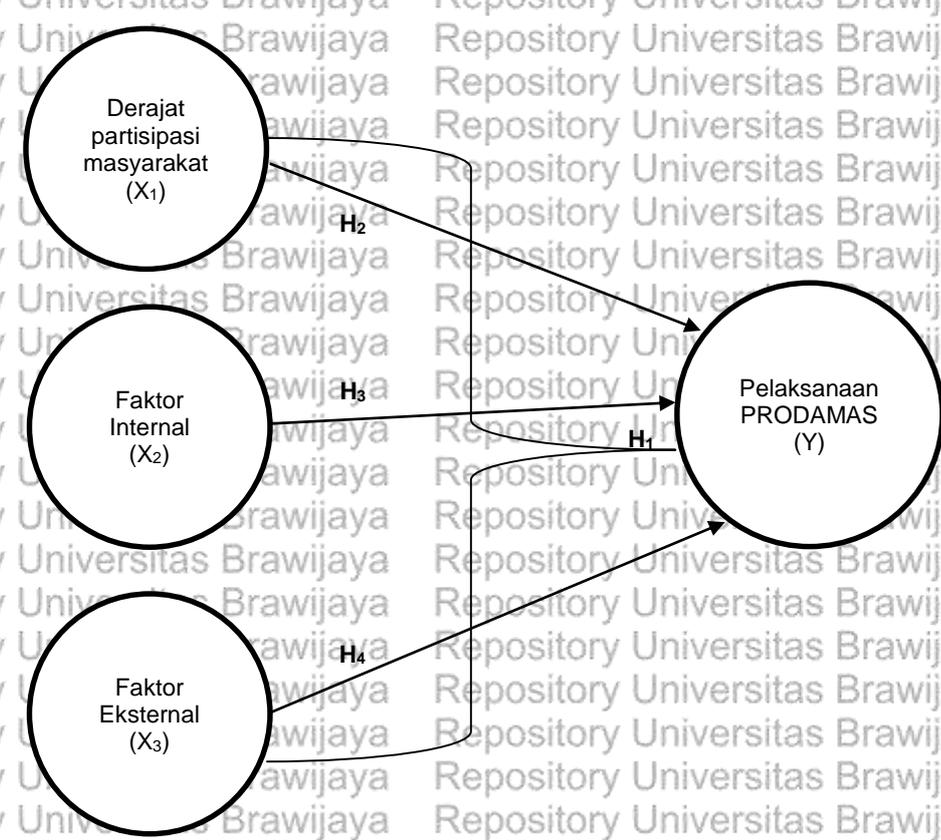


pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

H_4 = Faktor eksternal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap

pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Sehingga peneliti telah menyusun model hipotesis seperti berikut :





Gambar 3.2 Model Hipotesis

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian menjadi pedoman bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Peneliti akan lebih mudah dan terarah saat melakukan penelitian di lapangan. Penelitian bertujuan untuk mendapat data, mengolah, dan menganalisa suatu masalah yang sedang terjadi. Sehingga hasil



penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi masalah yang sedang terjadi.

Selain itu peneliti juga dapat mengimplikasikan antara teori dan fakta yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Creswell (2013:352-353) menyebutkan “penelitian

kuantitatif adalah cara untuk menguji sasaran teori dengan mengkaji hubungan antar beberapa variabel. Beberapa variabel ini bisa diukur, khususnya dalam beberapa instrumen, sehingga data yang sudah ditandai dengan nomor bisa dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik”. Sehingga peneliti dapat

menguji derajat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam proses Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS). Karena setiap variabel mempunyai keterkaitan hubungan satu sama lain, maka penelitian ini dapat dianggap sebagai penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi merupakan “penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain” (Siregar, 2014:107).

4.2 Konsep dan Variabel Penelitian

4.2.1 Definisi Konsep

Dalam penelitian kuantitatif, peneliti perlu membuat konsep dan variabel penelitian agar proses penelitian lebih terstruktur dan menuai hasil yang diharapkan. Menurut Effendi (2006:34) “konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu”.

Konsep pertama yang digunakan oleh peneliti adalah derajat partisipasi masyarakat Kota Kediri. Karena peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh



manakah derajat partisipasi masyarakat Kota Kediri berdasarkan tangga partisipasi, terhadap pelaksanaan PRODAMAS.

Konsep kedua, peneliti ingin mengetahui faktor internal dan eksternal yang dapat memicu antusias warga saat pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Karena PRODAMAS merupakan bentuk percepatan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kediri dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah. Setelah peneliti membuat rancangan konsep penelitian, maka diperlukan variabel. Variabel merupakan “suatu konsep yang dapat diasumsikan sebagai suatu kisaran nilai” (Kuncoro, 2003:9). Beberapa variabel dipakai agar peneliti mudah menjabarkan konsep penelitian secara empiris. Berikut ini rincian variabel dan indikator dari konsep penelitian.

Tabel 4.1 Konsep, Variabel, dan Indikator Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Item
Partisipasi masyarakat	Derajat partisipasi masyarakat (X ₁)	(X _{1.1}) Informing	Masyarakat mengikuti rembug warga dan mempunyai hak berpendapat, tetapi tidak berhak ikut campur dalam pengambilan keputusan
		(X _{1.2}) Consultation	Antara pemerintah dan masyarakat sudah terjadi komunikasi dua arah (hubungan timbal-balik)
		(X _{1.3}) Placation	Masyarakat mengikuti rembug warga, mempunyai hak berpendapat, dan dilibatkan dalam pembuatan keputusan, tetapi pemegang kuasa (Ketua RT) memiliki



		hak yang lebih dominan dalam pembuatan keputusan
	(X1.4) Partnership	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dan pemerintah menjalin hubungan kerja yang sejajar, mulai perencanaan sampai evaluasi 2. Masyarakat berkesempatan untuk melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan / keputusannya sendiri
Faktor internal (X ₂)	(X2.1) Intensitas keterlibatan	Tingkat keterlibatan masyarakat saat rebug warga dan / atau melaksanakan kegiatan kerja bakti
	(X2.2) Pengetahuan	Kepandaian masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu
	(X2.3) Motivasi	Dorongan yang timbul pada diri masyarakat secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu
Faktor eksternal (X ₃)	(X3.1) Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemimpin bersikap baik dan ramah pada masyarakat 2. Pemimpin selalu mendukung dan berjuang demi masyarakatnya 3. Pemimpin bersikap bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan pendapat yang terjadi antar masyarakat 4. Pemimpin mampu menelaraskan perbedaan pendapat dan perasaan / keinginan yang berasal dari pribadi dan masyarakat 5. Pemimpin mampu memberikan solusi alternatif bagi masyarakat yang mengalami masalah saat pelaksanaan program sedang berlangsung



			6. Pemimpin bersikap tegas dalam menerapkan tata tertib, termasuk menghimbau masyarakat untuk mematuhi
		(X _{3.2}) Komunikasi	1. Pemerintah mentransmisi informasi program kepada masyarakat 2. Pemerintah memberi informasi program yang jelas kepada masyarakat 3. Pemerintah memberi informasi program yang akurat kepada masyarakat 4. Pemerintah memberi informasi program yang konsisten (tidak berubah-ubah) kepada masyarakat
Program Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (Y)	(Y ₁) Bidang infrastruktur	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai
		(Y ₂) Bidang ekonomi	Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi untuk kelompok usaha bersama dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai
		(Y ₃) Bidang sosial	Penyelesaian permasalahan sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial di masyarakat dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai

4.2.2 Definisi Operasional

1. Informing : responden dilibatkan rembung warga, boleh menyampaikan pendapat / gagasan, tetapi tidak terlibat saat pembuatan keputusan.
2. Consultation : responden menyampaikan pendapat / gagasan pada level pihak di atasnya dan langsung ada tanggapan (hubungan komunikasi dua arah).



3. Placation : responden dilibatkan rembung warga, boleh menyampaikan pendapat / gagasan, dilibatkan dalam pembuatan keputusan, tetapi pemegang kuasa (Ketua RT / PPTK / Pendamping) tetap lebih dominan untuk membuat keputusan.
4. Partnership : responden sebagai mitra kerja dan sudah diperbolehkan membuat keputusan atas kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan melalui negosiasi / rembung warga.
5. Intensitas keterlibatan : tingkat keterlibatan responden menghadiri rembung warga // arisan bapak-bapak, dan kegiatan kerja bakti yang biasanya dilaksanakan secara rutin.
6. Pengetahuan : kemampuan responden untuk memahami tahap-tahap rencana kegiatan yang dilakukan pada wilayah RT-nya.
7. Motivasi : perilaku responden secara sadar dan mau terlibat aktif (tenaga, waktu, dan pikiran) untuk membaaur dalam setiap kegiatan di RT-nya.
8. Kepemimpinan : kemampuan pemimpin (Ketua RT) membina hubungan dengan masyarakat (responden) yang dideskripsikan melalui enam item pada tabel 4.1.
9. Komunikasi : kemampuan berkomunikasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat (responden) yang dideskripsikan melalui empat item pada tabel 4.1.



10. Bidang infrastruktur : adanya manfaat / hasil yang diperoleh responden melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai.

11. Bidang ekonomi : adanya manfaat / hasil yang diperoleh responden melalui penyediaan sarana dan prasarana ekonomi untuk kelompok usaha bersama dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai.

12. Bidang sosial : adanya manfaat / hasil yang diperoleh responden melalui penyelesaian permasalahan sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial di masyarakat dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai.

4.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah “batas dari suatu obyek penelitian dan sekaligus merupakan batas bagi proses induksi (generalisasi) dari hasil penelitian yang bersangkutan”

(Efferin, 2008:73). “Populasi dapat dibedakan pula antara populasi sampling dengan populasi sasaran” (Mantra, 2006:152). Masyarakat Kota Kediri, sebagai populasi sampling, karena akan menjadi keseluruhan objek yang akan diteliti.

Sedangkan Masyarakat Kota Kediri yang menjadi pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai populasi sasaran. Karena populasi sasaran merupakan objek yang akan dijadikan sumber data oleh peneliti.

Metode sampling yang digunakan yaitu *random sampling*. Metode *random sampling* termasuk salah satu teknik pengambilan sampel pada *probability sampling*. Siregar (2014:145) mendefinisikan *probability sampling* sebagai



“metode sampling yang setiap anggota populasi memiliki peluang sama untuk terpilih sebagai sampel”. Peneliti dapat memberi peluang yang sama pada setiap elemen populasi melalui metode *random* sampling.

Peneliti mengambil sampel di wilayah RW 01, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Wilayah RW 01 terdiri dari 3 RT dan mempunyai anggota KK (Kepala Keluarga) sebanyak 130 KK. Peneliti menggunakan teknik solvin untuk menentukan ukuran sampel yang akan diambil.

Menurut Siregar (2014:149), rumus dari teknik solvin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

di mana :

n = sampel

N = jumlah populasi

e = perkiraan tingkat kesalahan

Hasil perhitungan ukuran sampel dari rumus solvin adalah : $130/[1+130(0,05)^2]=98,11$. Sehingga jumlah sampel yang akan diteliti terdapat 98 responden.

4.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai peneliti sebagai berikut :

1. Observasi

“Pengamatan yang dilakukan seseorang tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat melahirkan suatu



masalah” (Zuriah, 2009:30). Peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu, sebelum menentukan perumusan masalah. Peneliti mengamati kondisi PRODAMAS yang telah diberlakukan pada setiap RT di Kota Kediri, dan melihat pergerakan dari masyarakat setempat atas program tersebut.

2. Wawancara

“Pengumpulan informasi dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkompeten di tempat penelitian tersebut dilakukan. Hal ini dilakukan guna mencegah kekeliruan dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian”

(Siregar, 2014:124). Peneliti akan mewawancarai beberapa nara sumber yang terlibat dalam PRODAMAS, seperti: Ketua RT, Tim Pendamping, Tim PPTK, Kelurahan, dan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri.

3. Kuesioner

Peneliti “membuat pedoman pertanyaan (daftar pertanyaan) dan kemudian di antara kesatuan-kesatuan, baik melalui pos maupun diantar ke tempat kesatuan” (Unaradjan, 2000:226-227). Peneliti membuat kuesioner secara tertutup dengan memakai ukuran skala likert. “Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu” (Siregar, 2014:138). Adapun pembagian skala



untuk setiap jawaban yang diberi responden pada masing-masing pertanyaan atau pernyataan yaitu :

- a) Jawaban sangat setuju diberi skor 5 poin untuk pertanyaan / pernyataan positif, dan skor 1 poin untuk pertanyaan / pernyataan negatif.
- b) Jawaban setuju diberi skor 4 poin untuk pertanyaan / pernyataan positif, dan skor 2 poin untuk pertanyaan / pernyataan negatif.
- c) Jawaban netral diberi skor 3 poin untuk pernyataan / pertanyaan negatif dan positif.
- d) Jawaban tidak setuju diberi skor 2 poin untuk pertanyaan / pernyataan positif, dan skor 4 poin untuk pertanyaan / pernyataan negatif.
- e) Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 5 poin untuk pertanyaan / pernyataan negatif, dan skor 1 poin untuk pertanyaan / pernyataan positif.

4. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dan menggali informasi melalui data tertulis. Data ini dipakai untuk mengetahui deskripsi umum lokasi penelitian, deksripsi umum tentang PRODAMAS, susunan pelaksana PRODAMAS, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

4.5 Lokasi Penelitian



Lokasi merupakan tempat peneliti untuk memperoleh data dan mengambil sampel sebagai bahan penelitian sesuai konsep dan variabel penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut yaitu:

1. Kediri sebagai salah satu kota yang memiliki inovasi untuk mengembangkan proses musyawarah perencanaan pembangunan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat.
2. Kediri mempunyai cara tersendiri untuk melibatkan masyarakat turut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat.
3. Belum ada yang melakukan penelitian, khususnya di Kelurahan Tosaren tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program. Pemerintah Kota Kediri khususnya Kantor Pemberdayaan Masyarakat membutuhkan penilaian dan masukan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat terutama dari unsur akademik.

4.6 Instrumen Penelitian

4.6.1 Uji Validitas

Validitas menjadi salah satu acuan penting untuk menentukan kelayakan suatu instrumen. "Validitas alat ukur adalah akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun dilakukan berkali-kali dan di mana-mana" (Bungin, 2009:97). Pada penelitian ini, jenis validitas yang dipakai yaitu



validitas konstruk. Karena peneliti akan mengukur “kesesuaian antara pertanyaan atau soal-soal dalam instrumen dengan konsep dan susunannya dari variabel yang akan diukur” (Ali, 2014:262). Peneliti telah merumuskan variabel-variabel penelitian sesuai hasil pengkajian berbagai teori dan penelitian terdahulu terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat ukur. Kuesioner yang disusun harus dapat mengukur variabel penelitian. Peneliti akan melakukan uji validitas menggunakan teknik *product moment* dengan cara mengkorelasikan setiap pertanyaan dan skor total. Sehingga indikator dikatakan valid atau tidak dari daftar pertanyaan yang diajukan, apabila r hitung $\geq r$ tabel. Apabila nilai signifikansi indikator memperoleh angka kurang dari taraf signifikansi ($\alpha < 0,05$), maka indikator dikatakan valid. Sedangkan nilai signifikansi indikator memperoleh angka lebih dari taraf signifikansi ($\alpha < 0,05$), maka indikator dikatakan tidak valid. Menurut Hadi yang dikutip oleh Arikunto, hasil uji validitas dapat digambarkan dengan “menggunakan interpretasi terhadap koefisien korelasi yang diperoleh atau nilai r . Interpretasi tersebut adalah sebagai berikut”.

Tabel 4.2 Interpretasi Nilai r

Besarnya nilai r	Interpretasi
Antara 0,800 sampai dengan 1,00	Tinggi
Antara 0,600 sampai dengan 0,800	Cukup
Antara 0,400 sampai dengan 0,800	Agak rendah
Antara 0,200 sampai dengan 0,400	Rendah
Antara 0,000 sampai dengan 0,200	Sangat rendah (tak berkorelasi)

Sumber : Arikunto (2014:319)

Peneliti telah melakukan uji validitas dengan membagikan kuesioner kepada 30 responden secara acak. Hasil uji validitas terhadap beberapa item penelitian yang telah diisi adalah berikut ini :

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Item Penelitian

Item	r hitung	sig.	Interpretasi	Keterangan
X1.1	0,792	0,000	Cukup	Valid
X1.2	0,866	0,000	Tinggi	Valid
X1.3	0,737	0,000	Cukup	Valid
X1.4.1	0,767	0,000	Cukup	Valid
X1.4.2	0,841	0,000	Tinggi	Valid
X2.1	0,834	0,000	Tinggi	Valid
X2.2	0,901	0,000	Tinggi	Valid
X2.3	0,869	0,000	Tinggi	Valid
X3.1.1	0,698	0,000	Cukup	Valid
X3.1.2	0,754	0,000	Cukup	Valid
X3.1.3	0,762	0,000	Cukup	Valid
X3.1.4	0,550	0,000	Agak rendah	Valid
X3.1.5	0,724	0,000	Cukup	Valid
X3.1.6	0,791	0,000	Cukup	Valid
X3.2.1	0,705	0,000	Cukup	Valid
X3.2.2	0,751	0,000	Cukup	Valid
X3.2.3	0,683	0,000	Cukup	Valid
X3.2.4	0,696	0,000	Cukup	Valid
Y1	0,950	0,000	Tinggi	Valid
Y2	0,808	0,000	Tinggi	Valid
Y3	0,870	0,000	Tinggi	Valid

Sumber: Lampiran 2

Sehubungan dengan pemaparan output SPSS terkait hasil uji validitas, maka setiap item penelitian dikatakan valid. Setiap item penelitian mengandung taraf sig. < 0,05. Mayoritas item penelitian mempunyai interpretasi koefisien korelasi yang tergolong cukup.

4.6.2 Uji Reliabilitas



“Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula” (Siregar, 2014:173). Penelitian ini menggunakan teknik *alpha cronbach* sebagai pengukur reliabilitas data. Teknik *alpha cronbach* digunakan untuk menghitung reliabilitas data yang mengukur perilaku masyarakat. Kriteria indikator penelitian dikatakan reliabel, apabila koefisien reliabilitas (r_{11}) $\geq 0,6$.

Peneliti telah melakukan uji reliabilitas pada item penelitian yang terdiri dari 21 butir pertanyaan dan/atau pernyataan. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas pada item penelitian.

Tabel 4.4 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,942	21

Sumber: Lampiran 3

Sehubungan dengan kriteria reliabilitas, maka item penelitian dikatakan reliabel. Hasil koefisien reliabilitas item penelitian yang berjumlah 21 butir pertanyaan dan/atau pernyataan lebih dari 0,6, yakni sebesar 0,942.

4.6.3 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh derajat partisipasi masyarakat (X_1), faktor internal (X_2), dan faktor eksternal (X_3) terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (Y). Model analisa yang digunakan ialah analisis jalur. Analisis jalur juga menjadi bentuk perpanjangan dari analisis regresi linear ganda. Beberapa asumsi klasik yang dipakai sebagai validitas analisis regresi yaitu: uji linearitas, uji multikolinearitas, uji

autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uraian dari hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan terhadap variabel X_1, X_2, X_3 sebagai variabel bebas; dan Y sebagai variabel terikat, meliputi :

a) Uji Linearitas

Model regresi dapat digunakan, apabila hasil uji linearitas menunjukkan garis regresi berbentuk linear. Berikut ini merupakan hasil uji linearitas terhadap variabel bebas ($X_1, X_2, \text{ dan } X_3$) dan terikat (Y) :

Tabel 4.5 Hasil Uji Linearitas

Hubungan	Y – X ₁	Y – X ₂	Y – X ₃
Signifikansi	0,010	0,063	0,060
Alpha	0,050	0,050	0,050
Kondisi I	S < A	S > A	S > A
F _{hitung}	1,959	1,942	1,701
F _{tabel}	2,701	2,701	2,701
Kondisi II	F _{hitung} < F _{tabel}	F _{hitung} < F _{tabel}	F _{hitung} < F _{tabel}
Simpulan	Linear	Linear	Linear

Sumber: Output SPSS

Sehubungan dengan tabel di atas, maka diperoleh hasil signifikansi dari *deviation from linearity* menunjukkan nilai lebih dari alpha pada hubungan Y-X₂ dan Y-X₃, serta nilai signifikansi kurang dari alpha pada hubungan Y-X₁. Hasil koefisien F menunjukkan F_{hitung} kurang dari F_{tabel}. F_{tabel} diperoleh dengan *degrees of freedom* (df) n₁ = 3, dan n₂ = 94 sebesar 2,701. Kedua kriteria menunjukkan H₀ diterima dan H_a ditolak, sehingga keputusan yang didapat adalah model regresi berbentuk linear.

b) Uji Multikolinearitas

Uji asumsi multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan linear yang terjadi antar variabel bebas. Uji asumsi

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila variabel-variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas, maka nilai $VIF \leq 10$. Apabila variabel-variabel bebas terjadi multikolinearitas, maka nilai $VIF > 10$. Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas terhadap variabel bebas (X_1 , X_2 , dan X_3) dan terikat (Y):

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Nilai VIF	Kondisi	Keterangan
Derajat Partisipasi Masyarakat (X_1)	2,328	$VIF \leq 10$	Tidak terjadi multikolinearitas
Faktor Internal (X_2)	1,812	$VIF \leq 10$	Tidak terjadi multikolinearitas
Faktor Eksternal (X_3)	1,402	$VIF \leq 10$	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS

Sehubungan dengan hasil perhitungan di atas, setiap variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari dan/atau sama dengan 10 ($VIF \leq 10$). Kriteria tersebut mengindikasikan tidak terjadinya multikolinearitas.

c) Uji Autokorelasi

Uji asumsi autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi di antara data pengamatan. Uji asumsi autokorelasi dapat dideteksi menggunakan uji *Durbin-Watson*. Apabila nilai statistik *Durbin-Watson* mendekati angka 2, maka data pengamatan tidak mengalami autokorelasi. Data pengamatan mengalami autokorelasi, apabila nilai statistik *Durbin-Watson* menjauhi angka 2. Berikut ini merupakan hasil uji autokorelasi terhadap variabel bebas (X_1 , X_2 , dan X_3) dan terikat (Y):

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,535 ^a	,286	,263	1,192	2,136



Sumber: Output SPSS

Sehubungan dengan tabel di atas, maka hasil perhitungan menunjukkan nilai statistik *Durbin-Watson* sebesar 2,136. Nilai statistik dapat dikatakan mendekati angka dua. Kriteria ini mengindikasikan H_0 diterima dan H_a ditolak. Kesimpulannya yang didapat adalah tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan.

d) Uji Heteroskedastisitas

Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah *rank* korelasi dari *Spearman*. Uji asumsi heteroskedastisitas berfungsi untuk mengetahui sama atau tidaknya variasi residual absolut terhadap variabel bebas. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas terhadap variabel bebas ($X_1, X_2, \text{ dan } X_3$) dan terikat (Y) :

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hubungan	$X_1 - AX_1$	$X_2 - AX_2$	$X_3 - AX_3$
Signifikansi	0,568	0,639	0,111
Alpha	0,050	0,050	0,050
Kondisi I	$S > A$	$S > A$	$S > A$
r_{hitung}	0,058	-0,048	0,162
r_{tabel}	0,290	0,290	0,290
Kondisi II	$r_{hitung} < r_{tabel}$	$r_{hitung} < r_{tabel}$	$r_{hitung} < r_{tabel}$
Simpulan	Tidak terjadi heteroskedastisitas	Tidak terjadi heteroskedastisitas	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS

Sehubungan dengan tabel di atas, maka diperoleh hasil signifikansi menunjukkan nilai lebih dari alpha. Hasil perhitungan koefisien korelasi tabel (r_{tabel}) dengan *degrees of freedom* (df) $n = N - 1 - 1 = 96$ sebesar 0,290, sehingga setiap hubungan $X_1 - AX_1, X_2 - AX_2, \text{ dan } X_3 - AX_3$ menunjukkan r_{hitung} kurang





dari r_{tabel} . Kedua kriteria menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga keputusan yang didapat adalah ada hubungan yang sistematis antara variabel yang menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya.

4.7 Analisa Data

Dalam suatu penelitian, data menjadi sumber peneliti untuk menjawab perumusan masalah dan menguji hipotesis. Jika peneliti telah mengumpulkan dan mengklasifikasi data, maka peneliti dapat melakukan analisa data. Peneliti dapat mengolah data secara cepat dan mudah pada era modern. Salah satu caranya dengan memakai aplikasi SPSS for windows versi 21. SPSS (*Statistical Program for Social Science*) merupakan “suatu program aplikasi komputer yang secara khusus digunakan untuk mengolah dan menganalisis data statistik” (Sudarmanto, 2005:17).

SPSS menjadi “software aplikasi statistik yang sangat populer, baik bagi praktisi yang sedang melakukan riset maupun bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir” (Trihendradi, 2013:1). Berikut ini adalah teknik analisa data yang akan dipakai oleh peneliti :

4.7.1 Analisa Statistik Deskriptif

Pada hakekatnya pengolahan data statistik sama halnya dengan memberi kode terhadap data penelitian dalam bentuk angka. Peneliti akan mengolah dan menganalisis memakai statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan “hanya menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa melihat hubungan-hubungan yang ada” (Bungin, 2009:171). Analisis statistik

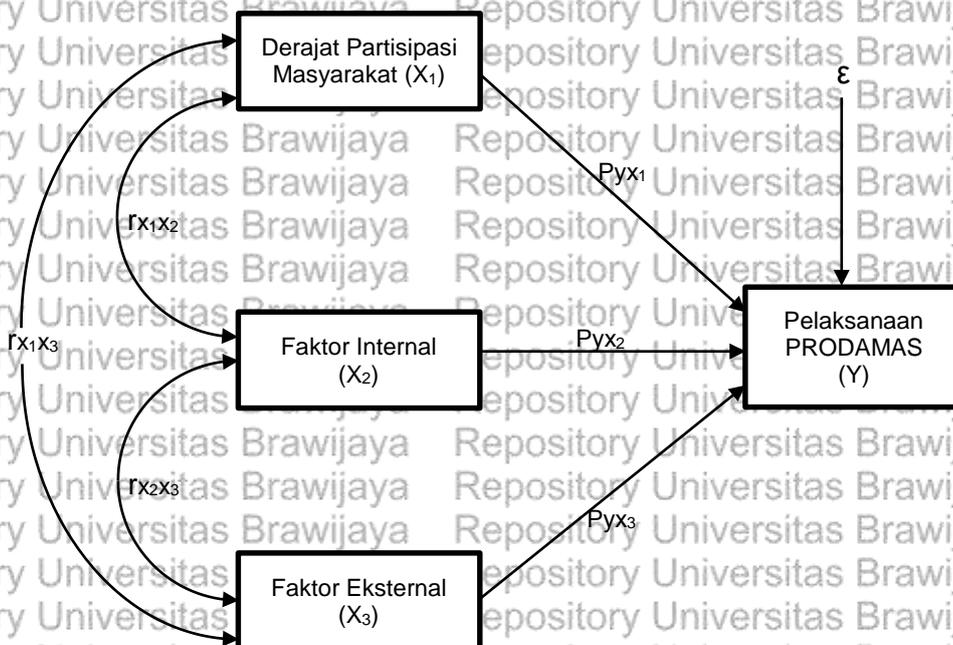


deskriptif digunakan untuk menganalisa dua perumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, peneliti akan mengolah dan menganalisa derajat partisipasi masyarakat Kota Kediri dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Kedua, peneliti akan mengolah dan menganalisa faktor internal dan eksternal yang memengaruhi partisipasi masyarakat Kota Kediri mulai tahap perencanaan sampai pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

4.7.2 Analisa Jalur

Menurut *Rutherford* yang dikutip Sarwono (2007:1), “analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung”. Maka analisis jalur sebenarnya juga bentuk perpanjangan dari analisis regresi yang standar. “Koefisien jalur yang distandarkan (*standardized path coefficient*) ini digunakan untuk menjelaskan besarnya pengaruh (bukan memprediksi) variabel bebas (eksogen) terhadap variabel lain yang diberlakukan sebagai variabel terikat (endogen)” (Riduwan dan Kuncoro, 2008:116). Peneliti menggunakan analisa jalur karena ingin mengetahui bagaimana perbedaan sebuah variabel memengaruhi variabel lain dan seberapa besar peran variabel antara dalam analisis regresi. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisa melalui tahapan-tahapan berikut ini:

- 1) Peneliti menggambar diagram jalur yang ditunjukkan pada gambar 4.1



Gambar 4.1 Diagram Jalur

2) Peneliti menghitung regresi dan koefisien korelasi antara derajat partisipasi masyarakat, faktor internal, dan faktor eksternal. Sehingga dibutuhkan kriteria untuk menentukan tingkat hubungan korelasi, meliputi

Tabel 4.9 Tingkat Hubungan Korelasi

Interval Koefisien	Hubungan Korelasi
0 – 0,25	Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada)
> 0,25 – 0,5	Korelasi cukup kuat
≥ 0,5 – 0,75	Korelasi kuat
> 0,75 – 1	Korelasi sangat kuat

Sumber: Sarwono (2007:170)

Nilai koefisien korelasi dipakai untuk menentukan suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak. Nilai koefisien bergerak dari $0 \geq 1$ atau $1 \leq 0$. Jika dipaparkan, maka nilai koefisien tersebar seperti pada tabel 4.4.

Tabel 4.10 Nilai Koefisien

Nilai Koefisien	Penjelasannya
+0,70 – ke atas	Hubungan positif yang sangat kuat
+0,50 – +0,69	Hubungan positif yang mantap
+0,30 – +0,49	Hubungan positif yang sedang
+0,10 – +0,29	Hubungan positif yang tak berarti
0,0	Tidak ada hubungan
-0,01 – -0,09	Hubungan negatif yang tak berarti
-0,10 – -0,29	Hubungan negatif yang rendah
-0,30 – -0,49	Hubungan negatif yang sedang
-0,50 – -0,59	Hubungan negatif yang mantap
-0,70 – ke bawah	Hubungan negatif yang sangat kuat

Sumber : Bungin (2009:184)

3) Peneliti menghitung koefisien jalur secara bersama-sama dengan hipotesis yaitu :

H_0 : derajat partisipasi masyarakat, faktor internal, dan faktor eksternal tidak berkontribusi secara bersama-sama dan signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.





H_a : derajat partisipasi masyarakat, faktor internal, dan faktor eksternal berkontribusi secara bersama-sama dan signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Sehingga variabel-variabel bebas dianggap berpengaruh secara serentak terhadap variabel terikat, apabila nilai f hitung $> f$ tabel dan pada taraf signifikan $\alpha < 0,05$. Sedangkan variabel-variabel bebas dianggap tidak berpengaruh secara serentak terhadap variabel terikat, apabila nilai f hitung $\leq f$ tabel dan pada taraf sig. $\alpha < 0,05$.

4) Peneliti menghitung koefisien jalur secara parsial, yang meliputi:

a) Hubungan derajat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, dengan hipotesis :

H_0 : derajat partisipasi masyarakat tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

H_a : derajat partisipasi masyarakat berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

b) Hubungan faktor internal terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, dengan hipotesis :

H_0 : faktor internal tidak berkontribusi secara signifikan terhadap



pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

H_a : faktor internal berkontribusi secara signifikan terhadap

pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

c) Hubungan faktor eksternal terhadap pelaksanaan Program

Pemberdayaan Masyarakat, dengan hipotesis :

H_0 : faktor eksternal tidak berkontribusi secara signifikan terhadap

pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

H_a : faktor eksternal berkontribusi secara signifikan terhadap

pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Sehingga variabel-variabel bebas dianggap berpengaruh secara parsial

terhadap variabel terikat, apabila nilai t hitung $> t$ tabel dan pada taraf

signifikan $\alpha < 0,05$. Sedangkan variabel-variabel bebas dianggap tidak

berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat, apabila nilai

t hitung $\leq t$ tabel dan pada taraf signifikan $\alpha < 0,05$.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Tosaren terletak di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur. Kelurahan Tosaren dibatasi oleh Kelurahan Tinalan di sebelah utara; Kelurahan Singonegaran di sebelah selatan; Kelurahan Banaran di sebelah timur; dan Kelurahan Kaliombo di sebelah barat. Jarak antara Kelurahan Tosaren dan ibu kota kecamatan ialah 2 km. Jarak tempuh dari Kelurahan Tosaren menuju ibu kota kabupaten/kota ialah 4 km. Topografi wilayah Tosaren berada di dataran rendah

yang meliputi rawa dan aliran sungai. Luas wilayah Tosaren dapat diperinci berdasarkan penggunaannya yaitu:

- Luas pemukiman : 64 Ha
- Luas persawahan : 23.362 Ha
- Luas perkebunan : 13 Ha
- Luas kuburan : 2,2 Ha
- Luas pekarangan : 43 Ha
- Perkantoran : 30 Ha
- Luas prasarana umum : 156,7 Ha

Jumlah penduduk Tosaren berdasarkan data tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2014 sebanyak 8.761 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.205 orang dan 4.556 orang berjenis kelamin perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Tosaren sebesar 6,67 /per km. Tingkat angka harapan hidup dari penduduk Tosaren ialah 75 tahun. Penduduk Tosaren berasal dari berbagai etnis, seperti Jawa, Betawi, Flores, Ambon, dan Papua. Penduduk Tosaren menganut aliran kepercayaan yang beragam, meliputi: islam, katolik, kristen, hindu, dan budha.

Jumlah penduduk Tosaren dapat dilihat dari klasifikasi lain. Jumlah penduduk Tosaren menurut tingkat pendidikan, antara lain:

Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
TK dan Kelompok bermain anak	340
SD	2.705
SMP	1.626
SMA	2.273
D-I	22

D-2	10
D-3	17
S-1	380
S-2	6
S-3	1

Sumber: Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tosaren (2014)

Data di atas merupakan total dari penduduk yang sudah tamat maupun sedang menyelesaikan pendidikan sesuai tingkatannya masing-masing. Jumlah penduduk

Tosaren berdasarkan mata pencaharian pokok yaitu:

Tabel 5.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok

Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
Petani	60	POLRI	6
Buruh tani	15	Pengusaha UKM	12
Buruh migran	13	Dosen swasta	2
Pegawai negeri sipil	102	Seniman/artis	2
Pengrajin	20	Pedagang keliling	6
Peternak	3	PRT	7
Montir	15	Dukun tradisional	6
Dokter swasta	2	Arsitektur/desainer	1
Perawat swasta	3	Karyawan swasta	100
Bidan swasta	2	Karyawan BUMN	50
TNI	27	Pensiunan	22

Sumber: Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tosaren (2014)

5.1.2 Gambaran Umum Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diteliti meliputi: jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan mata pencaharian. Jumlah responden yang menjadi sampel penelitian sebesar 98 responden. Deskripsi responden sesuai karakteristik dapat dijelaskan seperti berikut :

a) Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5.3 Frekuensi Responden Sesuai Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	60	61,2
Perempuan	38	38,8

Total	98	100
-------	----	-----

Sumber: Lampiran 6

Sehubungan tabel di atas, maka mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 60 orang (61,2%). Responden perempuan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 38 orang (38,8%).

b) Jumlah Responden Berdasarkan Umur

Tabel 5.4 Frekuensi Responden Sesuai Umur

Interval Umur	Frekuensi	Persentase (%)
11 – 20 th	4	4,1
21 – 30 th	17	17,3
31 – 40 th	26	26,5
41 – 50 th	21	21,4
51 – 60 th	19	19,4
61 – 70 th	8	8,2
71 – 80 th	3	3,1
Total	98	100

Sumber: Lampiran 6

Sehubungan tabel di atas, maka mayoritas responden yang terlibat dalam penelitian ialah berumur 31-40 th sebanyak 26 orang (26,5%). Responden berumur 11-20 th sebanyak 4 orang. Responden berumur 21-30 th sebanyak 17 orang. Responden berumur 41-50 th sebanyak 21 orang. Responden berumur 51-60 th sebanyak 19 orang. Responden berumur 61-70 th sebanyak 8 orang. Responden berumur 71-80 th sebanyak 3 orang.

c) Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 5.5 Frekuensi Responden Sesuai Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SD	22	22,4
SMP	18	18,4
SMA / SMK	51	52,0
S1	7	7,1
Total	98	100

Sumber: Lampiran 6



Sehubungan tabel di atas, maka mayoritas pendidikan terakhir responden yang terlibat dalam penelitian ialah SMA/SMK sebanyak 51 orang (52%). Responden dengan pendidikan akhir SD sebanyak 22 orang. Responden dengan pendidikan akhir SMP sebanyak 18 orang. Responden dengan pendidikan akhir S1 sebanyak 7 orang.

d) Jumlah Responden Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 5.6 Frekuensi Responden Sesuai Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Frekuensi	Persentase (%)
PNS	2	2,0
Karyawan swasta	29	29,6
Wiraswasta	27	27,6
Guru	2	2,0
Petani	4	4,1
Ibu Rumah Tangga	17	17,3
Mahasiswa	2	2,0
Pensiun	2	2,0
Lainnya	13	13,3
Total	98	100

Sumber: Lampiran 6

Sehubungan tabel di atas, maka mayoritas mata pencaharian responden yang terlibat dalam penelitian ialah karyawan swasta sebanyak 29 orang (29,6%). Pekerjaan responden sebagai PNS sebanyak 2 orang. Pekerjaan responden sebagai wiraswasta sebanyak 27 orang. Pekerjaan responden sebagai guru sebanyak 2 orang. Pekerjaan responden sebagai petani sebanyak 4 orang. Pekerjaan responden sebagai ibu rumah tangga sebanyak 17 orang. Pekerjaan responden sebagai mahasiswa sebanyak 2 orang. Responden yang sudah pensiun sebanyak 2 orang dan lain-lain sebanyak 13 orang. Pekerjaan lain-lain dari responden meliputi: kuli bangunan, kuli sampah, tukang becak, dan sebagainya.

5.1.3 Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Derajat partisipasi masyarakat dapat diukur menggunakan tangga partisipasi. Tangga partisipasi yang menjadi indikator dari variabel bebas X_1 (derajat partisipasi masyarakat) yaitu: *informing*, *consultation*, *placation*, dan *partnership*. Setiap indikator mempunyai item pernyataan. Total item pernyataan dari variabel derajat partisipasi masyarakat terdapat 5 butir. Skor tiap item penelitian diukur dengan menggunakan skala likert. Skor maksimum jawaban responden adalah sebesar 5 poin. Skor minimum jawaban responden adalah sebesar 1 poin. Skor item penelitian dapat diinterpretasikan berdasarkan lima kategori, yaitu: sangat negatif, negatif, netral, positif, dan sangat positif. Interval tiap kategori ialah $[(5-1)/5]=0,8$. Interpretasi item penelitian dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.7 Interpretasi Skor Item Penelitian

Nilai Skor	Interpretasi
$1 < NS \leq 1,8$	Sangat Negatif
$1,8 < NS \leq 2,6$	Negatif
$2,6 < NS \leq 3,4$	Netral
$3,4 < NS \leq 4,2$	Positif
$4,2 < NS \leq 5$	Sangat Positif

Peneliti menggunakan analisa statistik deskriptif untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil uji analisa deskriptif dari variabel derajat partisipasi masyarakat (x_1) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8 Analisa Deskriptif Variabel Derajat Partisipasi Masyarakat

Jawaban Responden

Item Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Rata-rata Skor
	F	%	F	%	F	%	F	%	f	%	
X _{1,1}	31	31,6	37	37,8	27	27,6	3	3,1	0	0	3,98
X _{1,2}	31	31,6	59	60,2	8	8,2	0	0	0	0	4,23
X _{1,3}	15	15,3	45	45,9	28	28,6	10	10,2	0	0	3,66
X _{1,4,1}	25	25,5	61	62,2	12	12,2	0	0	0	0	4,13
X _{1,4,2}	37	37,8	56	57,1	5	5,1	0	0	0	0	4,33
Rata-rata variabel											4,07

Sumber: Lampiran 5

Sehubungan hasil analisa deskriptif variabel derajat partisipasi masyarakat, maka secara umum responden memberikan penilaian positif dengan rata-rata variabel sebesar 4,07. Nilai rata-rata variabel tersebut mengindikasikan mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pengaruh derajat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Persepsi responden dapat dikelompokkan sesuai item pernyataan berikut ini:

- a) Rata-rata skor item X_{1,1} ialah 3,98. Rata-rata skor item X_{1,1} menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item X_{1,1} (informing).
- b) Rata-rata skor item X_{1,2} ialah 4,23. Rata-rata skor item X_{1,2} menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item X_{1,2} (consultation).
- c) Rata-rata skor item X_{1,3} ialah 3,66. Rata-rata skor item X_{1,3} menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item X_{1,3} (placation).



d) Rata-rata skor item $X_{1,4,1}$ ialah 4,13. Rata-rata skor item $X_{1,4,1}$ menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item $X_{1,4,1}$ (partnership_item1).

e) Rata-rata skor item $X_{1,4,2}$ ialah 4,33. Rata-rata skor item $X_{1,4,2}$ menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi sangat positif pada item $X_{1,4,2}$ (partnership_item2).

5.1.4 Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk memberdayakan warga di bidang infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Tiga tujuan program pemberdayaan menjadi indikator dari variabel terikat Y (pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat). Setiap indikator mempunyai item pertanyaan. Total item pertanyaan dari variabel pelaksanaan PRODAMAS terdapat 3 butir. Deskriptif variabel pelaksanaan PRODAMAS (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9 Analisa Deskriptif Variabel Pelaksanaan PRODAMAS

Item Pernyataan	Jawaban Responden										Rata-rata Skor
	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		
	F	%	F	%	F	%	f	%	f	%	
Y ₁	50	51,0	42	42,9	6	6,1	0	0	0	0	4,45
Y ₂	11	11,2	34	34,7	40	40,8	12	12,2	1	1,0	3,43
Y ₃	47	48,0	48	49,0	2	2,0	1	1,0	0	0	4,44
Rata-rata variabel											4,11

Sumber: Lampiran 5

Sehubungan hasil analisa deskriptif variabel pelaksanaan PRODAMAS, maka secara umum responden memberikan penilaian positif dengan rata-rata



variabel sebesar 4,11. Nilai rata-rata variabel tersebut mengindikasikan mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Persepsi responden dapat dikelompokkan sesuai item pertanyaan berikut ini :

- a) Rata-rata skor item Y_1 ialah 4,45. Rata-rata skor item Y_1 menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi sangat positif pada item Y_1 (infrastruktur).
- b) Rata-rata skor item Y_2 ialah 3,43. Rata-rata skor item Y_2 menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item Y_2 (ekonomi).
- c) Rata-rata skor item Y_3 ialah 4,44. Rata-rata skor item Y_3 menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi sangat positif pada item Y_3 (sosial).

5.1.5 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Peran dan partisipasi masyarakat merupakan objek utama dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat menjadi objek pembangunan karena dapat membawa perubahan dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat terwujud, jika terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang turut berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dapat dideskripsikan seperti berikut :

5.1.5.1 Faktor Internal yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Variabel faktor internal memiliki 3 indikator yaitu: intensitas keterlibatan, pengetahuan, dan motivasi. Setiap indikator mempunyai item pernyataan. Total item pernyataan dari variabel derajat partisipasi masyarakat terdapat 3 butir. Deskriptif variabel faktor internal (X_2) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10 Analisa Deskriptif Variabel Faktor Internal

Item Pernyataan	Jawaban Responden										Rata-rata Skor
	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		
	F	%	F	%	F	%	f	%	f	%	
X _{2,1}	30	30,6	31	31,6	28	28,6	9	9,2	0	0	3,84
X _{2,2}	18	18,4	53	54,1	22	22,4	5	5,1	0	0	3,86
X _{2,3}	21	21,4	45	45,9	25	25,5	7	7,1	0	0	3,82
Rata-rata variabel											3,84

Sumber: Lampiran 5

Sehubungan hasil analisa deskriptif variabel faktor internal, maka secara umum responden memberikan penilaian positif dengan rata-rata variabel sebesar 3,84. Nilai rata-rata variabel tersebut mengindikasikan mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pengaruh faktor internal dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Persepsi responden dapat dikelompokkan sesuai item pernyataan berikut ini :

- a) Rata-rata skor item X_{2,1} ialah 3,84. Rata-rata skor item X_{2,1} menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item X_{2,1} (intensitas keterlibatan).

b) Rata-rata skor item $X_{2.2}$ ialah 3,86. Rata-rata skor item $X_{2.2}$ menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item $X_{2.2}$ (pengetahuan).

c) Rata-rata skor item $X_{2.3}$ ialah 3,82. Rata-rata skor item $X_{2.3}$ menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item $X_{2.3}$ (motivasi).

5.1.5.2 Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Variabel faktor eksternal memiliki 2 indikator yaitu: kepemimpinan dan komunikasi. Setiap indikator mempunyai item pernyataan. Total item pernyataan dari variabel faktor eksternal terdapat 10 butir. Deskriptif variabel faktor eksternal (x_3) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.11 Analisa Deskriptif Variabel Faktor Eksternal

Item Pernyataan	Jawaban Responden										Rata-rata Skor
	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		
	f	%	F	%	F	%	f	%	f	%	
$X_{3.1.1}$	31	31,6	61	62,2	5	5,1	1	1,0	0	0	4,24
$X_{3.1.2}$	41	41,8	53	54,1	4	4,1	0	0	0	0	4,38
$X_{3.1.3}$	30	30,6	58	59,2	10	10,2	0	0	0	0	4,20
$X_{3.1.4}$	33	33,7	59	60,2	6	6,1	0	0	0	0	4,28

X _{3.1.5}	28	28,6	60	61,2	10	10,2	0	0	0	0	4,18
X _{3.1.6}	32	32,7	57	58,2	9	9,2	0	0	0	0	4,23
X _{3.2.1}	28	28,6	59	60,2	5	5,1	6	6,1	0	0	4,11
X _{3.2.2}	17	17,3	66	67,3	9	9,2	6	6,1	0	0	3,96
X _{3.2.3}	16	16,3	64	65,3	12	12,2	6	6,1	0	0	3,92
X _{3.2.4}	15	15,3	57	58,2	26	26,5	0	0	0	0	3,89
Rata-rata variabel											4,14

Sumber: Lampiran 5

Sehubungan hasil analisa deskriptif variabel faktor eksternal, maka secara umum responden memberikan penilaian positif dengan rata-rata variabel sebesar 4,14. Nilai rata-rata variabel tersebut mengindikasikan mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pengaruh faktor eksternal dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Persepsi responden dapat dikelompokkan sesuai item pernyataan berikut ini :

- a) Rata-rata skor item X_{3.1.1} ialah 4,24. Rata-rata skor item X_{3.1.1} menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item X_{3.1.1} (kepemimpinan_item1).
- b) Rata-rata skor item X_{3.1.2} ialah 4,38. Rata-rata skor item X_{3.1.2} menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi sangat positif pada item X_{3.1.2} (kepemimpinan_item2).
- c) Rata-rata skor item X_{3.1.3} ialah 4,20. Rata-rata skor item X_{3.1.3} menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item X_{3.1.3} (kepemimpinan_item3).



d) Rata-rata skor item $X_{3,1,4}$ ialah 4,28. Rata-rata skor item $X_{3,1,4}$ menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi sangat positif pada item $X_{3,1,4}$ (kepemimpinan_item4).

e) Rata-rata skor item $X_{3,1,5}$ ialah 4,18. Rata-rata skor item $X_{3,1,5}$ menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item $X_{3,1,5}$ (kepemimpinan_item5).

f) Rata-rata skor item $X_{3,1,6}$ ialah 4,23. Rata-rata skor item $X_{3,1,6}$ menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item $X_{3,1,6}$ (kepemimpinan_item6).

g) Rata-rata skor item $X_{3,2,1}$ ialah 4,11. Rata-rata skor item $X_{3,2,1}$ menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item $X_{3,2,1}$ (komunikasi_item1).

h) Rata-rata skor item $X_{3,2,2}$ ialah 3,96. Rata-rata skor item $X_{3,2,2}$ menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item $X_{3,2,2}$ (komunikasi_item2).

i) Rata-rata skor item $X_{3,2,3}$ ialah 3,92. Rata-rata skor item $X_{3,2,3}$ menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item $X_{3,2,3}$ (komunikasi_item3).

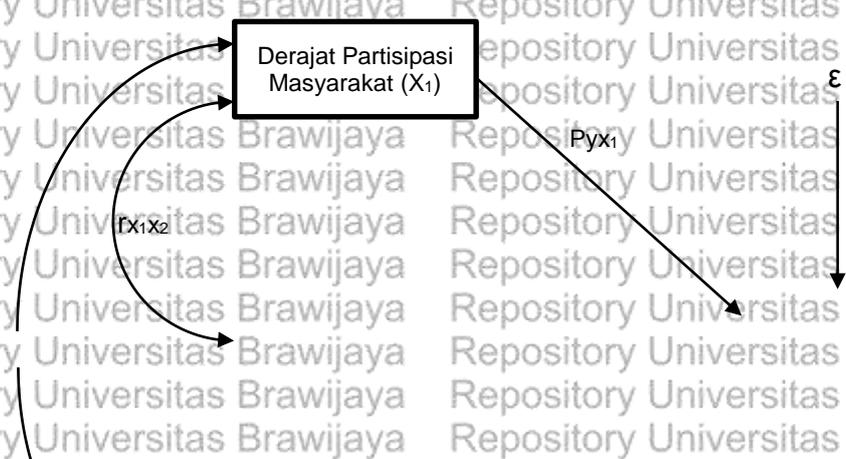
j) Rata-rata skor item $X_{3,2,4}$ ialah 3,89. Rata-rata skor item $X_{3,2,4}$ menunjukkan rata-rata responden memiliki persepsi positif pada item $X_{3,2,4}$ (komunikasi_item4).

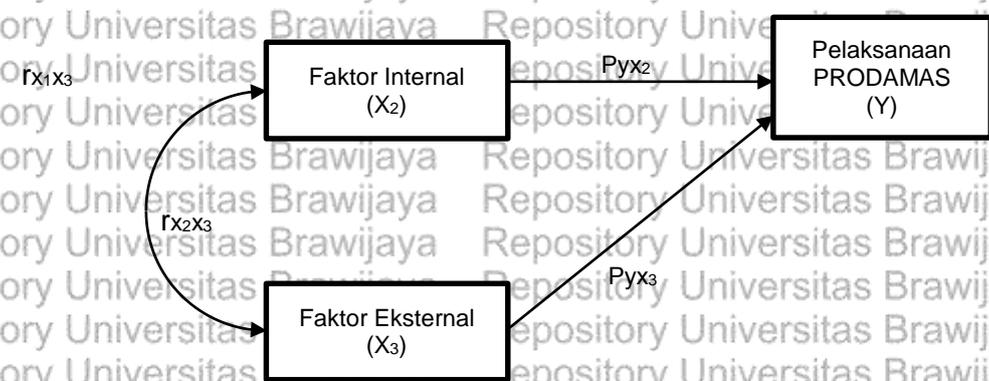
5.1.6 Pengaruh Derajat Partisipasi Masyarakat, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal Secara Bersama-sama Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Proses uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisa jalur. Analisa jalur bertujuan untuk menganalisa hubungan sebab akibat yang ditimbulkan oleh pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisa jalur merupakan bentuk lain dari analisa regresi yang standar. Koefisien jalur yang distandarkan (*standardized path coefficient*) digunakan untuk memaparkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari: derajat partisipasi masyarakat (X_1), faktor internal (X_2), dan faktor eksternal (X_3), serta variabel terikat yaitu: pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (Y).

Tahap-tahap analisa yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

A. Membuat diagram jalur





Gambar 5.1 Diagram Analisa Jalur

B. Hasil korelasi

Hasil korelasi berguna untuk menganalisa hubungan antar variabel bebas. Analisa hubungan antar variabel bebas dapat memberikan interpretasi tentang erat atau tidaknya hubungan variabel bebas, dan arah hubungan antar variabel bebas. Berdasarkan hasil analisa jalur, maka angka korelasi yang dihasilkan sebagai berikut :

Tabel 5.12 Hasil Korelasi

Hubungan	Angka Korelasi	Sig.
X ₁ - X ₂	0,709	0,000
X ₁ - X ₃	0,490	0,000
X ₂ - X ₃	0,255	0,011

Sumber: Lampiran 8

Sehubungan dengan tabel hasil korelasi, maka angka korelasi tersebut menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan searah. Interpretasi hubungan korelasi antar variabel bebas dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

- 1) Korelasi antara derajat partisipasi masyarakat (X₁) dan faktor internal (X₂)

Angka korelasi yang dihasilkan antara derajat partisipasi masyarakat dan faktor internal ialah 0,709. Angka korelasi tersebut menunjukkan hubungan antara variabel derajat partisipasi masyarakat dan faktor internal dapat diinterpretasikan secara kuat dan searah.

Kedua variabel mengindikasikan hubungan korelasi yang signifikan, karena mengandung angka sig. $0,000 < 0,05$.

2) Korelasi antara faktor internal (X_2) dan faktor eksternal (X_3)

Angka korelasi yang dihasilkan antara faktor internal dan faktor eksternal ialah 0,255. Angka korelasi tersebut menunjukkan hubungan antara variabel faktor internal dan faktor eksternal dapat diinterpretasikan secara cukup kuat dan searah. Kedua variabel mengindikasikan hubungan korelasi yang signifikan, karena mengandung angka sig. $0,011 < 0,05$.

3) Korelasi antara derajat partisipasi masyarakat (X_1) dan faktor eksternal (X_3)

Angka korelasi yang dihasilkan antara derajat partisipasi masyarakat dan faktor eksternal ialah 0,490. Angka korelasi tersebut menunjukkan hubungan antara variabel derajat partisipasi masyarakat dan faktor eksternal dapat diinterpretasikan secara cukup kuat dan searah. Kedua variabel mengindikasikan hubungan korelasi yang signifikan, karena mengandung angka sig. $0,000 < 0,05$.

C. Hasil regresi



1) Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5.13 Koefisien Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,534 ^a	,286	,263	1,193

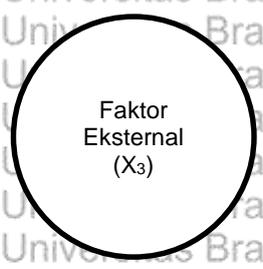
Sumber: Lampiran 7

Sehubungan dengan tabel di atas, maka angka koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh adalah 0,286. Angka R^2 tersebut menunjukkan besarnya pengaruh variabel derajat partisipasi masyarakat (X_1), faktor internal (X_2), dan faktor eksternal (X_3) secara bersama-sama terhadap variabel pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (Y) sebesar 28,6%, dan sisanya sebesar 71,4% dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

2) Uji F (secara bersama-sama)

Pengujian secara bersama-sama bertujuan mengetahui apakah variabel bebas berkontribusi secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Semua koefisien variabel bebas secara bersama-sama diuji menggunakan uji F atau anova. Berdasarkan hasil analisa jalur, maka uji F yang diperoleh ialah:





Gambar 5.2 Model Hipotesis Pertama

Hipotesis yang digunakan untuk menguji variabel secara bersama-sama sebagai berikut :

Tabel 5.14 Uji Hipotesis Secara Bersama-sama

	Hipotesis	Nilai	Keputusan
H ₀	Derajat partisipasi masyarakat, faktor internal, dan faktor eksternal tidak berkontribusi secara bersama-sama dan signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.	F _{hitung} = 12,525 sig. 0,000 F _{tabel} = 2,701	F _{hitung} > F _{tabel} , maka H ₀ ditolak, dan H _a diterima
H _a	Derajat partisipasi masyarakat, faktor internal, dan faktor eksternal berkontribusi secara bersama-sama dan signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.		

Sumber: Lampiran 7

Sehubungan tabel di atas, maka dalam tabel distribusi F diperoleh F_{tabel} dengan *degrees of freedom* (df) n₁ = 3, dan n₂ = 94 sebesar 2,701.

Jika F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel}, maka diperoleh hasil perhitungan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel}. Nilai p-value yang dihasilkan sebesar 0,000. Jika nilai p-value dibandingkan dengan α = 0,05, maka diperoleh hasil perhitungan nilai p-value lebih kecil dari α = 0,05.

Kedua kriteria telah menghasilkan keputusan H_0 ditolak dan H_a diterima pada taraf sig. $\alpha = 0,05$. Keputusan menyatakan bahwa derajat partisipasi masyarakat, faktor internal, dan faktor eksternal berkontribusi secara bersama-sama dan signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

5.1.7 Pengaruh Derajat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Uji hipotesis dengan uji t berguna untuk menganalisa pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengujian melalui uji t dapat menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan hasil analisa jalur, maka pengaruh variabel derajat partisipasi masyarakat (X_1) terhadap variabel pelaksanaan PRODAMAS (Y) ialah:



Gambar 5.3 Model Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis variabel derajat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.15 Uji Hipotesis Variabel Derajat Partisipasi Masyarakat

	Hipotesis	Nilai	Keputusan
H_0	derajat partisipasi masyarakat tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.	$t_{hitung} = -0,820$ sig. 0,414 $t_{tabel} = 1,984$	$t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima,
H_a	derajat partisipasi masyarakat berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.	$\beta = -0,114$	dan H_a ditolak

Sumber: Lampiran 7

Sehubungan tabel di atas, maka dalam tabel distribusi t diperoleh t_{tabel} dengan *degrees of freedom* (df) $n_1 = 96$ sebesar 1,984. Jika t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} , maka diperoleh hasil perhitungan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} . Nilai ρ -value yang dihasilkan sebesar 0,414. Jika nilai ρ -value dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, maka diperoleh hasil perhitungan nilai ρ -value lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Kedua kriteria telah menghasilkan keputusan H_0 diterima dan H_a ditolak pada taraf sig. $\alpha = 0,05$. Keputusan menyatakan bahwa derajat partisipasi masyarakat, tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan besarnya nilai yang tidak berpengaruh ialah $\beta = -0,114$.

5.1.8 Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

5.1.10.1 Pengaruh Faktor Internal Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Uji hipotesis dengan uji t berguna untuk menganalisa pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengujian melalui uji t dapat menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh yang

signifikan antaa variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan hasil analisa jalur, maka pengaruh variabel faktor internal (X_2) terhadap variabel pelaksanaan PRODAMAS (Y) ialah:



Gambar 5.4 Model Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis variabel faktor internal terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.16 Uji Hipotesis Variabel Faktor Internal

	Hipotesis	Nilai	Keputusan
H_0	Faktor internal tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.	$t_{hitung} = 0,924$ sig. 0,358	$t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0
H_a	Faktor internal berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.	$t_{tabel} = 1,984$ $\beta = 0,116$	diterima, dan H_a ditolak

Sumber: Lampiran 7

Sehubungan tabel di atas, maka dalam tabel distribusi t diperoleh t_{tabel} dengan *degrees of freedom* (df) $n_1 = 96$ sebesar 1,984.

Jika t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} , maka diperoleh hasil perhitungan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} . Nilai p-value yang dihasilkan sebesar 0,358.

Jika nilai p-value dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, maka diperoleh hasil perhitungan nilai p-value lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Kedua kriteria telah menghasilkan keputusan H_0 diterima dan H_a ditolak pada taraf sig. $\alpha = 0,05$. Keputusan menyatakan bahwa faktor internal tidak berkontribusi

secara signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan besarnya nilai yang tidak berpengaruh ialah $\beta = 0,116$.

5.1.10.2 Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Uji hipotesis dengan uji t berguna untuk menganalisa pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengujian melalui uji t dapat menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan hasil analisa jalur, maka pengaruh variabel faktor eksternal (X_3) terhadap variabel pelaksanaan PRODAMAS (Y) ialah:



Gambar 5.5 Model Hipotesis Keempat

Pengujian hipotesis variabel faktor eksternal terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.17 Uji Hipotesis Variabel Faktor Eksternal

Hipotesis	Nilai	Keputusan
-----------	-------	-----------

H ₀	Faktor eksternal tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.	t _{hitung} = 5,476 sig. 0,000	t _{hitung} > t _{tabel} , maka H ₀ ditolak, dan H _a diterima
H _a	Faktor eksternal berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.	t _{tabel} = 1,984 β = 0,554	

Sumber: Lampiran 7

Sehubungan tabel di atas, maka dalam tabel distribusi t diperoleh t_{tabel} dengan *degrees of freedom* (df) n₁ = 96 sebesar 1,984.

Jika t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel}, maka diperoleh hasil perhitungan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}. Nilai p-value yang dihasilkan sebesar 0,000.

Jika nilai p-value dibandingkan dengan α = 0,05, maka diperoleh hasil perhitungan nilai p-value lebih kurang dari α = 0,05. Kedua kriteria telah menghasilkan keputusan H₀ ditolak dan H_a diterima pada taraf sig.

α = 0,05. Keputusan menyatakan bahwa faktor eksternal berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan besarnya nilai yang berpengaruh ialah β = 0,554.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi tanda adanya bentuk sistem perencanaan yang sesuai pendekatan *bottom-up*. Tata cara perencanaan pembangunan yang *bottom-up* dapat menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan publik yang belum terpenuhi. Salah satu bentuk perencanaan secara *bottom-up* ialah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan tempat bertemunya antara



pemerintah dan masyarakat untuk berdiskusi bersama demi menentukan masa depan. Musyawarah perencanaan pembangunan dilakukan mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Setiap wilayah dan jenjang pemerintahan selalu mengadakan musrenbang untuk membahas rencana-rencana strategis dalam proses pembangunan, tidak terkecuali di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

Kelurahan Tosaren telah mengadakan musrenbang tingkat desa/kelurahan sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Musrenbang yang diadakan oleh pihak Kelurahan telah dilakukan hingga level dusun dan lingkungan (RT). Masyarakat Tosaren turut dihadirkan dan dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan. Jumlah masyarakat Tosaren yang hadir dalam musrenbang mencapai 90% dari total undangan. Mayoritas peserta musrenbang dengan presentase 70% berjenis kelamin laki-laki dan sisanya ialah perempuan.

Kelurahan Tosaren menggunakan profil desa/kelurahan dan pelibatan masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan partisipatif dan musrenbang. Usulan-usulan masyarakat juga menjadi bahan referensi khusus rencana pembangunan wilayah Tosaren. Usulan masyarakat yang telah disetujui dan menjadi rencana kerja desa/kelurahan mencapai presentase sebesar 50%.

Musrenbang Kelurahan Tosaren juga membahas usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kota, provinsi dan pusat. Usulan-usulan tersebut bertujuan untuk dilaksanakan oleh Masyarakat Tosaren dibantu lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan setempat. Beberapa usulan masyarakat yang tidak dapat direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kab./Kota dan Provinsi sebanyak 2



kegiatan dan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil musrenbang sebanyak 1 kegiatan.

Masyarakat Tosaren tidak hanya dilibatkan dalam proses musrenbang. Masyarakat dihimbau agar terlibat saat pelaksanaan dan mampu menjaga kelestarian hasil pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hasil musrenbang mencapai 90% berdasarkan data perkembangan kependudukan Kelurahan Tosaren. Dana pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan sesuai jenjang pemerintahan diantaranya, dari APB Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 4 kegiatan; APBD Provinsi sebanyak 1 kegiatan; dan APBN sebanyak 2 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat direalisasikan melalui musrenbang, maka masyarakat Tosaren dapat menyampaikan usulannya dengan program lain.

Program lain dari Pemerintah Kota Kediri yang dapat mewujudkan kebutuhan publik yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS). Kehadiran Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tosaren, telah membuat masyarakat menjadi sering mengadakan kegiatan rembug warga secara rutin. Masyarakat dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. Program Pemberdayaan Masyarakat menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Kediri dan perangkat Kelurahan Tosaren untuk mengetahui kebutuhan yang belum terpenuhi. Pemerintah dan perangkat kelurahan juga dapat mengukur seberapa besar derajat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil penelitian terhadap responden yang menjadi pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tosaren menunjukkan bahwa derajat



partisipasi masyarakat berada pada anak tangga *partnership* (kemitraan), apabila dikaitkan dengan tangga partisipasi (*ladder of participation*) yang dibuat oleh Arnstein. Berikut ini adalah penjelasan derajat partisipasi masyarakat di Kelurahan Tosaren sesuai posisi anak tangga partisipasi :

a) Pada anak tangga *informing* :

Mayoritas responden menjawab setuju. Responden mengakui bahwa masyarakat terlibat rebug warga dan berhak menyampaikan pendapat maupun gagasan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, meskipun masyarakat tidak dilibatkan saat pembuatan keputusan.

b) Pada anak tangga *consultation* :

Mayoritas responden menjawab setuju. Responden mengakui bahwa masyarakat dapat melakukan konsultasi tentang usulan kegiatan maupun program yang belum dipahami kepada pemerintah dan perangkat kelurahan. Pemerintah dan perangkat kelurahan memberikan tanggapan terhadap setiap pertanyaan dan usulan kegiatan masyarakat.

c) Pada anak tangga *placation* :

Mayoritas responden menjawab setuju. Responden mengakui bahwa masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan terlibat dalam membuat keputusan saat rebug warga, tetapi pemegang keputusan tertinggi tetap berada pada ketua RT, PPTK, dan pendamping, maupun level pemerintahan yang lebih tinggi.

d) Pada anak tangga *partnership* :



Mayoritas responden menjawab setuju. Responden mengakui bahwa masyarakat sudah menjadi mitra kerja pemerintah dan diperbolehkan membuat keputusan atas kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan melalui rembuk warga maupun negosiasi dengan perangkat kelurahan, tim PPTK, dan pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Tosaren ternyata tidak hanya sekedar rembuk warga yang bersifat formalitas. Masyarakat Tosaren menggunakan Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai pilihan alternatif untuk membangun dan memenuhi kebutuhan bersama yang belum tersedia di wilayah RT-nya. Semua usulan yang diajukan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat adalah hasil dari aspirasi masyarakat.

Pemerintah dan perangkat kelurahan hanya sebagai penyedia anggaran dan tim verifikasi. Hal ini diperkuat dengan keterangan responden berinisial PL yang mengatakan, “keputusan tertinggi bukan dari pemerintah maupun ketua RT. Tapi hasil rembuk warga bersama merupakan keputusan tertinggi dalam PRODAMAS”.

Usulan-usulan masyarakat yang sudah dibahas pada rembuk warga, selanjutnya disusun menjadi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Program Pemberdayaan Masyarakat. Substansi dari rencana kegiatan anggaran meliputi: cek list, back up pekerjaan, dan perhitungan analisa / biaya. Menurut DK, “RKA / DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ini menjadi pedoman warga selama pelaksanaan PRODAMAS pada tahun anggaran tersebut. RKA / DPA ini semua dari usulan warga yang sudah disepakati sebelumnya”. Rencana kegiatan anggaran dibuat oleh pendamping dan ketua RT bersangkutan. Menurut Conyers, manfaat dari adanya

partisipasi masyarakat adalah dapat menjadi alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Masyarakat akan lebih dapat percaya terhadap proyek atau program pembangunan yang sedang dilakukan, apabila masyarakat dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Kediri melalui Program Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam perspektif administrasi pembangunan. Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Unsur administrasi dalam perspektif administrasi pembangunan tersebut dapat diindikasikan melalui kegiatan rembug warga yang rutin dilakukan masyarakat selama proses perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Masyarakat yang peduli dan sadar terhadap lingkungan RT-nya, maka akan lebih mudah untuk turut berpartisipasi melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat mengindikasikan pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana, dan melembaga.

Pembangunan dianggap sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

5.2.2 Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat



Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) merupakan suatu program dari Pemerintah Kota Kediri yang berguna untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat berbasis wilayah Rukun Tetangga (RT). Program Pemberdayaan Masyarakat sering dikenal oleh warga, dengan istilah 'program 50 juta / RT tiap tahun'. Program Pemberdayaan Masyarakat memiliki visi untuk dapat mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mempunyai maksud yaitu peningkatan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan. Tujuan dari adanya Program Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a) Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
- b) Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c) Meningkatkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
- d) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial;
- f) Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat menganut prinsip-prinsip, meliputi: transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Prinsip transparan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat menggambarkan semua

kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara mudah dan terbuka di wilayah RT. Prinsip partisipatif dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mengartikan seluruh anggota masyarakat di wilayah RT berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan dengan berpegang teguh bahwa rembug warga sebagai pengambilan keputusan tertinggi. Prinsip akuntabel yang terkandung dalam Program Pemberdayaan Masyarakat berarti seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Prinsip berkelanjutan yang dianut Program Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkesinambungan.

Program Pemberdayaan Masyarakat memiliki sasaran pelaksanaan di wilayah kelurahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dan perencanaan secara berjenjang. Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan secara berjenjang terdiri dari : pengusulan dari tingkat RT; sinkronisasi usulan perencanaan tingkat RT oleh ketua RW yang bersangkutan; perencanaan tingkat kelurahan; perencanaan tingkat kecamatan; dan perencanaan tingkat kota. Mekanisme pengusulan setiap tingkatan telah dijabarkan sebagai berikut :

- I. Mekanisme pengusulan di tingkat RT terdiri dari:
 - a) Ketua RT melakukan sosialisasi Prodamas dan menginventarisasi / mendata usulan kegiatan berdasarkan hasil rembug warga;



b) Membuat berita acara rembug warga yang ditandatangani oleh ketua RT, sekretaris, unsur warga, dan dilampiri daftar hadir peserta rembug warga.

c) Ketua RT menyampaikan usulan kegiatan atau pengadaan barang hasil rembug warga berdasarkan urutan prioritas yang memuat jenis kegiatan / pekerjaan dan volume kegiatan / pekerjaan dilengkapi dengan berita acara rembug warga yang ditujukan kepada Walikota c.q. Lurah setempat.

III. Mekanisme pengusulan di tingkat kelurahan meliputi :

a) Kasi ekonomi dan pembangunan atau pejabat yang ditunjuk oleh Lurah menghimpun, memverifikasi dan menyusun daftar rekapitulasi kegiatan berdasarkan skala prioritas dari seluruh usulan kegiatan RT;

b) Lurah menetapkan daftar rekapitulasi kegiatan dari masing-masing RT untuk diteruskan ke Tim Koordinasi Prodamas di tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi Prodamas di Tingkat Kota;

c) Kasi ekonomi dan pembangunan atau pejabat yang ditunjuk oleh Lurah menyusun RKA kegiatan di masing-masing wilayah RT.

III. Mekanisme pengusulan di tingkat kecamatan meliputi :

a) Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kecamatan mengkoordinasikan seluruh rencana kegiatan di masing-masing kelurahan di dalam wilayah kerjanya;

b) Camat selaku Ketua Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kecamatan merekap seluruh rencana definitif dari masing-masing kelurahan di



dalam wilayah kerjanya untuk diteruskan ke Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota.

IV. Mekanisme pengusulan di tingkat kota meliputi :

- a) Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota mengkoordinasikan seluruh rencana kegiatan di masing-masing kecamatan;
- b) Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota merekap seluruh rencana definitif dari masing-masing kecamatan untuk dijadikan bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Program Pemberdayaan Masyarakat mempunyai alokasi anggaran tersendiri, supaya setiap perencanaan dan usulan dapat direalisasikan. Alokasi anggaran yang diberikan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat kepada setiap RT sebesar Rp 50 juta / per tahun. Alokasi anggaran diperoleh melalui belanja langsung yang dituangkan dalam kode rekening belanja program dan kegiatan dalam RKA / DPA SKPD kelurahan yang terinci per-RT. Alokasi dana Program

Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk :

- 1) Biaya umum di tingkat RT setinggi-tingginya 1% dari pagu dana Prodamas untuk mendukung administrasi pelaksanaan Prodamas;
- 2) Biaya kegiatan, meliputi: bidang infrastruktur/lingkungan, bidang ekonomi, dan bidang sosial.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan bidang infrastruktur yaitu minimal 60% dari pagu dana Prodamas dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai. Kegiatan bidang infrastruktur bertujuan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum. Kegiatan bidang ekonomi bertujuan untuk penyediaan



sarana dan prasarana ekonomi untuk kelompok usaha bersama dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai. Kegiatan bidang sosial bertujuan untuk penyelesaian permasalahan sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial di masyarakat dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai.

Masyarakat dapat menyampaikan usulan-usulan yang belum terealisasi melalui Program Pemberdayaan Masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Perangkat Kelurahan Tosaren beserta masyarakat telah menyelenggarakan Program Pemberdayaan Masyarakat selama satu tahun sejak disosialisasikan bulan Maret 2015. Program Pemberdayaan Masyarakat sering dibahas oleh masyarakat saat kegiatan rembug warga. Masyarakat Tosaren mengadakan rembug warga secara rutin tiap satu bulan sekali di wilayah RT masing-masing. Rembug warga Tosaren lebih dikenal dengan istilah arisan bapak-bapak. Arisan bapak-bapak dihadiri oleh warga, ketua RT, tim pendamping, dan perwakilan kelurahan (PPTK/Carik/Lurah).

Agenda kegiatan arisan bapak-bapak pada awal tahun yaitu membahas usulan-usulan Program Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Agenda kegiatan arisan bapak-bapak pada bulan-bulan berikutnya ialah membahas pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang telah disetujui dan evaluasi hasil pelaksanaan. Menurut UA, "sejauh ini usulan yang paling banyak diajukan itu membuat pos kamling, paving, dan saluran drainase".

Minat masyarakat yang sebagian besar lebih mengusulkan pada bidang infrastruktur, ternyata mengindikasikan bahwa pembangunan melalui Program



Pemberdayaan Masyarakat sebagai *culture specific, situation specific, and time specific*.

Masyarakat di Kelurahan Tosaren tidak hanya terlibat dalam proses perencanaan. Masyarakat juga turut dilibatkan dalam proses belanja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun sarana infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Masyarakat membeli bahan-bahan didampingi oleh PPTK dan ketua RT. Pelibatan masyarakat dalam pembelian bahan baku bertujuan agar tidak terjadi penyelewengan anggaran dana Program Pemberdayaan Masyarakat maupun bentuk tindakan korupsi lainnya.

Masyarakat di Kelurahan Tosaren membantu pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat secara swadaya. Bentuk swadaya masyarakat Tosaren ialah sumbangan fisik, konsumsi, maupun material tambahan yang dibutuhkan saat pelaksanaan. Bentuk swadaya masyarakat menjadi tanda adanya keterlibatan, partisipasi, dan gotong royong membangun kelurahan bersama-sama. Bentuk swadaya masyarakat Tosaren patut diperhitungkan sebagai kunci keberhasilan pembangunan pada level pemerintahan dari bawah, yaitu tingkat kelurahan.

5.2.3 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Partisipasi

Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah dalam usaha membangun daerahnya memerlukan suatu perencanaan. Perencanaan merupakan wujud perumusan tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh suatu wilayah dengan cara-cara yang efektif. Perencanaan



menjadi alternatif untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis.

Sebagai bagian dari proses pembangunan, maka perencanaan merupakan garis besar dan metode yang dipakai agar tujuan kelompok tercapai. Situasi yang juga patut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan adalah tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri. Situasi yang tertekan ini dapat berpengaruh bagi pemerintah daerah dalam proses pembangunan.

Berbagai praktisi pembangunan telah menggunakan pendekatan pemberdayaan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan pemberdayaan menjadi hal yang penting untuk menghubungkan antara teori dan praktek. Pemberdayaan adalah usaha untuk meningkatkan kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat menjadi unsur utama pemberdayaan. Konsep pemberdayaan yang berorientasi masyarakat menjadi pilihan alternatif dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat disebabkan adanya perkembangan konsep pembangunan yang berdasarkan nilai-nilai masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan selalu mencoba melibatkan partisipasi. Tujuan dilibatkannya partisipasi ialah agar setiap anggota masyarakat dapat turut serta dalam setiap kegiatan pembangunan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat dilihat melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang diusung oleh Pemerintah Kota Kediri. Kehadiran Program Pemberdayaan Masyarakat menjadi bahan rangsangan bagi masyarakat supaya bisa berkreasi membangun wilayahnya sesuai keinginan dan kebutuhan warga bersama-sama. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan sumber dana.



Partisipasi masyarakat selama proses Program Pemberdayaan Masyarakat dapat memberi perubahan dan percepatan pembangunan Kota Kediri. Partisipasi dipahami sebagai bentuk ekspresi Masyarakat Kota Kediri, khususnya di Kelurahan Tosaren dalam proses Program Pemberdayaan Masyarakat. Masyarakat Tosaren yang berpartisipasi dapat disebabkan adanya kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Partisipasi masyarakat di Tosaren dapat terjadi apabila muncul faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Tosaren dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat berasal dari individu tersebut. Pengaruh internal dapat dianalisa melalui intensitas keterlibatan, pengetahuan, dan motivasi. Intensitas keterlibatan masyarakat di Tosaren dapat diketahui melalui kehadirannya saat perencanaan hingga pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Proses perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat diadakan saat rapat rutin yang dihadiri oleh bapak-bapak, ketua RT, dan perangkat kelurahan. Kemampuan masyarakat dalam memahami dan menyumbang ide saat rapat rutin menjadi tolok ukur besarnya pengetahuan rata-rata warga di Tosaren terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat. Kehadiran dan kemampuan masyarakat Tosaren untuk menyampaikan ide dapat didukung dengan adanya motivasi.

Motivasi cenderung muncul dari benak masyarakat, apabila ada peran Ketua RT sebagai pendukung masyarakat. Masyarakat Tosaren membutuhkan seorang pemimpin agar setiap aspirasi yang berkaitan Program Pemberdayaan Masyarakat dapat tersampaikan dan disetujui oleh level pemerintahan di atasnya. Ketua RT



memiliki pola komunikasi terhadap warganya, supaya masyarakat dapat mengerti dan mudah berdiskusi untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan bersama melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. Peran Ketua RT sebagai pemimpin dan pola komunikasi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dari segi eksternal.

5.2.4 Pengaruh Derajat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Sistem perencanaan pembangunan yang berlangsung di Indonesia telah menganut pendekatan *bottom up*. Perencanaan pembangunan secara *bottom up* menjadi pedoman pelaksanaan pada setiap jenjang pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Menurut *Rode* dan *De Smit*, perencanaan secara *bottom up* dipahami sebagai perencanaan yang mencakup proses perumusan tujuan tertentu dan langkah alternatif yang diperlukan melalui musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Prioritas utama dalam musyawarah untuk menyusun program-program pembangunan daerah bergantung pada aspirasi masyarakat. Masyarakat menjadi pusat perhatian dan pelaku utama pembangunan, menurut Sumodiningrat.

Menurut Soetomo, perencanaan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat mampu menjadi ajang bagi mereka untuk memperoleh kesempatan dan wewenang yang besar dalam pengelolaan pembangunan daerah. Tujuan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah menciptakan masyarakat yang berdaya melalui kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Pembangunan masyarakat selalu

memaksimalkan adanya nilai partisipasi. Harapan dari munculnya partisipasi adalah setiap orang dapat terlibat aktif dalam proses dan kegiatan bermasyarakat.

Meskipun cara berpartisipasi yang ditunjukkan setiap orang berbeda-beda sesuai keahlian dan kebutuhan masing-masing. Partisipasi masyarakat dapat menjadi sarana dari semua pemikiran-pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat.

Partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Partisipasi dinilai menjadi poin penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh informasi yang relevan dan akuntabel, serta mengetahui tanggapan masyarakat atas kebijakan yang diterapkan.

Partisipasi menjadi unsur penting bagi pemerintah daerah karena sebagai sumber informasi mengenai kondisi masyarakat setempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan, dan sebagai hak demokrasi.

Kunci dari pemahaman partisipasi terletak pada kesukarelaan anggota masyarakat untuk terlibat dan melibatkan diri dalam program pembangunan. Pemahaman partisipasi tersebut juga senada dengan penjelasan secara normatif, bahwa partisipasi masyarakat adalah adanya keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dapat diukur dan dianalisa melalui suatu teori partisipasi publik. Teori partisipasi publik dikenal dengan nama *ladder of participation* (tangga partisipasi). Tangga partisipasi memiliki delapan anak tangga partisipasi antara lain: manipulasi, terapi, pemberian informasi, konsultasi, penentraman, kemitraan, kekuasaan yang didelegasikan, dan



kendali warga. Hasil perhitungan dari tangga partisipasi dapat menjadi bahan rujukan untuk mengetahui derajat partisipasi masyarakat pada suatu daerah. Beberapa penelitian terdahulu telah menggunakan *ladder of participation* sebagai alat untuk mengukur partisipasi masyarakat di suatu daerah yang diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2014), Tagu (2012), Suroso (2014), dan Solekan (2011) secara umum mendeskripsikan bahwa derajat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berada pada kategori tokenism (tanda partisipasi). Kategori tokenism menjelaskan adanya keterlibatan warga dalam menyampaikan pendapat, tetapi belum ada keterlibatan langsung saat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan cenderung didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa usulan-usulan yang disampaikan saat musyawarah dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dan terwujud.

Sehubungan dengan hasil penelitian terdahulu, maka teori tersebut tidak berlaku bagi penelitian partisipasi masyarakat di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat partisipasi masyarakat tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Masyarakat Tosaren secara umum kurang terlibat aktif dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Menurut AH (45 th), “warga di sini masih belum menjalin kerja sama yang baik dan terkadang kurang memahami PRODAMAS”. Musyawarah PRODAMAS yang hanya dibicarakan saat arisan bapak-bapak, menyebabkan minimnya masukan dan proses perencanaan dari kelompok kegiatan masyarakat lain, seperti: PKK dan Karang Taruna.

Pembahasan Program Pemberdayaan Masyarakat yang kurang dalam kegiatan PKK dan/atau Karang Taruna disebabkan adanya kebiasaan masyarakat cenderung malas dan susah berpikir secara inovasi. Masyarakat Tosaren, terutama kaum wanita yang menjadi ibu rumah tangga maupun yang bekerja di rumah tidak memiliki keahlian dan kemampuan berpikir secara kritis, apabila dibandingkan dengan para ibu yang mempunyai mata pencaharian dan bekerja di luar rumah. Para ibu menganggap Program Pemberdayaan Masyarakat sering berkaitan dengan pembangunan fisik, sehingga kaum laki-laki lebih pantas menjadi pelaksana dan memusyawarahkannya. Peran ibu-ibu yang tidak ada antusias mengindikasikan para bapak kurang memotivasi dan memberi kesempatan agar kaum wanita turut terlibat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Menurut *Plummer*, jenis kelamin dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat dalam partisipasi, karena laki-laki dan perempuan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

Kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan PRODAMAS dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Pendidikan dapat mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi di lingkungan sekitarnya. Jumlah Masyarakat Tosaren yang berlatar pendidikan rendah lebih besar daripada masyarakat berpendidikan tinggi. Mayoritas masyarakat berpendidikan rendah merupakan lulusan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas / kejuruan. Total responden yang menjadi sampel penelitian juga menunjukkan hasil persentase sebesar 52% adalah lulusan SMA/SMK. Menurut DK (34 th), "rata-rata warga RT 01-03 di Tosaren, lulusan SMA, kebanyakan SMK. Jadi kalo ada hal-hal seperti ini,



warga biasanya bingung untuk mengisi dan menjawab (kuesioner). Apalagi disuruh menilai PRODAMAS”.

Banyak Masyarakat Tosaren yang menjadi lulusan SMA maupun pendidikan rendah dipengaruhi jarak wilayah yang cukup jauh menuju pusat pendidikan. Pusat pendidikan Kota Kediri tersebar di wilayah Kecamatan Mojojoto untuk pendidikan tingkat sekolah menengah atas / kejuruan, dan wilayah Kecamatan Kota untuk pendidikan tingkat dasar hingga menengah pertama. Jarak tempuh yang cukup jauh menuju sekolah, maka menyebabkan masyarakat perlu biaya tambahan untuk menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Masyarakat yang tidak mempunyai biaya tambahan sebagai biaya transportasi, maka tidak dapat memperoleh sekolah yang bermutu dan berkualitas. Menurut Plummer, tingkat pendidikan sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta memahami dan melaksanakan berbagai tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

Keinginan masyarakat terlibat pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari ada atau tidaknya paksaan untuk berpartisipasi. Menurut DK (34 th), “sebagian warga memang ada yang tidak pernah ikut arisan bapak-bapak, tetapi kadang tetap kelihatan waktu pelaksanaannya atau kerja bakti di hari minggu” Masyarakat yang tidak pernah terlibat dalam proses perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat saat arisan bapak-bapak yang diadakan secara rutin, tetapi masih ada kontribusi atau terlibat hanya pada waktu proses kerja bakti.

Kondisi ini mengindikasikan masih adanya partisipasi masyarakat yang disebabkan



unsur paksaan. Unsur paksaan dari masyarakat menunjukkan tidak adanya partisipasi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Keterlibatan masyarakat yang didasari sikap terpaksa dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dipengaruhi kurangnya rasa peduli terhadap program-program pemerintah. Minimnya kepedulian masyarakat disebabkan program-program pemerintah yang bersifat bantuan sosial, ternyata tidak dialokasikan secara merata. Kesalahan pengalokasian program bantuan sosial yang sering terjadi ialah tidak semua anggota RT mendapat bantuan, muncul nama warga yang sama dalam daftar penerima bantuan sosial, salah sasaran antara warga yang mampu dan tidak mampu. Kesalahan-kesalahan seperti ini yang membuat sebagian masyarakat menjadi terpaksa dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Menurut Haris, kesukarelaan dan keterlibatan secara emosional menjadi syarat terbentuknya partisipasi dalam lingkup kepentingan negara dan pemerintahan.

Masyarakat Tosaren yang terpaksa berpartisipasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dipengaruhi oleh kesibukan / pekerjaan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mayoritas responden bekerja sebagai karyawan swasta. Mata pencaharian sebagai karyawan swasta cenderung bergantung pada waktu dan lokasi bekerja. Salah seorang responden yaitu, Z (48 th) mengakui, “saya sering keluar kota, jadi tidak tahu”. Masyarakat yang sibuk bekerja dan tidak menentu, ternyata turut mempengaruhi tingkat intensitas keterlibatan berpartisipasi, khususnya dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Menurut *Plummer*, masyarakat dengan tingkat pekerjaan tertentu akan lebih meluangkan

waktu atau bahkan tidak dapat meluangkan waktu sedikitpun untuk berpartisipasi.

Alasan yang mendasarinya adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

Kesibukan masyarakat menyebabkan minimnya informasi tentang Program

Pemberdayaan Masyarakat yang dapat diketahui. Masyarakat Tosaren mendapat informasi PRODAMAS berasal dari kelurahan, pendamping / PPTK, dan tetangga.

Beberapa responden seperti: Y (23 th), R (25 th), dan H (41 th) secara umum,

mereka mengetahui adanya Program Pemberdayaan Masyarakat “dari perangkat kelurahan dan media cetak lokal”. Mayoritas pemahaman responden tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat adalah “dana yang diturunkan untuk tiap RT sebesar 50 juta tiap tahunnya” menurut penuturan FS (27 th). Pada

tempat yang berbeda, TS (33 th) menuturkan, Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan “pembagian sembako pada yang membutuhkan”. Kondisi ini mengindikasikan Masyarakat Tosaren kurang memahami secara detail tentang

Program Pemberdayaan Masyarakat, seperti: tujuan dan manfaat, sasaran, mekanisme perencanaan, dan besarnya alokasi anggaran. Pemahaman Masyarakat

Tosaren yang terbatas tentang Program Pemberdayaan Masyarakat disebabkan pemerintah melalui perangkat kelurahan setempat kurang bervariasi dalam

sosialisasi Peraturan Wali Kota Kediri No.40/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, termasuk setiap ada revisi peraturan

wali kota tentang PRODAMAS. Menurut Sahidu, penguasaan informasi dapat mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.



Sehubungan dengan pembahasan di atas, maka derajat partisipasi masyarakat di Kelurahan Tosaren tidak berkontribusi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, apabila dilihat dari pengaruh variabel bebas secara parsial. Derajat partisipasi Masyarakat Tosaren yang tidak berkontribusi disebabkan karena dominasi laki-laki dalam perencanaan, tingkat pendidikan akhir, adanya paksaan, kesibukan bekerja, dan kurangnya pemahaman tentang Program Pemberdayaan Masyarakat secara detail. Hasil penelitian derajat partisipasi Masyarakat Tosaren secara parsial menunjukkan tidak adanya variabel lain yang turut mempengaruhi. Sementara berdasarkan hipotesis secara simultan, derajat partisipasi masyarakat dapat berkontribusi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Adanya kontribusi secara simultan pada derajat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh dua variabel bebas yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

5.2.5 Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang berorientasi masyarakat menjadi strategi dan penentu keputusan publik. Strategi dan proses penentuan keputusan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Peran dan partisipasi masyarakat dapat membawa perubahan dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi merupakan proses alami yang muncul dari masyarakat karena adanya kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Partisipasi masyarakat dapat terwujud apabila terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa



faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat meliputi :

a) **Pengaruh Faktor Internal terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dapat terwujud apabila ada faktor yang memengaruhinya. Faktor yang memengaruhi kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dapat berasal dari hal-hal yang terdapat dalam diri individu tersebut. Hasil penelitian dari Kuncoro (2010) dan Yulianti (2012) menjelaskan faktor internal yang menjadi stimulus masyarakat agar berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah meliputi: besarnya keterlibatan dalam kegiatan pembangunan, pengetahuan, dan motivasi. Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, maka tidak berlaku bagi penelitian di wilayah Tosaren. Partisipasi Masyarakat Tosaren dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat tidak dapat dipengaruhi oleh faktor internal secara parsial.

Masyarakat Tosaren kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dilihat dari faktor internal, ternyata dipengaruhi oleh kurangnya keterlibatan pada setiap kegiatan, kurangnya pengetahuan dan tidak adanya motivasi. Salah seorang warga, S (52 th) mengungkapkan “saya nggak pernah datang rapat, soalnya ada cucu di rumah”. Menurut W (49 th) menambahkan “sibuk ngurus sawah, jadi nggak pernah datang rapat/arisan/PKK”. Kondisi tersebut mengindikasikan sebagian masyarakat Tosaren jarang menghadiri undangan rembug warga dan kegiatan lainnya



dalam rangka menunjang pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Masyarakat Tosaren lebih mementingkan kegiatan dan kesibukan masing-masing daripada turut berpartisipasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Menurut Zubaedi, partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara maksimal menjadi orientasi pembangunan. Tujuan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, supaya setiap anggota dapat terlibat aktif dalam proses dan kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat.

Intensitas keterlibatan masyarakat yang kurang dalam setiap kegiatan rembug warga maupun kerja bakti, ternyata dapat mengakibatkan minimnya pengetahuan warga tentang perkembangan Program Pemberdayaan Masyarakat di lingkungannya. Salah seorang responden, HR (39 th) mengatakan, “kurang informasi mbak, nggak pernah tau apa-apa, tau-tau kalo minggu sudah ada yang kerja bakti”. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang kurang, mengindikasikan masyarakat setempat tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang ada dengan baik. Pemerintah melalui perangkat kelurahan telah memberi kesempatan warga Tosaren untuk menyusun rencana kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat, tetapi masyarakat tidak berperan serta secara maksimal. Masyarakat yang paham akan setiap tahapan Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah RT-nya mulai perencanaan hingga pelaksanaan, maka cenderung lebih memahami susunan dan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil rembug warga melalui arisan rutin bapak-bapak. Menurut *Plummer*, dasar pengetahuan yang dimiliki seseorang akan memengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Aspek



pengetahuan membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

Masyarakat yang sulit memahami pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan suatu program, khususnya Program Pemberdayaan Masyarakat, maka memiliki kecenderungan tidak ada motivasi dalam setiap kegiatan bermasyarakat. Menurut SM (44 th), “saya malas ikut arisan bapak-bapak, nggak pernah datang”. Sikap malas yang muncul dari sebagian warga disebabkan belum adanya program-program pemerintah yang berorientasi pemberdayaan dan mengandung unsur partisipasi. Pemerintah kurang memberi stimulus supaya masyarakat dapat berkegiatan dan melatih pola pikir. Menurut DK (34 th), “sebelum ada prodamas, warga itu nggak pernah ada rapat-rapat.

Paling hanya sekedar kumpulan arisan dan pengumuman-pengumuman kalo ada dari kelurahan”. Masyarakat tidak mempunyai empati dan peka akan lingkungannya, karena tidak ada motivasi untuk terlibat secara aktif Program Pemberdayaan Masyarakat. Menurut Azwar, motivasi menjadi rangsangan dan dorongan yang dimiliki seseorang untuk berbuat dan bekerja sama secara optimal dalam melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama. Motivasi merupakan salah satu unsur pemberdayaan. Menurut Suhendra, motivasi dapat dikaitkan dengan adanya kemauan politik, suasana kondusif, potensi masyarakat, dan kesadaran dalam unsur pemberdayaan. Unsur pemberdayaan menjadi ciri adanya masyarakat yang berdaya, karena dapat mendukung dan mengawasi proses pembangunan, seperti pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

b) Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi faktor internal, tetapi juga adanya pengaruh dari eksternal. Penelitian yang telah dilakukan pada kelompok Masyarakat Tosaren menghasilkan keputusan bahwa faktor eksternal berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Faktor eksternal terdiri dari indikator kepemimpinan dan komunikasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuddy (2012) menyatakan semakin tinggi penerapan gaya kepemimpinan, maka semakin meningkat kinerja anggota. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan *relationship* memberi dampak positif terhadap peningkatan kinerja anggota. Hasil penelitian tersebut juga berlaku bagi penelitian terkait partisipasi masyarakat di Tosaren yang dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal yaitu peran Ketua RT sebagai pemimpin berbasis wilayah rukun tetangga dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut DK (34 th), “peran RT sangat berpengaruh, karena ketua RT bisa mengarahkan usulan warga dalam PRODAMAS”. Sosok ketua RT dan adanya kualitas sebagai pimpinan dapat mempengaruhi pola pergerakan partisipasi masyarakat di Tosaren. Ketua RT dapat lebih memahami secara detail terhadap hal-hal yang diinginkan masyarakat. Ketua RT sebagai perwakilan perangkat desa yang mudah mendengarkan masukan dari masyarakat. Ketua RT bersikap sabar ketika harus memberi penjelasan



mekanisme kerja kepada masyarakat, khususnya perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Kepemimpinan merupakan proses terjadinya interaksi antara pemimpin, anggota, dan situasi. Kepemimpinan menjadi unsur yang mampu mendorong masyarakat agar turut terlibat dan bekerja secara aktif. Menurut YT (23 th), “peran ketua RT sangat vital dan berperan aktif karena RT yang memimpin musyawarah di setiap rapat bapak-bapak untuk membahas alokasi penggunaan prodamas”. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran ketua RT mampu menciptakan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Antusiasme masyarakat dapat diwujudkan melalui bentuk dan sikap pertanggung jawaban atas segala keputusan yang dibuat oleh Ketua RT, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.

Hasil penelitian dari Muro dan Namusonge (2015) menyebutkan partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan dipengaruhi dengan cara bagaimanakah mereka diatur dan dipimpin. Keterlibatan masyarakat bergantung pada motivasi pemimpin yang mematuhi asas *good governance*.

Salah seorang responden, RI (25 th) mengakui “pak RT memberi semangat dan ikut turun lapangan pada saat proses pengerjaan”. Pendapat ini menunjukkan adanya tindakan nyata yang dibuktikan ketua RT demi keberhasilan pelaksanaan program. Menurut Soetrisno, ketua RT dapat memberi kebebasan pada warganya. Kebebasan yang diberikan bertujuan agar warga dapat



menentukan rencana dan target, serta bekerja secara aktif demi pencapaian target yang telah disepakati oleh warga bersama-sama.

Keberhasilan ketua RT sebagai pemimpin juga dipengaruhi oleh pola komunikasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sukertha (2015) menghasilkan bentuk komunikasi yang dilakukan secara *bottom up* menunjukkan adanya peran masyarakat desa secara partisipatif. Kecakapan para Lurah sebagai pemegang pimpinan Program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kelurahan sangat diharapkan oleh semua personil pada jenjang pemerintahan di bawahnya. Sinergitas dan komunikasi yang baik dengan tim di tingkat kelurahan yaitu PPTK, pendamping, dan para ketua RT menjadi suatu kewajiban untuk mencapai keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat memerlukan pengaruh komunikasi dalam proses perencanaannya. Tujuan komunikasi tidak hanya untuk membentuk kelompok masyarakat dan penyampaian aspirasi Program Pemberdayaan Masyarakat. Manfaat lain dari komunikasi berguna menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat dalam proses Program Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut KY (71 th), "untuk itu komunikasi yang baik antar personil kelurahan, pendamping, RT dan warga menjadi harga mati untuk terus dilakukan".

Komunikasi menjadi alternatif utama untuk menimbulkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat Tosaren dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat.



6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan pembahasan yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Sistem perencanaan pembangunan yang menerapkan pendekatan *bottom-up* dapat ditandai dengan adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat diarahkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan bentuk dan sarana proses perencanaan dengan pendekatan *bottom-up*. Setiap jenjang pemerintahan mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk membahas rencana strategis, seperti di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

Pemerintah telah melibatkan dan menghadirkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa / kelurahan. Sebagian besar masyarakat bersedia untuk menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan. Derajat partisipasi masyarakat di Kelurahan Tosaren berada pada anak tangga *partnership* (kemitraan). Masyarakat dianggap menjadi mitra kerja pemerintah. Masyarakat berhak atas keputusan yang dibuat berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi keinginan bersama.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu program dari Pemerintah Kota Kediri yang berguna untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat berbasis wilayah RT. Kelurahan Tosaren merupakan salah satu wilayah yang sudah menyelenggarakan Program





Pemberdayaan Masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan usulan-usulan pembangunan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. Masyarakat membahas perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat secara rutin tiap bulan. Masyarakat juga turut membantu pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan bantuan swadaya.

3. Pemerintah membuat suatu perencanaan dalam usahanya membangun daerah. Perencanaan sebagai alternatif untuk menyusun kegiatan dalam proses pembangunan. Para praktisi pembangunan menggunakan pendekatan pemberdayaan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat berusaha melibatkan partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Tosaren dapat membawa perubahan dan percepatan pembangunan. Masyarakat yang berpartisipasi dapat dipengaruhi faktor internal dan eksternal.

4. Pemerintah Kota Kediri telah menganut perencanaan pembangunan melalui pendekatan *bottom-up* dan berorientasi pada masyarakat. Perencanaan pembangunan yang melibatkan unsur masyarakat, ternyata mengandung nilai partisipasi. Partisipasi menjadi suatu bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dapat diukur dan dianalisa melalui teori partisipasi publik yang dikenal dengan sebutan *ladder of participation*. Derajat partisipasi masyarakat tidak berkontribusi dalam proses pembangunan melalui

pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Pengaruh partisipasi masyarakat yang tidak berkontribusi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat karena dominasi kaum pria untuk menyusun rencana kegiatan, latar belakang pendidikan, unsur terpaksa, pekerjaan, dan kurang variasi saat sosialisasi program.

5. Partisipasi masyarakat di Tosaren dapat dilihat dari pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh faktor internal terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, ternyata juga tidak memiliki kontribusi. Faktor internal yang tidak memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat karena intensitas keterlibatan yang kurang, minim pengetahuan, dan kurang termotivasi. Masyarakat di Kelurahan Tosaren dapat terlibat dalam kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat, apabila ada peran Ketua RT dan pengaruh komunikasi. Peran Ketua RT dan komunikasi merupakan indikator dari faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap partisipasi Masyarakat selama pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

6.2 Saran

1. Perencanaan usulan Program Pemberdayaan Masyarakat perlu dilakukan pembahasan dalam forum PKK dan Karang Taruna. Supaya partisipasi masyarakat meningkat, dilihat dari aspek jenis kelamin dan usia.



2. Menentukan dan memilih beberapa warga sebagai perwakilan RT untuk mengikuti arahan dan sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat secara detail.
3. Mengarahkan para ibu menjadi wakil kepala keluarga dalam setiap kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat mulai rebug warga hingga pelaksanaan, apabila kepala keluarga tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut.
4. Pemerintah lebih variatif dalam melakukan sosialisasi setiap perubahan atas Program Pemberdayaan Masyarakat, supaya masyarakat dapat memahami dengan mudah.
5. Setiap RT mengumumkan rencana kegiatan yang telah diverifikasi dan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada warga yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adakitaneews. 2014. "Prodamas Berpotensi Overlapping Kinerja SKPD". Diakses melalui www.adakitaneews.com [15/10/15].

Adisasmita, Raharja. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaharuan



Adnan, Lenny. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Rencana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di Kabupaten Padang Pariaman*. Tesis, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Agan, Subardi. 2014. *PRODAMAS Semoga Menjadi Emas*. Tabloid Kota Kita, Hal. 2, Desember 2014.

Ali, Mohammad, dan Muhammad Asrori. 2014. *Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ariyani, Dini. 2014. *Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Probolinggo*. Tesis, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Bappeda Kota Depok. 2007. "Kajian Perencanaan Partisipatif Kota Depok". Diakses melalui <http://bappeda.depok.go.id> [22/09/15].

Barometer. Agustus 2015. *Prodamas, Program Percepatan Penyelesaian Pembangunan*. Hal.4.

Bebas Banjir 2015. "Partisipasi Masyarakat". Diakses melalui <https://bebasbanjir2025.wordpress.com/> [30/09/15].

Bungin, M. Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan.

Christens, Brian D. 2012. "Targeting Empowerment in Community Development". In *Community Development Journal* Vol.47, No.4, October 2012, pp.538-554.

Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. Diterjemahkan oleh Setiawan dan Affan Ghafar. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Effendi, Sofian. 2006. "Unsur-unsur Penelitian Survei". Dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (eds.). *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. Jakarta:LP3ES.

Efferin, Sujoko, dkk. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Eko, Sutoro. 2003. *Ekonomi Politik Pembaharuan Desa*. Makalah disampaikan pada Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) tentang Refleksi Arah dan Gerakan Partisipasi dan Pembaharuan Masyarakat Desa di Indonesia, Ngawi, Jawa Timur, 15-18 Juni 2003.

Erstad, Margaret. 1997. "Empowerment and Organizational Change". In *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 9/7[1997], pp. 325-333.

Firmansyah, Saca. 2009. "Partisipasi Masyarakat". Diakses melalui <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/> [08/07/15].

Friady, Agus. 2013. "Pengertian Partisipasi Masyarakat". Diakses melalui <http://sosiatristudyclub.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-partisipasi-masyarakat.html> [04/12/15].

Hakim, Arif Rahman. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Formulasi Perencanaan Program Peningkatan Populasi dan Performance Sapi Madura Melalui Inseminasi Buatan*. Tesis, Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Hardhinawati, Birgitta Dwi. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu*. Tesis, Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.

Henning, Dale A, dan Preston P.Le Breton. 1961. *Planning Theory*. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

Hodgkinson, Christopher. 1978. *Towards a Philosophy of Administration*. Oxford: Basil Blackwell.

Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision Analysis and Practice*. Australia: Longman.



_____, dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development*. Diterjemahkan oleh Sastrawan Manulang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Penerbit Belantika.

Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Keating, Charles J. 1993. *Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya*. Diterjemahkan oleh A.M. Mangunhardjana. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Khwaja, Asim Ijaz. 2004. "Is Increasing Community Participation Always A Good Thing?". In *Journal of the European Economic Association*, 2(2-2):427-436, May 2004.

Kuddy, Aprianto L. 2012. *Gaya Kepemimpinan, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Tesis, Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

_____. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

_____. 2010. "Mengapa Kemiskinan Perlu Diteliti?". Dalam Harris Iskandar, (eds.). *Pengentasan dari Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

Mantra, Ida Bagoes, dan Kasto. 2006. "Penentuan Sampel". Dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (eds.). *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.

Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Menteri Dalam Negeri. 2010. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta.



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Diterjemahkan oleh Matheos Nalle. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moczydlowska, Joanna M, et al. 2015. "Empowerment in Management Practice". In *International Journal of Research Science and Management*, 2(7): July 2015, pp. 16-19.

Moeljarto, Vidhyandika. 1996. "Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT". Dalam Onny S. Prijono, dan A.M.W.Pranarka. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Muluk, M.R.Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Lembaga Penerbitan & Dokumentasi FIA-UNIBRAW dan Bayumedia Publishing.

_____. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Penerbit ITS Press.

Muro, Jackson Estomith, dan G. S. Namusonge. 2015. "Governance Factors Affecting Community Participation In Public Development Projects In Meru District In Arusha In Tanzania". In *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol.4, No.6, June 2015.

Nasirin, Chairun. 2010. *Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Malang: Indo Press.

Papilaya, Eddy Ch. 2001. "Paradigma Pemberdayaan Pengungsi Maluku: Suatu Tinjauan Filsafat Pendidikan". Diakses melalui <http://wunaliwubarakati.blogspot.com/> [23/09/15].

Pinatik, Mordekai. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara*. Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Presiden Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.

Purnamasari, Irma. 2008. *Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi*. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.



- Rendy, 2011. "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah" Diakses melalui <http://penelitian-hukum-rendy.blogspot.co.id/> [15/10/15].
- Riduwan, dan Engkos Achmad Kuncoro. 2008. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta.
- Riyadi, dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rustiadi, E., Syaefulhakim .S, dan Panuju. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Sa'adah, Nurus. 2015. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal". Dalam Siti Kurnia Widiastuti, (eds.). *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwono, Jonathan. 2007. *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2010. "Kemiskinan dalam Perspektif Psikologi". Dalam Harris Iskandar, (eds.). *Pengentasan dari Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sisk, Timothy. 2002. *Demokrasi ditingkat Lokal; Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Pemerintahan*. Jakarta: Internasional IDEA.
- Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.



- Soetrisno, Loekman. 2004. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sofia, Adib. 2015. "Dampak Novel dan Film Laskar Pelangi Bagi Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat Belitung: Tinjauan Sosiologi Sastra". Dalam Siti Kurnia Widiastuti, (eds.), *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.
- Solekan, Moch. 2011. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Tesis, Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Sopannah. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penganggaran Daerah Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Suku Tengger Bromo Jawa Timur*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Sudarmanto, R. Gunawan. 2005. *Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2006. "Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin". Diakses melalui www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm [19/10/15].
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sukertha, Agus Ardi. 2015. *Pola Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat Desa Adat dalam Implementasi Tri Hita Karana pada Pelestarian Budaya Lokal di Daerah Kawasan Wisata*. Tesis, Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Suroso, Hadi. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran, Kecamatan*

Driyorejo, Kabupaten Gresik. Tesis, Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.

Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan daerah*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Tabloid Kota Kita. Januari 2015. *Anggaran Prodamas 2015 Goal*. Hal.2.

_____. Januari 2015. *Tekan Angka Kemiskinan Dengan Prodamas*. Hal.3.

_____. Januari 2015. *Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Kunci Keberhasilan Pembangunan*. Hal.7.

_____. Maret 2015. *Polisi dan Kejaksaaan Siap Kawal*. Hal.7.

_____. April 2015. *Kejaksaaan Konsisten Kawal Prodamas*. Hal.1.

_____. Mei 2015. *14 Tahun Rampung Dalam Setahun*. Hal.1.

Tagu, Kosmas Damianus. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Tesis, Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah: Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Trihendradi, C. 2013. *Step by Step IBM SPSS 21: Analisis Data Statistik*. Yogyakarta: Andi.

Usman, Sunyoto. 2001. *Analisis Kritis Model-Model Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah disampaikan pada acara Dialog Nasional tentang Pembangunan Pertanian Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jakarta, 2001.

_____. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Walikota Kediri. 2014. *Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat*. Kediri.

Widiastuti, Siti Kurnia. 2015. "Pemberdayaan Masyarakat Marginal Berbasis Penelitian Komunitas". Dalam Siti Kurnia, Widiastuti, (eds.). *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yulianti, Yoni. 2012. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok*. Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang.

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Lampiran 1. Lembar Kuesioner

Kepada Yth. Bapak / Ibu, Kel. Tosaren
Kec. Pesantren - Kota Kediri

Saya Natalia Niken Ekawati, Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Saya mengadakan penelitian sebagai bahan tugas akhir. Saya mengharapkan kesediaan Bapak / Ibu untuk mengisi kuesioner. Kuesioner berhubungan dengan **pendapat Bapak / Ibu sebagai pelaksana dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Kota Kediri di tingkat RT (Rukun Tetangga)**. Hasil kuesioner tidak akan dipublikasikan, melainkan untuk kepentingan penelitian dan bersifat rahasia.
Atas bantuan dan kerja sama Bapak / Ibu, saya mengucapkan terima kasih.



Petunjuk pengisian :

- Berilah tanda silang (X) atau tanda *check* (✓) pada kolom jawaban yang dipilih.
- Isilah nama, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan pekerjaan sesuai dengan identitas Bapak / Ibu.
- Keterangan :
 SS = Sangat Setuju
 S = Setuju
 N = Netral
 TS = Tidak Setuju
 STS = Sangat Tidak Setuju

Nama :

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Umur : tahun

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

Kode	No.	Pertanyaan / Pernyataan	Pilihan Jawaban				
			SS	S	N	TS	STS
X ₁	1.	Saya sering mengikuti rebug warga / rapat dan selalu memberi pendapat / saran terkait pelaksanaan PRODAMAS.					
	2.	Saya merasa pemerintah atau perangkat desa sudah bersedia untuk mendengarkan keluhan warga dan sering melakukan dialog secara langsung maupun lewat media elektronik terkait PRODAMAS.					
	3.	Saya sering terlibat dalam membuat keputusan saat rebug warga / rapat, tetapi saya merasa keputusan tertinggi tetap berada pada Ketua RT / PPTK / Tim Pendamping dari Kelurahan, terkait PRODAMAS.					
	4.	Saya merasa pemerintah atau perangkat desa dan masyarakat sudah menjalin hubungan kerja sama yang baik dalam rangka melaksanakan PRODAMAS.					
	5.	Pemerintah sudah memberi kesempatan pada warga untuk membuat kesepakatan sendiri					



		sesuai hal-hal yang diinginkan seluruh warga di RT ini, khususnya pelaksanaan PRODAMAS.					
X ₂	1.	Saya rajin menghadiri arisan bapak-bapak atau rembug warga dan turut serta dalam kegiatan kerja bakti.					
	2.	Saya mengetahui semua program kegiatan di RT dan mudah memahami setiap kegiatan tersebut.					
	3.	Saya selalu antusias dan berperan aktif dalam setiap kegiatan warga di wilayah RT ini, supaya program kegiatan dapat diselesaikan dengan cepat.					
X ₃	1.	Saya merasa Ketua RT adalah sosok pemimpin yang ramah dan baik pada warga di RT ini.					
	2.	Saya merasa Ketua RT selalu mendukung apa saja yang menjadi keinginan warganya, khususnya pembangunan / perbaikan yang berkaitan PRODAMAS.					
	3.	Saya merasa Ketua RT selalu bijak saat menyelesaikan perbedaan pendapat antar warga.					
	4.	Saya merasa Ketua RT lebih mengutamakan keinginan warga daripada keinginan pribadi.					
	5.	Saya merasa Ketua RT bisa memberikan ide dengan cepat atas masalah yang terjadi saat kegiatan pembangunan / perbaikan sedang dikerjakan.					
	6.	Saya merasa Ketua RT mampu mengkoordinir dan mengatur warga supaya mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat saat melaksanakan pembangunan / perbaikan di RT saya, khususnya terkait PRODAMAS.					
	7.	Pemerintah dan perangkat desa sudah mensosialisasikan / mengumumkan PRODAMAS kepada seluruh warga di RT ini.					

	8.	Pemerintah dan perangkat desa sudah menginformasikan PRODAMAS dengan jelas kepada seluruh warga di RT ini.				
	9.	Pemerintah dan perangkat desa sudah menginformasikan PRODAMAS dengan akurat kepada seluruh warga di RT ini.				
	10.	Pemerintah dan perangkat desa sudah menginformasikan PRODAMAS dengan konsisten (tidak berubah-ubah) kepada seluruh warga di RT ini.				
Y	1.	Apakah pelaksanaan PRODAMAS mampu menyelesaikan persoalan warga di RT ini, khususnya di bidang infrastruktur ? Contoh : perbaikan jalan, membangun selokan, membangun paving, dan lain-lain.				
	2.	Apakah pelaksanaan PRODAMAS mampu menyelesaikan persoalan warga di RT ini, khususnya di bidang ekonomi ? Contoh : pelatihan UMKM, pembelian bibit tanaman untuk dikelola bersama-sama, dan lain-lain.				
	3.	Apakah pelaksanaan PRODAMAS mampu menyelesaikan persoalan warga di RT ini, khususnya di bidang sosial ? Contoh : memberi bantuan makanan, pembagian sembako, membeli peralatan untuk kegiatan kampung (kursi, sound system, tempat sampah, pot bunga), dan lain-lain.				

Lampiran 2. Validitas Item Penelitian

		Correlations					
		X11	X12	X13	X141	X142	X1
X11	Pearson Correlation	1	,511**	,778**	,356	,508**	,792**
	Sig. (2-tailed)		,004	,000	,053	,004	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X12	Pearson Correlation	,511**	1	,502**	,713**	,754**	,866**
	Sig. (2-tailed)	,004		,005	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X13	Pearson Correlation	,778**	,502**	1	,287	,387*	,737**
	Sig. (2-tailed)	,000	,005		,124	,035	,000

	N	30	30	30	30	30	30
X141	Pearson Correlation	,356	,713**	,287	1	,719**	,767**
	Sig. (2-tailed)	,053	,000	,124		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X142	Pearson Correlation	,508**	,754**	,387**	,719**	1	,841**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,035	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30
X1	Pearson Correlation	,792**	,866**	,737**	,767**	,841**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

		Correlations			
		X21	X22	X23	X2
X21	Pearson Correlation	1	,609**	,559**	,834**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,000
	N	30	30	30	30
X22	Pearson Correlation	,609**	1	,724**	,901**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	30	30	30	30
X23	Pearson Correlation	,559**	,724**	1	,869**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000
	N	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	,834**	,901**	,869**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30

		Correlations					
		X311	X312	X313	X314	X315	X316
X311	Pearson Correlation	1	,582**	,506**	,304	,308	,432*
	Sig. (2-tailed)		,001	,004	,102	,097	,017
	N	30	30	30	30	30	30
X312	Pearson Correlation	,582**	1	,605**	,628**	,470**	,642**
	Sig. (2-tailed)	,001		,000	,000	,009	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X313	Pearson Correlation	,506**	,605**	1	,379*	,715**	,586**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000		,039	,000	,001
	N	30	30	30	30	30	30
X314	Pearson Correlation	,304	,628**	,379*	1	,574**	,459*
	Sig. (2-tailed)	,102	,000	,039		,001	,011
	N	30	30	30	30	30	30
X315	Pearson Correlation	,308	,470**	,715**	,574**	1	,574**
	Sig. (2-tailed)	,097	,009	,000	,001		,001
	N	30	30	30	30	30	30
X316	Pearson Correlation	,432*	,642**	,586**	,459*	,574**	1
	Sig. (2-tailed)	,017	,000	,001	,011	,001	
	N	30	30	30	30	30	30
X321	Pearson Correlation	,371*	,299	,584**	,102	,550**	,479**
	Sig. (2-tailed)	,044	,108	,001	,593	,002	,007
	N	30	30	30	30	30	30
X322	Pearson Correlation	,522**	,306	,494**	,116	,391*	,465**
	Sig. (2-tailed)	,003	,100	,005	,543	,033	,010
	N	30	30	30	30	30	30
X323	Pearson Correlation	,457*	,353	,272	,111	,193	,467**
	Sig. (2-tailed)	,011	,056	,145	,560	,306	,009
	N	30	30	30	30	30	30
X324	Pearson Correlation	,375*	,365*	,278	,144	,420*	,541**
	Sig. (2-tailed)	,041	,047	,137	,447	,021	,002
	N	30	30	30	30	30	30
X3	Pearson Correlation	,698**	,754**	,762**	,550**	,724**	,791**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,002	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30

		Correlations				
		X321	X322	X323	X324	X3
X311	Pearson Correlation	,371	,522**	,457**	,375	,698**



X312	Sig. (2-tailed)	,044	,003	,011	,041	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,299**	,306	,353**	,365**	,754**
X313	Sig. (2-tailed)	,108	,100	,056	,047	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,584**	,494**	,272	,278	,762**
X314	Sig. (2-tailed)	,001	,005	,145	,137	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,102	,116**	,111*	,144	,550**
X315	Sig. (2-tailed)	,593	,543	,560	,447	,002
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,550	,391**	,193**	,420**	,724
X316	Sig. (2-tailed)	,002	,033	,306	,021	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,479	,465**	,467**	,541*	,791**
X321	Sig. (2-tailed)	,007	,010	,009	,002	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	1*	,712	,518**	,529	,705**
X322	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,003	,003	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,712**	1	,777**	,621	,751*
X323	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,518*	,777	1	,741	,683
X324	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,529*	,621*	,741	1	,696*
X3	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	,705**	,751**	,683**	,696**	1**

		Correlations			
		Y1	Y2	Y3	Y
Y1	Pearson Correlation	1	,660**	,843**	,950**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	,660**	1	,450*	,808**
	Sig. (2-tailed)	,000		,013	,000
	N	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	,843**	,450*	1	,870**
	Sig. (2-tailed)	,000	,013		,000
	N	30	30	30	30
Y	Pearson Correlation	,950**	,808**	,870**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30

Lampiran 3. Reliabilitas Item Penelitian

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,942	21

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X11	78,87	132,671	,643	,939
X12	78,73	131,582	,772	,937



X13	78,80	134,579	,605	,940
X141	78,73	133,857	,613	,940
X142	78,57	132,668	,684	,939
X21	78,83	132,764	,622	,940
X22	78,73	130,064	,711	,938
X23	78,73	131,513	,736	,938
X311	78,70	133,252	,631	,939
X312	78,80	132,993	,656	,939
X313	78,87	134,740	,635	,939
X314	79,27	136,823	,492	,942
X315	79,13	134,878	,651	,939
X316	78,87	136,326	,582	,940
X321	78,90	137,128	,604	,940
X322	78,93	133,926	,690	,939
X323	78,87	135,913	,568	,940
X324	78,90	134,921	,648	,939
Y1	78,73	130,340	,761	,937
Y2	79,23	136,668	,410	,944
Y3	78,80	129,062	,789	,937

Lampiran 4. Deskriptif Item Penelitian

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X11	98	2	5	390	3,98	,849
X12	98	3	5	415	4,23	,589
X13	98	2	5	359	3,66	,861
X141	98	3	5	405	4,13	,603
X142	98	3	5	424	4,33	,570
X21	98	2	5	376	3,84	,971
X22	98	2	5	378	3,86	,773
X23	98	2	5	374	3,82	,854
X311	98	2	5	416	4,24	,593
X312	98	3	5	429	4,38	,566
X313	98	3	5	412	4,20	,609
X314	98	3	5	419	4,28	,570
X315	98	3	5	410	4,18	,598
X316	98	3	5	415	4,23	,606
X321	98	2	5	403	4,11	,758
X322	98	2	5	388	3,96	,717
X323	98	2	5	384	3,92	,728
X324	98	3	5	381	3,89	,640
Y1	98	3	5	436	4,45	,611
Y2	98	1	5	336	3,43	,885
Y3	98	2	5	435	4,44	,593
Valid N (listwise)	98					

Lampiran 5. Frekuensi Item Penelitian

informing					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	3	3,0	3,1	3,1
	Netral	27	27,3	27,6	30,6
	Setuju	37	37,4	37,8	68,4
	Sangat setuju	31	31,3	31,6	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

		consultation			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	8	8,1	8,2	8,2
	Setuju	59	59,6	60,2	68,4
	Sangat setuju	31	31,3	31,6	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

		placation			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	10	10,1	10,2	10,2
	Netral	28	28,3	28,6	38,8
	Setuju	45	45,5	45,9	84,7
	Sangat setuju	15	15,2	15,3	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

		partnership_1			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	12	12,1	12,2	12,2
	Setuju	61	61,6	62,2	74,5
	Sangat setuju	25	25,3	25,5	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

		partnership_2			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	5	5,1	5,1	5,1
	Setuju	56	56,6	57,1	62,2
	Sangat setuju	37	37,4	37,8	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

		intens terlibat			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	9	9,1	9,2	9,2
	Netral	28	28,3	28,6	37,8
	Setuju	31	31,3	31,6	69,4
	Sangat setuju	30	30,3	30,6	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

		pengetahuan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	5	5,1	5,1	5,1
	Netral	22	22,2	22,4	27,6
	Setuju	53	53,5	54,1	81,6
	Sangat setuju	18	18,2	18,4	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

		motivasi			
--	--	----------	--	--	--





		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	7	7,1	7,1	7,1
	Netral	25	25,3	25,5	32,7
	Setuju	45	45,5	45,9	78,6
	Sangat setuju	21	21,2	21,4	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

pimpinan_1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	1	1,0	1,0	1,0
	Netral	5	5,1	5,1	6,1
	Setuju	61	61,6	62,2	68,4
	Sangat setuju	31	31,3	31,6	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

pimpinan_2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	4	4,0	4,1	4,1
	Setuju	53	53,5	54,1	58,2
	Sangat setuju	41	41,4	41,8	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

pimpinan_3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	10	10,1	10,2	10,2
	Setuju	58	58,6	59,2	69,4
	Sangat setuju	30	30,3	30,6	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

pimpinan_4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	6	6,1	6,1	6,1
	Setuju	59	59,6	60,2	66,3
	Sangat setuju	33	33,3	33,7	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

pimpinan_5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	10	10,1	10,2	10,2
	Setuju	60	60,6	61,2	71,4
	Sangat setuju	28	28,3	28,6	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

pimpinan_6					
------------	--	--	--	--	--

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	9	9,1	9,2	9,2
	Setuju	57	57,6	58,2	67,3
	Sangat setuju	32	32,3	32,7	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

komunikasi_1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	6	6,1	6,1	6,1
	Netral	5	5,1	5,1	11,2
	Setuju	59	59,6	60,2	71,4
	Sangat setuju	28	28,3	28,6	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

komunikasi_2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	6	6,1	6,1	6,1
	Netral	9	9,1	9,2	15,3
	Setuju	66	66,7	67,3	82,7
	Sangat setuju	17	17,2	17,3	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

komunikasi_3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	6	6,1	6,1	6,1
	Netral	12	12,1	12,2	18,4
	Setuju	64	64,6	65,3	83,7
	Sangat setuju	16	16,2	16,3	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

komunikasi_4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	26	26,3	26,5	26,5
	Setuju	57	57,6	58,2	84,7
	Sangat setuju	15	15,2	15,3	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

infrastruktur					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	6	6,1	6,1	6,1
	Setuju	42	42,4	42,9	49,0
	Sangat setuju	50	50,5	51,0	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

ekonomi					
----------------	--	--	--	--	--



		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	1	1,0	1,0	1,0
	Tidak setuju	12	12,1	12,2	13,3
	Netral	40	40,4	40,8	54,1
	Setuju	34	34,3	34,7	88,8
	Sangat setuju	11	11,1	11,2	100,0
Total		98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	1	1,0	1,0	1,0
	Netral	2	2,0	2,0	3,1
	Setuju	48	48,5	49,0	52,0
	Sangat setuju	47	47,5	48,0	100,0
	Total	98	99,0	100,0	
Missing	System	1	1,0		
Total		99	100,0		

Lampiran 6. Frekuensi Karakteristik Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	60	61,2	61,2	61,2
	Perempuan	38	38,8	38,8	100,0
	Total	98	100,0	100,0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	2	2,0	2,0	2,0
	Karyawan Swasta	29	29,6	29,6	31,6
	Wiraswasta	27	27,6	27,6	59,2
	Guru	2	2,0	2,0	61,2
	Petani	4	4,1	4,1	65,3
	Ibu Rumah Tangga	17	17,3	17,3	82,7
	Mahasiswa	2	2,0	2,0	84,7
	Pensiun	2	2,0	2,0	86,7
	Lainnya	13	13,3	13,3	100,0
Total	98	100,0	100,0		

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	22	22,4	22,4	22,4
	SMP	18	18,4	18,4	40,8
	SMA / SMK	51	52,0	52,0	92,9
	S1	7	7,1	7,1	100,0
	Total	98	100,0	100,0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11 - 20 th	4	4,1	4,1	4,1
	21 - 30 th	17	17,3	17,3	21,4
	31 - 40 th	26	26,5	26,5	48,0
	41 - 50 th	21	21,4	21,4	69,4
	51 - 60 th	19	19,4	19,4	88,8
	61 - 70 th	8	8,2	8,2	96,9

71 - 80 th	3	3,1	3,1	100,0
Total	98	100,0	100,0	

Lampiran 7. Regression

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	faktor eksternal, faktor internal, derajat partisipasi masyarakat ^b		Enter

a. Dependent Variable: pelaksanaan PRODAMAS

b. All requested variables entered.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,534 ^a	,286	,263	1,193

a. Predictors: (Constant), faktor eksternal, faktor internal, derajat partisipasi masyarakat

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	53,458	3	17,819	12,525	,000 ^b
	Residual	133,736	94	1,423		
	Total	187,194	97			

a. Dependent Variable: pelaksanaan PRODAMAS

b. Predictors: (Constant), faktor eksternal, faktor internal, derajat partisipasi masyarakat

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	5,139	1,278		4,021
	derajat partisipasi masyarakat	-,061	,075	-,114	-,820
	faktor internal	,068	,073	,116	,924
	faktor eksternal	,185	,034	,554	5,476

Coefficients ^a		
Model		Sig.
1	(Constant)	,000
	derajat partisipasi masyarakat	,414
	faktor internal	,358

faktor eksternal	,000
------------------	------

a. Dependent Variable: pelaksanaan PRODAMAS

Lampiran 8. Correlation

Correlations			
		derajat partisipasi masyarakat	faktor internal
derajat partisipasi masyarakat	Pearson Correlation	1	,709**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	98	98
faktor internal	Pearson Correlation	,709**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	98	98
faktor eksternal	Pearson Correlation	,490**	,255*
	Sig. (2-tailed)	,000	,011
	N	98	98

Correlations		
		faktor eksternal
derajat partisipasi masyarakat	Pearson Correlation	,490
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	98
faktor internal	Pearson Correlation	,255**
	Sig. (2-tailed)	,011
	N	98
faktor eksternal	Pearson Correlation	1**
	Sig. (2-tailed)	
	N	98

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

